

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN KARAKTERISTIK  
FUNGSI AUDIT INTERNAL DAN PERAN AUDIT INTERNAL  
TERHADAP KUALITAS *GOOD GOVERNANCE*  
(STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT JENDERAL  
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**EVA LAIDA  
0606162391**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
JAKARTA  
DESEMBER 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Eva Laida

NPM : 0606162391

Tanda Tangan : 

Tanggal : 23 Desember 2009

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Eva Laida  
NPM : 0606162391  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul Tesis : Analisis Pengaruh Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas *Good Governance* (Studi Kasus pada Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI



Pembimbing : Dr. Bambang Pamungkas

Penguji : Dr. Dwi Martani

Penguji : Dr. Chaerul D. Djakman

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 23 Desember 2009

Mengetahui,  
Ketua Program

  
  
Dr. Lindawati Gani  
NIP. 196205041987012001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Karya Akhir ini. Penyusunan Karya Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi Program Studi Magister Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Karya Akhir ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna sehubungan dengan keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman penulis, tetapi penulis berupaya dengan segenap tenaga dan pikiran untuk mewujudkan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Karya Akhir ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Karya Akhir ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

- (1) Ibu Dr. Lindawati Gani selaku Ketua Program Magister Akuntansi UI;
- (2) Bapak Dr. Bambang Pamungkas selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Karya Akhir ini;
- (3) Ibu Dr. Dwi Martani dan Bapak Dr. D. Chaerul Djakman selaku dosen penguji pada sidang Karya Akhir pada tanggal 14 Desember 2009;
- (4) Bapak/Ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Akuntansi UI atas didikan, bimbingan dan bantuannya selama penulis menempuh pendidikan di Maksi UI;
- (5) Bapak Inspektur Jenderal, Sakri Widhianto, S.Teks, MM; Bapak Ir. Agus Mundiyo, MM, MH; Bapak Drs. R. Emil Panjaitan, MM; Bapak Drs. Ali Fahmi Kamil; Bapak/Ibu Pejabat Struktural, Auditor, serta rekan-rekan Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian atas kerjasama, bantuan dan kemudahan yang diberikan selama penyelesaian Karya Akhir ini;

- (6) Bapak Drs. Fauzi Aziz atas bimbingan dan dukungan moril yang diberikan.
- (7) Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan kasih, doa dan dukungannya;
- (8) Sahabat dan teman-teman penulis di Kelas AKP 2006/3A dan 3B atas segala dukungan, bantuan dan sarannya selama masa perkuliahan dan penyusunan Karya Akhir ini; serta
- (9) Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-per satu yang telah membantu terselesaikannya Karya Akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Karya Akhir ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 23 Desember 2009

Penulis

Eva Laida

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Laida  
NPM : 0606162391  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Departemen : Ekonomi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya akhir saya yang berjudul : “Analisis Pengaruh Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas *Good Governance* (Studi Kasus pada Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan karya akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Desember 2009

Yang menyatakan,

  
( Eva Laida )

## ABSTRAK

Nama : Eva Laida  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul : Analisis Pengaruh Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas *Good Governance* (Studi Kasus pada Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian)

*The Institute of Internal Auditors* (IIA) menyatakan bahwa fungsi auditor internal adalah memberikan keyakinan dan jasa konsultasi yang independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*. Peran auditor internal telah bergeser dari *watchdog* kepada peran konsultan dan katalis. Dari perkembangan tersebut penulis termotivasi untuk menganalisis pengaruh penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal oleh Inspektorat Jenderal terhadap kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian, baik secara parsial maupun bersama-sama.

Dengan menggunakan teknik analisis jalur, hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan searah antara penerapan karakteristik fungsi audit internal dengan peran audit internal sebesar 0,575. Penerapan karakteristik fungsi audit internal secara langsung berpengaruh positif dan signifikan sebesar 16,4836% terhadap kualitas *good governance*, sedangkan peran audit internal berpengaruh positif sebesar 7,840% terhadap kualitas *good governance*, namun secara statistik pengaruh tersebut tidak signifikan. Penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal secara bersama-sama berpengaruh positif namun lemah sebesar 37,4% terhadap kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian.

**Kata kunci:**

Karakteristik fungsi audit internal, peran audit internal, *good governance*, teknik analisis jalur

## ABSTRACT

Name : Eva Laida  
Study Program : Magister of Accounting  
Title : Analysis Influence of Internal Audit Function Characteristics Implementation and Role of Internal Audit on Good Governance Quality (Case Study at General Inspectorate Ministry of Industry)

The Institute of Internal Auditors (IIA) defined internal auditor function is To provide independent, objective assurance and consulting services designed to add value and improve the organization's operation by bringing a systematic, discipline approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process. The role of internal auditor has shifted from watchdog to the role of consultant and catalyst. From that progress researcher is motivated to analyse influence of the internal audit function characteristics implementation and the role of internal audit on good governance quality, either partially or simultaneously.

Using path analysis technique, the research summary are: there is a strong and positive relationship between the internal audit function characteristics implementation and the role of internal audit with value 0,575; directly, internal audit function characteristics implementation influences good governance quality with value 16,4836% meanwhile the role of internal audit influences good governance quality with value 7,840%; the internal audit function characteristics implementation and the role of internal audit influence good governance quality simultaneously with value 37,4%.

**Keywords:**

Internal audit function characteristics, role of internal audit, good governance, path analysis technique



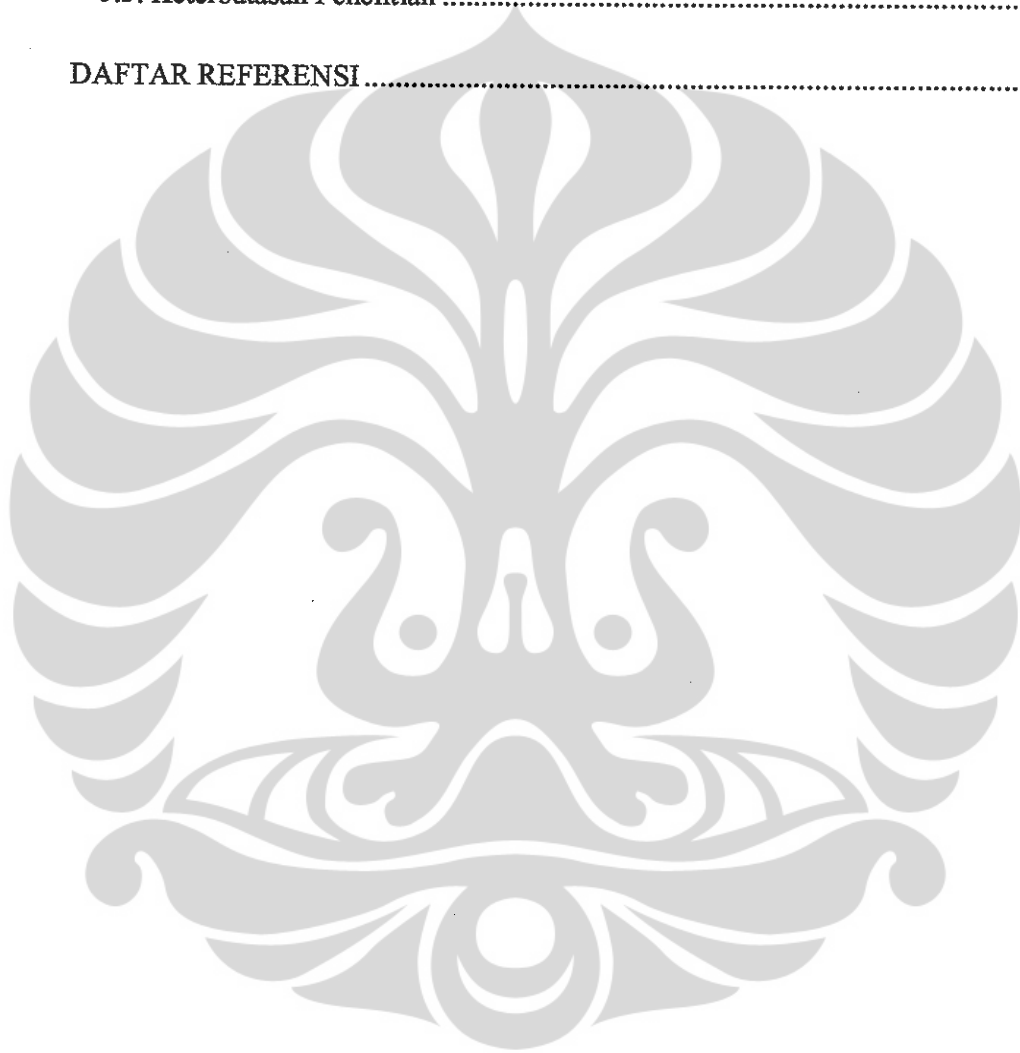
## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA AKHIR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul .....	1
1.2. Permasalahan Penelitian.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1.7. Sistematika Penulisan.....	5
<b>2. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
2.1. Audit Internal .....	7
2.1.1. Pengertian Audit .....	7
2.1.2. Pengertian Audit Internal .....	9
2.1.3. Karakteristik Fungsi Audit Internal .....	13
2.1.4. Independensi.....	14
2.1.5. Kompetensi Auditor Internal.....	15
2.1.6. Pelaksanaan Audit Internal .....	17
2.1.7. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit.....	18
2.2. Peran Auditor Internal .....	18
2.3. Audit Kinerja.....	22
2.3.1. Pengertian Audit Kinerja.....	22
2.3.2. Urgensi Audit Kinerja .....	24
2.3.3. Tipologi Audit Kinerja.....	27

2.3.4. Pengertian Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas.....	30
2.3.5. Standar Audit Kinerja .....	31
2.4. <i>Good Governance</i> .....	34
2.4.1. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	34
2.4.2. Prinsip Transparansi.....	38
2.4.3. Prinsip Akuntabilitas.....	39
2.4.4. Prinsip Keefisienan dan Keefektifan .....	40
2.4.5. Hubungan Audit Internal dengan <i>Good Governance</i> .....	40
2.5. Penelitian-penelitian Sebelumnya .....	41
2.6. Premis .....	46
2.7. <i>Research Gap</i> .....	46
<b>3. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
3.1. Pengembangan Hipotesis .....	49
3.2. Unit Observasi.....	50
3.3. Tipe Penelitian .....	50
3.4. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	51
3.5. Populasi Penelitian .....	54
3.6. Instrumen Penelitian.....	54
3.7. Jenis dan Prosedur Pengumpulan Data.....	55
3.8. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	56
3.8.1. Uji Validitas ( <i>Test of Validity</i> ).....	57
3.8.2. Uji Reliabilitas ( <i>Test of Reliability</i> ).....	58
3.9. Model Penelitian .....	59
3.10. Teknik Analisis Data .....	60
3.10.1. Transformasi Data Ordinal ke Interval .....	60
3.10.2. Uji Asumsi Klasik.....	61
3.10.2.1. Uji Normalitas.....	61
3.10.2.2. Uji Heteroskedastisitas .....	61
3.10.3. Uji Hipotesis .....	62

<b>4. ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	67
4.1.1. Profil Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian .....	67
4.1.1.1. Fungsi Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian.....	67
4.1.1.2. Rencana Strategik Inpektorat Jenderal Departemen Perindustrian .....	69
4.1.1.3. Pedoman Pengawasan Berbasis Pembinaan.....	70
4.1.1.4. Profil Responden Penelitian .....	72
4.1.2. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian .....	73
4.1.2.1. Hasil Uji Validitas ( <i>Test of Validity</i> ) .....	73
4.1.2.2. Hasil Uji Reliabilitas ( <i>Test of Reliability</i> ).....	75
4.1.3. Analisis Deskriptif Jawaban Responden.....	76
4.1.3.1. Analisis Deskriptif Variabel Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal .....	76
4.1.3.2. Analisis Deskriptif Variabel Peran Audit Internal.....	80
4.1.3.3. Analisis Deskriptif Variabel Kualitas <i>Good Governance</i> ... ..	82
4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	86
4.2.1. Hasil Uji Normalitas .....	86
4.2.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	87
4.3. Hasil Pengujian Hipotesis.....	88
4.3.1. Hubungan antara Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal ( $X_1$ ) dan Peran Audit Internal ( $X_2$ ).....	88
4.3.2. Pengaruh Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal ( $X_1$ ) dan Peran Audit Internal ( $X_2$ ) terhadap Kualitas <i>Good Governance</i> (Y) .....	89
4.3.2.1. Pengaruh Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal ( $X_1$ ) dan Peran Audit Internal ( $X_2$ ) terhadap Kualitas <i>Good Governance</i> (Y) Secara Bersama-sama .....	90
4.3.2.2. Pengaruh Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal ( $X_1$ ) dan Peran Audit Internal ( $X_2$ ) terhadap Kualitas <i>Good Governance</i> (Y) Secara Parsial .....	92
4.4. Pembahasan Hasil Analisis Penelitian.....	95
4.4.1. Hubungan antara Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal dan Peran Audit Internal .....	96
4.4.2. Pengaruh Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas <i>Good Governance</i> .....	96

<b>5. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>101</b>
5.1. Kesimpulan .....	101
5.1.1. Hubungan antara Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal dan Peran Audit Internal.....	101
5.1.2. Pengaruh Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas <i>Good Governance</i> .....	101
5.2. Saran.....	102
5.3. Keterbatasan Penelitian .....	103
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>105</b>



## DAFTAR TABEL

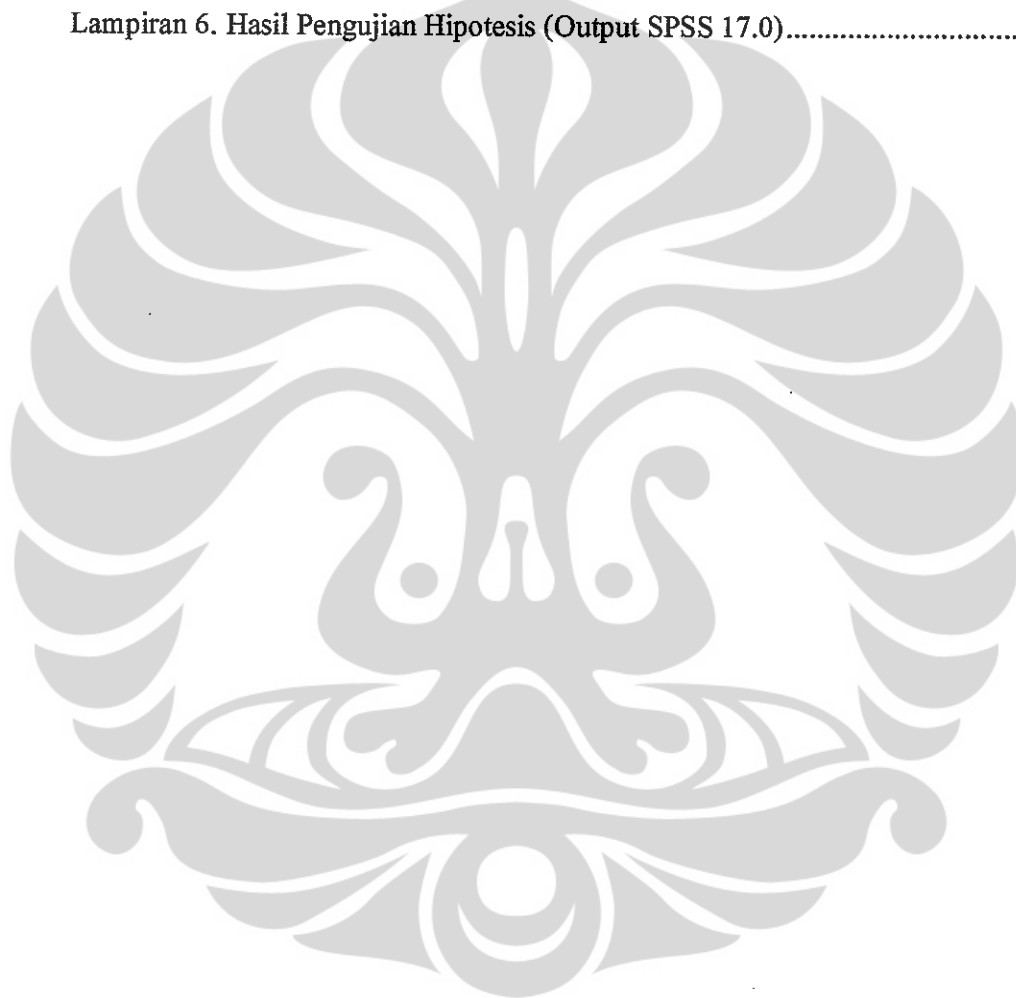
Tabel 2.1. Audit internal: Paradigma Lama vs Paradigma Baru.....	21
Tabel 3.1. Variabel Penelitian.....	52
Tabel 3.2. Kriteria Klasifikasi Derajat Keeratan Dua Variabel .....	65
Tabel 4.1. Karakteristik Responden .....	73
Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Tahap 1 .....	74
Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Tahap 2 .....	75
Tabel 4.4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian .....	75
Tabel 4.5. Frekuensi Tanggapan Responden tentang Independensi.....	77
Tabel 4.6. Frekuensi Tanggapan Responden tentang Kompetensi .....	78
Tabel 4.7. Frekuensi Tanggapan Responden tentang Pelaksanaan Audit .....	79
Tabel 4.8. Frekuensi Tanggapan Responden tentang Pelaksanaan Rekomendasi	80
Tabel 4.9. Frekuensi Tanggapan Responden tentang Audit Kinerja.....	81
Tabel 4.10. Frekuensi Tanggapan Responden tentang Peran Konsultan dan Katalis .....	82
Tabel 4.11. Frekuensi Tanggapan Responden tentang Transparansi .....	83
Tabel 4.12. Frekuensi Tanggapan Responden tentang Akuntabilitas .....	84
Tabel 4.13. Frekuensi Tanggapan Responden tentang Keefisienan dan Keefektifan .....	86
Tabel 4.14. Hasil Uji Normalitas.....	86
Tabel 4.15. Tabel Output SPSS 17.0: <i>Model Summary</i> .....	90
Tabel 4.16. Implementasi <i>e-Government</i> di Departemen Perindustrian.....	100

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peran Auditing dalam Proses Akuntabilitas Publik.....	27
Gambar 2.2. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .....	37
Gambar 4.1. Daerah Penentuan $H_0$ pada Uji Heteroskedastisitas $Lnei^2$ dengan $LnX_1$ .....	87
Gambar 4.2. Daerah Penentuan $H_0$ pada Uji Heteroskedastisitas $Lnei^2$ dengan $LnX_2$ .....	88
Gambar 4.3. Diagram Jalur .....	92
Gambar 4.4. Daerah Penentuan $H_0$ pada Uji Hubungan antara Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal dan Kualitas <i>Good Governance</i> .....	93
Gambar 4.5. Daerah Penentuan $H_0$ pada Uji Hubungan antara Peran Audit Internal dan Kualitas <i>Good Governance</i> .....	95

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner .....	110
Lampiran 2. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian (Output SPSS 17.0).....	124
Lampiran 3. Jawaban Responden.....	130
Lampiran 4. Deskriptif Jawaban Responden .....	140
Lampiran 5. Hasil Pengujian Asumsi Klasik (Output SPSS 17.0).....	152
Lampiran 6. Hasil Pengujian Hipotesis (Output SPSS 17.0).....	157



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul

*Good governance* menjadi suatu isu dan perhatian di sektor publik yang serius dibicarakan akhir-akhir ini. Masyarakat menuntut kesungguhan pemerintah menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa publik dengan mempraktikkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam rangka operasionalisasi perwujudan *good governance* di Indonesia, Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. Kep/49/M.EKON/11/2004 tentang Komite Nasional Kebijakan *Governance* dimana pada pasal 2 menyatakan bahwa Komite Nasional Kebijakan *Governance* bertugas untuk mendorong dan meningkatkan pemahaman dan penerapan *good governance* di Indonesia serta memberikan masukan dan pendapat kepada Pemerintah Republik Indonesia, serta lembaga-lembaga dan badan lainnya mengenai pengembangan kebijakan dan pelaksanaan *good governance* di bidang korporasi maupun di bidang publik. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nasional Kebijakan *Governance* memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi: Mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pelaksanaan *governance* terbaik di dunia.

Misi: Mendorong dan meningkatkan efektivitas penerapan *corporate governance* di Indonesia dalam rangka membangun kultur yang berwawasan *good governance* baik di sektor publik maupun korporasi.



Baik buruknya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di sektor publik memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan sistem pengendalian intern pada instansi atau lembaga-lembaga sektor publik tersebut. Pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh pimpinan organisasi, manajemen dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Adapun tujuan dan konsep dasar sistem pengendalian intern adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern di sektor publik perlu dilakukan dengan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern instansi pemerintah oleh aparat pengawasan intern pemerintah, salah satunya adalah Inspektorat Jenderal. Untuk itu Inspektorat Jenderal perlu memahami konsep dasar peran auditor internal, khususnya dalam rangka meningkatkan efektivitas proses *governance* di lingkungan departemen.

*The Institute of Internal Auditors (IIA)* menyatakan bahwa fungsi auditor internal adalah: *“To provide independent, objective assurance and consulting services designed to add value and improve the organization’s operation by bringing a systematic, discipline approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process”*.

IIA juga secara jelas menyebutkan auditor internal yang efektif memiliki tiga karakteristik yaitu independen, mempunyai staf yang kompeten dan sumber daya yang memadai. Atribut tersebut diakui secara luas oleh profesi Auditor Internal Internasional. Auditor internal diharapkan menjadi mitra independen pendamping manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Porsi peran *watchdog* auditor internal perlahan bergeser menuju komposisi seimbang yang efektif kepada peran

*consultant* dan *catalyst*. Auditor internal pemerintah dituntut untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki kinerja organisasi pemerintah, sekaligus juga untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, sistem pengendalian intern dan proses *governance* dalam mendukung kinerja keuangan dan pembangunan. Agar dapat mengemban fungsi tersebut secara efektif, auditor internal pemerintah perlu senantiasa mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya. Auditor internal pemerintah harus bersinergi dalam rangka meningkatkan komitmen dan integritasnya.

Dari perkembangan tersebut penulis termotivasi untuk menganalisis pengaruh penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal oleh Inspektorat Jenderal terhadap kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian.

## 1.2. Permasalahan Penelitian

Tuntutan masyarakat dewasa ini adalah penyelenggaraan dan penciptaan instansi dan lembaga-lembaga sektor publik yang *good public and corporate governance*. Departemen Perindustrian juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik di sektor industri dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Dengan adanya perubahan pandangan terhadap profesi auditor internal dari paradigma lama yang masih berorientasi pada mencari kesalahan (*watchdog*) menuju paradigma baru yang lebih mengedepankan peran sebagai konsultan dan katalis, penulis melakukan analisis peran Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan *good governance* pada Departemen Perindustrian. Secara lebih spesifik dan lebih rinci dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Seberapa erat hubungan penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal oleh Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian?

- 2) Seberapa besar pengaruh penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal oleh Inspektorat Jenderal terhadap kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian, baik secara parsial maupun bersama-sama?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal oleh Inspektorat Jenderal terhadap kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian. Untuk itu fokus tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris penelitian sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan penelitian mengenai seberapa erat hubungan penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal oleh Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian.
- 2) Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris penelitian sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan penelitian mengenai seberapa besar pengaruh penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal oleh Inspektorat Jenderal terhadap kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian, baik secara parsial maupun bersama-sama.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh berbagai manfaat yang diharapkan berguna bagi semua pihak. Hal terutama yang diharapkan adalah:

- Manfaat bagi penulis:
  - Memberikan gambaran tentang peran dan kontribusi Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan *good governance* pada Departemen Perindustrian.

- Memberikan wawasan yang lebih luas dari penerapan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh dalam perkuliahan.
- Manfaat bagi Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian:
  - Sebagai bahan evaluasi peran dan kinerja Inspektorat Jenderal sebagai Unit Eselon I di Departemen Perindustrian yang bertugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen, serta kontribusinya dalam mewujudkan *good governance* pada Departemen Perindustrian.
  - Saran penelitian pada bab 5 dapat sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

#### 1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah, sehingga ruang lingkup yang diuji menjadi lebih spesifik dan menghasilkan penelitian yang lebih efektif. Yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah:

- Responden penelitian adalah auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian.
- Dari ke-14 prinsip *good governance* di sektor publik yang dibangun oleh Bappenas, fokus penelitian yaitu transparansi, akuntabilitas, serta keefisienan dan keefektifan.
- Analisis dilakukan berdasar studi pustaka dan informasi yang diperoleh dari hasil survai melalui kuesioner.

#### 1.6. Sistematika Penulisan

Sebagai kerangka kerja dalam melakukan pembahasan, maka sistematika penulisan Karya Akhir terdiri dari:

- **BAB 1. PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang pemilihan judul, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta uraian singkat mengenai bab-bab dalam laporan Karya Akhir.

- **BAB 2. LANDASAN TEORI**

Bab ini berkaitan dengan pemaparan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan melalui studi literatur. Teori-teori tersebut digunakan sebagai kerangka konseptual dalam membahas topik penelitian.

- **BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menggambarkan tahapan-tahapan yang ditempuh penulis dan disertai penjelasan untuk masing-masing langkah dalam memecahkan masalah yaitu pengembangan hipotesis, model penelitian, operasionalisasi variabel, pengujian instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data.

- **BAB 4. ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian, terdiri dari profil unit penelitian, analisis instrumen penelitian, analisis deskriptif jawaban responden, serta hasil pengujian hipotesis dan pembahasannya.

- **BAB 5. KESIMPULAN**

Bab ini ditujukan untuk kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil analisis untuk menjawab permasalahan. Selain itu, diberikan juga saran dari penulis mengenai pemecahan masalah.

## BAB 2

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Audit Internal

##### 2.1.1. Pengertian Audit

Audit adalah salah satu fungsi pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terpenting dalam manajemen dan menjadikannya perhatian besar. Karena tanpa ada pengawasan tidak ada yang memastikan apakah rencana yang telah ditetapkan telah sesuai, atau terjadi penyimpangan-penyimpangan lain baik yang disengaja atau tidak. Akibatnya tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Pada dasarnya pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan istilah audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah selaras dengan apa yang telah direncanakan. Pengertian audit menurut *The American Accounting Association* (AAA) dikutip dari Robertson and Louwers (2002:7) sebagai berikut:

*“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between the assertions and established criteria and communicating the result to interested users”.*

Pernyataan tersebut mendefinisikan audit sebagai suatu proses yang sistematis atas perolehan dan pengevaluasian bukti secara obyektif mengenai asersi dan kriteria yang ditetapkan dan dikomunikasikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.

Arens (2006:4) mendefinisikan *auditing* sebagai berikut: *“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by competent, independent person”.*

Dari definisi audit tersebut dapat diketahui bahwa untuk melaksanakan audit diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi informasi tersebut. Informasi memiliki berbagai bentuk, sedangkan kriteria untuk mengevaluasi informasi kuantitatif cukup beragam dan audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Jadi pengertian audit, khususnya untuk lingkup sektor publik, dapat didefinisikan sebagai proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Berdasarkan tujuannya, audit pada umumnya dibagi menjadi tiga golongan yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional.

- 1) Audit laporan keuangan (*financial statement audit*). Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan yang disajikan manajemen untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan standar akuntansi. Hasil audit lalu dibagikan kepada pihak luar perusahaan seperti kreditor, pemegang saham dan kantor pelayanan pajak.
- 2) Audit kepatuhan (*compliance audit*). Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan dan undang-undang tertentu. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Contohnya mungkin bersumber dari manajemen dalam bentuk prosedur-prosedur pengendalian internal. Audit kepatuhan biasanya disebut fungsi audit internal, karena dilaksanakan oleh pegawai perusahaan.

- 3) Audit operasional (*operational audit*). Audit operasional merupakan penelaahan secara sistematis aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, auditor diharapkan melakukan pengamatan yang obyektif dan analisis yang komprehensif terhadap operasional-operasional tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk : (1) menilai kinerja, kinerja dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan, standar-standar dan sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh manajemen; (2) mengidentifikasi peluang; dan (3) memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Pihak-pihak yang mungkin meminta dilakukannya audit operasional adalah manajemen dan pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

#### 2.1.2. Pengertian Audit Internal

Pada dasarnya audit internal merupakan sebuah istilah yang dipakai untuk memeriksa semua fungsi yang berada di dalam suatu organisasi oleh sebuah bagian dalam organisasi itu sendiri yang mempunyai sikap independensi dalam melakukan pemeriksaan tersebut dan untuk melaporkannya pada pimpinan tertinggi organisasi.

Audit internal menurut *The Institute of Internal Auditors* (2004) adalah:

*“Internal audit is an independent, objective assurance and consulting services designed to add value and improve an organization’s operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process”.*

Definisi tersebut dapat diartikan audit internal adalah suatu aktivitas independen (*independent*) dan obyektif (*objective*), yang memberikan jaminan keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah (*to add value*)



serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi dalam usaha mencapai tujuannya (*organizational objectives*) dengan cara memberikan suatu pendekatan disiplin yang sistematis (*a systematic disciplined approach*) untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola.

Dari pengertian tersebut dapat diambil lima konsep pokok yaitu *independence* dan *objectivity*, *assurance* dan *consulting activities*, *added value*, *organizational objectives* dan *a systematic disciplined approach*. Lima konsep tersebut berimplikasi pada peran profesi audit internal di masa mendatang termasuk Indonesia.

Definisi audit internal menurut Sawyer, Dittenhofer dan Scheiner (2005:10) yaitu:

“Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan obyektif yang dilakukan oleh auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah: (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan (organisasi) telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah dipenuhi; (4) kriteria operasi (kegiatan) yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif – semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif”.

Dalam definisi tersebut terkandung sifat dasar, subjek, objek, tujuan dan manfaat dari audit internal.

#### 1) Sifat Dasar Audit

Sifat dasar dari audit adalah penilaian yang sistematis dan obyektif. Penilaian dalam audit dilaksanakan melalui pengujian-pengujian yang dilaksanakan secara sistematis dan obyektif. Sistematis berarti

adanya suatu proses yang terintegrasi mulai dari tahapan, prosedur hingga ke teknik-teknik pengujian untuk mencapai tujuan audit. Selain itu, sistematis juga berarti bahwa audit dilaksanakan dengan urutan dan keteraturan dalam pola pikir, perencanaan, pendokumentasian hingga penarikan kesimpulan.

Selain sistematis, penilaian audit adalah penilaian yang obyektif yang berarti bahwa penilaian yang dihasilkan adalah berdasarkan kondisi yang sebenarnya dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan subjektif atau kepentingan tertentu. Sifat obyektif ini dimulai dari sikap dasar auditor yang harus independen.

## 2) Auditor sebagai Subyek Audit

Subyek audit adalah auditor yaitu orang atau orang-orang atau institusi yang mendapatkan tugas melakukan audit. Auditor haruslah kompeten dan independen. Auditor yang kompeten adalah auditor yang mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan audit menurut hukum dan memiliki keterampilan dan keahlian yang cukup untuk melaksanakan tugas audit. Auditor harus menerapkan kompetensinya dalam pelaksanaan audit dengan menerapkan kecermatan profesional (*due professional care*) yang tinggi untuk menghasilkan audit yang bermutu.

Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Sehubungan dengan itu, auditor baik instansi maupun orang-orangnya dipersyaratkan harus memiliki sikap independen dalam perilakunya. Auditor mempunyai kewajiban untuk menerapkan sikap independen ini dalam keseluruhan proses auditnya. Karena itu auditor harus independen dalam menyusun program audit, verifikasi (pengujian) dan pelaporan.

### 3) Obyek Audit

Obyek audit adalah kegiatan, fungsi dan program dalam organisasi pemerintah, serta informasi kuantitatif yaitu pelaporan keuangan dan operasional.

### 4) Tujuan Audit

Tujuan audit adalah hasil yang hendak dicapai dari suatu audit. Tujuan audit yaitu untuk menentukan apakah:

- a) Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan;
- b) Risiko yang dihadapi organisasi telah diidentifikasi dan diminimalisasi;
- c) Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah dipenuhi;
- d) Kriteria operasi (kegiatan) yang memuaskan telah dipenuhi;
- e) Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan
- f) Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif.

Tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai dalam satu penugasan audit, yang dikenal dengan istilah audit operasional. Dapat juga terjadi, satu penugasan audit hanya mencakup satu atau lebih tujuan-tujuan tersebut.

### 5) Manfaat Audit

Manfaat audit internal adalah membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. Jadi, audit internal akan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang menjadi dasar bagi anggota organisasi untuk menghasilkan kesimpulan dan tindakan korektif sehingga tanggung jawab mereka dapat dijalankan secara efektif.

Pengawasan intern di lingkungan Departemen dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal untuk kepentingan Menteri dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam

kendalinya. Pelaksanaan fungsi Inspektorat Jenderal tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Salah satu kegiatan utama Inspektorat Jenderal adalah pelaksanaan audit internal yang merupakan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

### 2.1.3. Karakteristik Fungsi Audit Internal

Fungsi audit internal adalah institusi dalam suatu organisasi yang memiliki fungsi dan wewenang melaksanakan audit internal, dalam hal ini fungsi audit internal pada Departemen Perindustrian adalah Inspektorat Jenderal.

Menurut IIA dalam *The Role of Auditing in Public Sector Governance* (2006:3):

”Fungsi audit sektor publik yang efektif memperkuat governance dengan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Elemen kunci karakteristik fungsi audit internal pemerintah yang minimum diperlukan adalah independensi organisasi, mandat formal, akses yang tidak terbatas, kecukupan anggaran/dana, kepemimpinan yang kompeten, staf yang kompeten, dukungan *stakeholders*, dan standar audit profesional”.

#### 2.1.4. Independensi

Auditor internal harus independen dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya, dimana auditor internal dalam memberikan penilaian tidak memihak kepada siapapun. Hal ini dapat dicapai bila audit internal diberikan status dan kedudukan yang jelas.

Independensi menjadi salah satu *attribute standard* dalam *International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing* (2009). Standar tersebut menyatakan bahwa aktivitas audit internal harus independen dan auditor internal harus obyektif dalam melaksanakan pekerjaannya. Interpretasi atas independensi tersebut adalah: *Independence is the freedom from conditions that threaten the ability of the internal audit activity or the chief audit executive to carry out internal audit responsibilities in an unbiased manner. To achieve the degree of independence necessary to effectively carry out the responsibilities of the internal audit activity, the chief audit executive has direct and unrestricted access to senior management and the board. This can be achieved through a dual-reporting relationship. Threats to independence must be managed at the individual auditor, engagement, functional, and organizational levels.*

Menurut Hiro Tugiman (2006:16) independensi adalah audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksanya.

- a. Status organisasi: status organisasi dari unit audit internal (bagian pemeriksaan internal) haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi dan menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya.
- b. Obyektivitas: para pemeriksa internal (auditor internal) haruslah melaksanakan tugasnya secara obyektif'.

Independensi memungkinkan auditor internal dapat melakukan pekerjaan secara bebas dan obyektif, juga dapat membuat pertimbangan secara netral dan tidak menyimpang. Independensi dapat dicapai melalui status organisasi dan obyektivitas.

Status organisasi adalah kedudukan formal di dalam organisasi secara keseluruhan. Auditor internal haruslah memperoleh dukungan dari manajemen, sehingga mereka dapat bekerjasama dengan pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain.

Obyektivitas adalah sikap mental yang independen yang harus dikembangkan oleh auditor internal dalam melaksanakan pemeriksaan. Auditor internal tidak boleh menempatkan penilaian sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan secara lebih rendah dibandingkan dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain atau menilai sesuatu berdasarkan hasil penilaian orang lain.

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:8) menyatakan bahwa: "Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi".

#### 2.1.5. Kompetensi Auditor Internal

Selain independensi, kualitas audit juga ditentukan oleh kompetensi auditor internal. *Good quality audits require both competence (expertise) and independence. These qualities have direct effects on actual audit quality, as well as potential interactive effects. In addition, financial statement user's perception of audit quality are a function of their perceptions of both auditor independence and expertise.* (AAA Financial Accounting Standard Committee, 2000).

Pengertian kompetensi menurut Hiro Tugiman (2003:27) sebagai berikut:

"Pemeriksaan audit internal dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap audit internal. Pemimpin audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang

yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas”.

Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:9) menyatakan bahwa: “Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional”.

- Keahlian

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan.

- Kecermatan profesional

Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layak dilakukan oleh seorang auditor internal yang bijaksana dan kompeten, dengan mempertimbangkan ruang lingkup penugasan; kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan; kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses *governance*; biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan; serta penggunaan teknik-teknik audit berbasis komputer dan teknik-teknik analisis lainnya.

- Pengembangan profesional yang berkelanjutan

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensinya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan.

Menurut I Gusti Agung Rai (2008:63) kompetensi auditor adalah:

”Kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit kinerja dengan benar. Terdapat tiga macam kompetensi auditor kinerja yaitu mutu personal, pengetahuan umum dan keahlian khusus, dan untuk memperoleh kompetensi tersebut dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor kinerja yaitu pendidikan profesional berkelanjutan. Selain auditor yang kompeten

keberhasilan audit kinerja juga dipengaruhi oleh manajemen audit kinerja yang memadai”.

#### **2.1.6. Pelaksanaan Audit Internal**

Empat langkah kerja pelaksanaan audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:53-78) yaitu:

- 1) Perencanaan audit, meliputi:
  - a) Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan.
  - b) Memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang akan diaudit.
  - c) Penentuan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan audit.
  - d) Pemeritahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.
  - e) Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pelaksanaan audit.
- 2) Pengujian dan pengevaluasian informasi. Audit internal harus mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Pada tahap ini auditor internal banyak melaksanakan evaluasi bukti-bukti untuk meningkatkan kualitas temuan, dan berkomunikasi dengan auditi untuk meningkatkan obyektifitas temuan dan meningkatkan mutu rekomendasi.
- 3) Penyampaian hasil audit internal. Auditor internal berkewajiban menyediakan informasi yang akurat, obyektif dan tepat waktu (aktual) mengenai persoalan penting serta menyarankan perbaikan. Laporan hasil audit harus didistribusikan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Memantau tindak lanjut atas temuan dan rekomendasinya. Auditor internal harus mengkomunikasikan kepada manajemen auditi bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasinya berada pada pihak auditi. Auditor internal



meninjau untuk memastikan apakah telah dilakukan tindakan yang tepat.

#### **2.1.7. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Audit**

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:26): “Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut secara efektif, atau menanggung risiko karena tidak melakukan tindak lanjut.”

Tindak lanjut merupakan tahap terakhir dari langkah audit internal. Tindak lanjut dimaksudkan agar auditor internal mempunyai keyakinan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan yang dilaporkan pada laporan hasil audit. Auditor internal harus menentukan bahwa manajemen telah melaksanakan tindakan koreksi dan tindakan tersebut menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang diharapkan.

#### **2.2. Peran Auditor Internal**

Auditor internal adalah orang atau badan yang melaksanakan aktivitas audit internal. Auditor internal senantiasa berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks. Dengan demikian pemeriksa internal (auditor internal) harus memahami sifat dan luasnya pelaksanaan kegiatan pada setiap jajaran organisasi, dan juga diarahkan untuk menilai operasi sebagai tujuan utama. Hal ini berarti titik berat pemeriksaan yang diutamakan adalah pemeriksaan manajemen.

Dalam perkembangannya, peran yang dijalankan oleh auditor internal dapat digolongkan dalam tiga jenis sebagai *watchdog*, konsultan dan katalis (Muh. Arief Effendi, 2006).

### 1) *Watchdog*

*Watchdog* adalah peran tertua dari auditor internal. Peran *watchdog* mencakup pekerjaan menginspeksi, observasi, menghitung, cek dan ricek, yang tujuannya adalah memastikan ketaatan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan organisasi. Proses audit yang dilaksanakan adalah *compliance audit*, dengan fokus memeriksa adanya variasi atau penyimpangan dalam sistem pengendalian intern (kesalahan, kealpaan atau kecurangan).

*Compliance audit* mengidentifikasi penyimpangan sehingga dapat dilakukan koreksi terhadap sistem pengendalian intern. Karena pekerjaannya, peran *watchdog* biasanya menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang mempunyai dampak jangka pendek (misalnya perbaikan pengendalian intern).

### 2) Konsultan

Selain sebagai *watchdog*, auditor internal dapat memberikan manfaat lain berupa *advice* dalam pengelolaan sumber daya organisasi yang dapat membantu tugas manajemen. Proses audit yang dilakukan dalam rangka memainkan peran konsultan adalah audit operasional atau *performance audit*. Dengan audit ini, auditor ingin meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Fokus yang menjadi perhatian konsultan adalah sumber daya organisasi (*resources*). Rekomendasi dari peran konsultan ini biasanya bersifat jangka menengah.

### 3) Katalis

Peran katalis menempatkan auditor sebagai fasilitator dan *agents of change*. Katalis adalah agen yang mendorong perubahan tanpa zat tersebut ikut berubah. Dengan peran ini auditor internal mendorong karyawan untuk senantiasa responsif terhadap perkembangan lingkungan, terutama terhadap perubahan keinginan *customer* dan terhadap perkembangan risiko yang dapat menggagalkan tujuan bisnis.

Proses yang berhubungan dengan peran katalis antara lain adalah *quality assurance* dan keterlibatan auditor internal dalam membimbing tim manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi. *Quality assurance* bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses bisnis menghasilkan produk dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Fokus katalis adalah pada *long-term values* dari organisasi.

Bertolak dari pengertian audit internal di atas, dalam perkembangannya penekanan dan mekanisme audit internal telah bergeser. Pada masa lalu fokus utama peran auditor internal adalah sebagai “*watchdog*” dalam perusahaan, sedangkan pada masa kini dan mendatang proses audit internal modern telah bergeser menjadi konsultan intern (*internal consultant*) yang memberi masukan berupa pemikiran-pemikiran untuk perbaikan atas sistem yang telah ada serta berperan sebagai katalis (*catalyst*).

Pada saat ini konsultasi internal merupakan aktivitas yang sangat dibutuhkan oleh manajemen yang perlu dilakukan oleh auditor internal. Peran konsultan membawa auditor internal untuk selalu meningkatkan pengetahuan baik tentang profesi auditor maupun aspek bisnis, sehingga dapat membantu manajemen dalam memecahkan masalah. Selain sebagai konsultan, auditor internal harus mampu berperan sebagai katalisator. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi namun tidak ikut dalam reaksi tersebut. Peran auditor internal sebagai katalisator yaitu memberikan jasa kepada manajemen melalui saran-saran yang bersifat konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan perusahaan, namun tidak ikut dalam aktivitas operasional di perusahaan.

Perbedaan antara paradigma lama dan paradigma baru auditor internal sebagai berikut:

Tabel 2.1. Audit internal: Paradigma Lama vs Paradigma Baru

No	Uraian	Paradigma Lama	Paradigma Baru
1	Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Watchdog</i></li> <li>• Mengungkap temuan</li> <li>• Mengganggu obyek</li> <li>• Reaktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Watchdog</i>, konsultan dan katalisator</li> <li>• Memecahkan masalah</li> <li>• Proaktif</li> </ul>
2	Sifat audit/rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Post audit</i></li> <li>• Korektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Post audit</i> dan <i>Pre audit</i></li> <li>• Korektif, preventif, prediktif</li> </ul>
3	Sikap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaku</li> <li>• Pasif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fleksibel dan konstruktif</li> <li>• Aktif dan komunikatif</li> </ul>
4	Pendekatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subyek-obyek</li> <li>• Menang-kalah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subyek-subyek</li> <li>• Menang-menang</li> </ul>
5	Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelengkap/memenuhi persyaratan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Tools management</i></li> <li>• Pusat keunggulan</li> </ul>
6	Ukuran sukses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah temuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah rekomendasi/manfaat</li> <li>• Pencapaian tingkat <i>good governance</i></li> </ul>

Sumber: Muh. Arief Effendi (2006)

Menurut Hery (2004), berbagai penilaian dan persepsi negatif sering ditujukan terhadap fungsi audit internal. Auditor internal dianggap masih jauh peranannya untuk dapat menjadi seorang konsultan internal. Seringkali usulan perbaikan atau rekomendasi dari audit internal masih dianggap menyulitkan dan merugikan bagi auditi, bahkan terkesan formalitas dan cenderung mengabaikan tingkat kesulitan atau kendala yang dihadapi auditi nantinya atas pelaksanaan rekomendasi dari bagian audit internal tersebut.

Terdapat 2 (dua) hal yang dapat dilakukan oleh auditor internal agar dapat berperan dalam peningkatan kinerja perusahaan, yaitu:

### 1) *Value Added Internal Auditing*

*Value added internal auditing* adalah suatu audit dalam rangka meningkatkan profitabilitas serta kepuasan pelanggan. Auditor internal perlu membangun dan menjaga hubungan baik dengan pihak auditi melalui monitoring tindak lanjut serta menerima umpan balik yang dilakukan oleh auditi. Ruang lingkup *value added internal auditing* meliputi audit atas sistem informasi, audit kepatuhan, audit laporan keuangan dan pengendalian, serta audit program dan kinerja.

### 2) *Risk Based Internal Auditing*

Pola audit yang didasarkan atas pendekatan risiko (*risk based audit approach*) yang dilakukan oleh auditor internal lebih difokuskan terhadap masalah parameter *risk assessment* yang diformulasikan pada *risk based audit plan*. Manfaat yang akan diperoleh auditor internal apabila menggunakan *risk based audit approach*, antara lain auditor internal akan lebih efisien dan efektif dalam melakukan audit sehingga dapat meningkatkan kinerja Fungsi Audit Internal. (Muh. Arief Effendi, 2006).

## 2.3. Audit Kinerja

### 2.3.1. Pengertian Audit Kinerja

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Kegiatan utama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) meliputi audit, revidu, pemantauan, evaluasi, serta kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultasi. Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit yaitu audit atas laporan keuangan, audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.

Beberapa pengertian mengenai audit kinerja adalah sebagai berikut:

1) Menurut Setyawan (1988:19-20): Definisi audit kinerja adalah perencanaan, pengumpulan dan mengevaluasi bukti-bukti yang cukup, relevan, material dan kompeten oleh pemeriksa yang bebas, dengan sasaran untuk:

- Menentukan apakah manajemen atau para karyawan suatu entitas/unit usaha telah atau belum menerima dan melaksanakan;
- Prinsip-prinsip akuntansi, kebijaksanaan-kebijaksanaan manajemen atau norma-norma operasional dengan tepat; dan
- Untuk mencapai penggunaan sumber-sumber secara ekonomis, efisien dan efektif.

Untuk kemudian dari bukti-bukti atas sasaran pemeriksaan tersebut, pemeriksa menarik kesimpulan, merumuskan saran-saran perbaikan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak ketiga.

2) Audit kinerja adalah suatu audit yang obyektif dan sistematis terhadap bukti-bukti untuk dapat melaksanakan penilaian secara independen atas kinerja suatu organisasi. Audit kinerja bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengaudit dan mendorong pencapaian tujuan secara efektif, efisien dan ekonomis; memperbaiki dan meningkatkan kinerja; serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab (Deputi Bidang Akuntan Negara, 2001:2).

3) Menurut R.M. Malan, Fountain Jr, D.S. Arrowsmith, dan H.R.L. Lockridge, (1984): Audit kinerja adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif atas kinerja

suatu organisasi, program, fungsi, atau aktivitas/kegiatan. Evaluasi dilakukan terhadap tingkat ekonomi, efisiensi dan keefektifan dalam mencapai target yang ditetapkan serta kepatuhannya terhadap kebijakan dan peraturan perundangan yang disyaratkan, kemudian membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian audit kinerja yang dimaksud dalam Karya Akhir ini adalah audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Tujuan audit kinerja untuk membantu manajemen auditi dalam mendorong pencapaian tujuan secara ekonomis, efisien dan efektif; memperbaiki dan meningkatkan kinerja; serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab. Audit kinerja mencakup penilaian atas penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) oleh manajemen dan penetapan *Key Performance Indicator* (KPI). (Deputi Bidang Akuntan Negara, 2001:3).

### 2.3.2. Urgensi Audit Kinerja

Menurut Mahmudi (2005) setidaknya ada 3 (tiga) hal yang membuat audit kinerja begitu penting untuk dilakukan, yaitu :

#### 1) Untuk melengkapi audit keuangan dan kepatuhan

Dalam organisasi publik, anggaran menjadi indikator utama penilaian kinerja. Namun sering terjadi organisasi hanya terfokus pada anggaran dan mengabaikan hasil (*outcome*) dari anggaran tersebut. Kinerja diukur hanya sebatas habis tidaknya anggaran dibelanjakan, terpenuhi atau tidaknya target anggaran, dan sebagainya. Yang lebih penting dari itu adalah apakah anggaran telah

mencapai hasil yang diharapkan, apakah anggaran telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Terlalu terfokus pada anggaran saja dapat menyebabkan gambaran kinerja yang dihasilkan menjadi tidak komprehensif. Oleh karena itu, selain audit keuangan diperlukan audit kinerja yang difokuskan pada pemeriksaan hasil kerja untuk menguji tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas suatu program, kegiatan, fungsi atau organisasi dalam menggunakan sumberdaya (anggaran, personil, dan infrastruktur).

## 2) Mempunyai nilai manfaat

Secara spesifik, manfaat dilakukannya audit kinerja bagi organisasi sektor publik adalah :

- Meningkatkan pendapatan. Hal ini karena kebocoran, penggelapan dan ketidakefektifan dalam sisi pendapatan bisa diketahui dan diperbaiki;
- Mengurangi biaya atau belanja. Melalui audit kinerja sumber penyebab kebocoran dan pemborosan organisasi bisa diidentifikasi sehingga melalui efisiensi organisasi dapat melakukan penghematan biaya;
- Memperbaiki efisiensi dan produktivitas. Hal ini juga berarti memperbaiki proses;
- Memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan; dan
- Meningkatkan kesadaran manajemen sektor publik terhadap perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumberdaya publik.

## 3) Akuntabilitas publik

Audit kinerja sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas publik dan memperbaiki kinerja organisasi. Tanggung jawab pengelolaan program, kegiatan, fungsi atau organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif manajemen atau eksekutif. Selanjutnya manajemen, dalam hal ini pemerintah, bertanggung jawab untuk memberikan



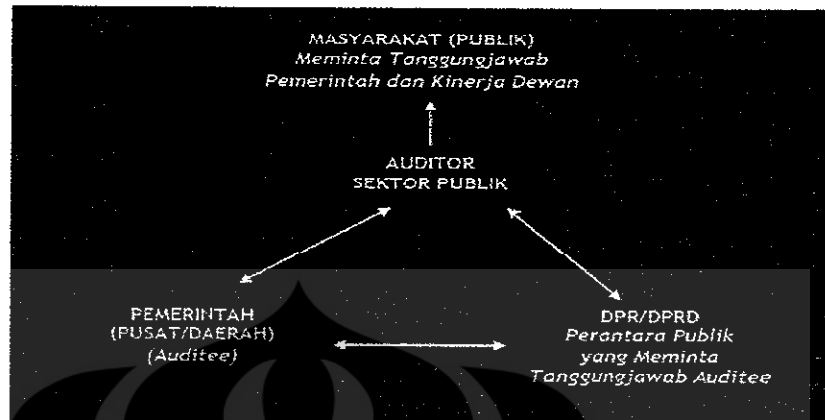
laporan kinerja atas pelaksanaan program, kegiatan, fungsi atau organisasi kepada publik.

Dalam rangka meminimalkan dan mengantisipasi timbulnya pemerintahan yang menyimpang dan tidak akuntabel, maka diperlukan sistem akuntabilitas publik yang baik (*process of accountability*). Untuk menciptakan proses akuntabilitas yang baik diperlukan saluran pertanggungjawaban yang tersistem dengan baik sehingga mampu mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi. Salah satu fungsi yang harus ada dalam proses akuntabilitas publik tersebut adalah fungsi pemeriksaan atau pengauditan yang dilakukan oleh pihak atau lembaga auditor.

Pola hubungan pertanggungjawaban publik dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut terlihat jelas bahwa ada 4 pihak yang terlibat dalam proses akuntabilitas pemerintah, yaitu:

- a) Pihak pertama adalah pemerintah, yang dalam hal ini berperan sebagai pihak yang diaudit (*auditee*).
- b) Pihak kedua adalah DPR/DPRD sebagai perantara publik (*public intermediary*) yang berkepentingan untuk meminta pertanggungjawaban pihak I (*auditee*).
- c) Pihak ketiga adalah publik atau masyarakat yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban pihak I (pemerintah) dan pihak II (DPR/DPRD).
- d) Pihak keempat adalah auditor yang memegang fungsi auditing dan fungsi attestasi.

Gambar 2.1. Peran Auditing dalam Proses Akuntabilitas Publik



Sumber: Naskah Akademis Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah

Tujuan memperkuat audit kinerja (*Value For Money Audit*) adalah meningkatkan akuntabilitas sektor publik. Audit kinerja merupakan suatu bentuk evaluasi pertanggungjawaban kinerja sebagai sarana untuk memastikan bahwa *value for money* benar-benar telah diaplikasikan. Dengan demikian, akuntansi sektor publik, yang diartikulasikan melalui akuntansi manajemen, akuntansi keuangan dan auditing sektor publik sudah sangat mendesak pengembangan dan pengaplikasiannya sebagai alat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam mencapai *good governance*. (Mardiasmo, 2006).

### 2.3.3. Tipologi Audit Kinerja

Secara tipologis ada beberapa jenis audit kinerja dalam literatur audit sektor publik. Audit kinerja terdiri atas 2 jenis, yaitu :

#### 1) Audit ekonomi dan efisiensi

Audit ekonomi dan efisiensi dilakukan untuk menentukan 3 hal, yaitu :

- Suatu entitas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumberdaya secara ekonomis dan efisien;
- Untuk mengetahui penyebab timbulnya inefisiensi atau pemborosan yang terjadi, termasuk ketidakcukupan sistem

Universitas Indonesia

informasi manajemen, prosedur administratif atau struktur organisasi; dan

- Untuk mengidentifikasi apakah suatu entitas telah mematuhi peraturan yang terkait dengan pelaksanaan praktek ekonomi dan efisiensi.

Pengkajian mengenai sistem manajemen kinerja dan evaluasi terhadap ekonomi dan efisiensi suatu program, aktivitas, fungsi atau organisasi dilakukan untuk menentukan apakah :

- Sumberdaya yang digunakan sudah mencukupi untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan yang sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh otoritas yang berwenang, misalnya legislatif;
- Sistem manajemen kinerja telah memberikan pengendalian atas biaya yang memadai; dan
- Biaya program atau kegiatan sudah wajar (rasional) relatif terhadap hasil yang dicapai.

Sedangkan menurut *The General Accounting Office Standards* (1994) audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas atau organisasi publik yang diaudit :

- Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat;
- Melakukan pengadaan sumberdaya sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah;
- Melindungi dan memelihara semua sumberdaya yang ada secara memadai;
- Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya;
- Menghindari adanya pengangguran sumberdaya atau jumlah pegawai yang berlebihan;
- Menggunakan prosedur kerja yang berlebihan;

- Menggunakan sumberdaya yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat;
- Mematuhi peraturan perundangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumberdaya negara; serta
- Melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi.

## 2) Audit program atau audit efektivitas

Efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit ini bertujuan untuk menentukan setidaknya 3 (tiga) hal, yaitu :

- Tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan;
- Kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya; dan
- Apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil sama dengan biaya yang paling rendah.

Pengkajian mengenai sistem manajemen kinerja dan evaluasi terhadap efektivitas suatu program, aktivitas, fungsi atau organisasi dilakukan untuk menentukan apakah :

- Tujuan dan sasaran telah sesuai dengan misi dan visi organisasi;
- Struktur tujuan dan sasaran sudah logis;
- Sistem manajemen kinerja telah memberikan kapasitas untuk pengendalian yang memadai atas hasil program;
- Entitas telah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara efektif; serta
- Hasil dari kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.

#### 2.3.4. Pengertian Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas

Audit kinerja terkait dengan konsep ekonomis, efisiensi dan efektivitas sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini akan dijelaskan konsep masing-masing dan keterkaitan antar konsep tersebut. Menurut Sheldon (1996:5) Ekonomis merujuk pada penggunaan sumber daya, apakah sumber daya itu berwujud, seperti aktiva tetap atau aktiva lancar, atau sumber daya yang tidak berwujud, yang tidak tercatat pada laporan keuangan, seperti sumber daya manusia di dalam organisasi. Ekonomis dicapai dengan mendapatkan sumber daya tersebut pada biaya yang serendah mungkin. Efisiensi dalam konteks audit kinerja merujuk pada usaha penggunaan sumber daya yang terbatas sebaik mungkin untuk melakukan tugas atau pekerjaan. Efektivitas merujuk pada tercapainya tujuan manajemen.

Secara lebih ringkas, masing-masing hal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Ekonomis (terkait dengan biaya operasi) adalah bagaimana organisasi melaksanakan tanggung jawabnya pada posisi yang paling hemat dari sumber dayanya.
- Efisiensi (terkait dengan metode operasi) adalah bagaimana organisasi memenuhi tanggung jawabnya dengan usaha yang minimum.
- Efektivitas (terkait dengan hasil operasi) adalah bagaimana organisasi mencapai hasil atau manfaat berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan atau pada kriteria yang terukur.

Hubungan antara ekonomis, efisiensi dan pengaruhnya pada hasil operasi adalah bahwa terdapat usaha untuk menyeimbangkan di antara ketiganya. Pada kondisi yang seimbang, biaya operasi akan dikelola pada tingkat yang paling rendah tanpa mengorbankan efisiensi dan efektivitasnya (Reider, 2002:23).

### 2.3.5. Standar Audit Kinerja

Dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan intern yang berkualitas diperlukan suatu ukuran mutu yang sesuai dengan mandat audit masing-masing Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Standar audit yang menjadi kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP adalah Standar Audit APIP yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008. Ruang lingkup kegiatan audit yang diatur dalam Standar Audit ini meliputi audit kinerja dan investigatif, sedangkan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberi opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Standar audit kinerja terdiri atas standar pelaksanaan, standar pelaporan dan standar tindak lanjut.

#### 1) Standar Pelaksanaan Audit Kinerja

Standar pelaksanaan pekerjaan audit kinerja mendeskripsikan sifat kegiatan audit kinerja dan menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengelola pekerjaan audit kinerja yang dilakukan oleh auditor. Standar pelaksanaan audit kinerja mengatur tentang:

##### a) Perencanaan

- Penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya
- Pertimbangan dalam perencanaan
- Evaluasi terhadap sistem pengendalian intern
- Evaluasi atas ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (*abuse*)

##### b) Supervisi

##### c) Pengumpulan dan Pengujian Bukti

- Pengumpulan Bukti
- Pengujian bukti

d) Pengembangan Temuan

e) Dokumentasi

Sasaran untuk penugasan audit kinerja adalah untuk menilai bahwa auditi telah menjalankan kegiatannya secara ekonomis, efisien dan efektif. Di samping itu, sasaran audit kinerja juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (*abuse*).

Agar sasaran audit tercapai, maka auditor harus menetapkan ruang lingkup penugasan yang memadai. Ruang lingkup audit kinerja meliputi aspek keuangan dan operasional auditi. Oleh karena itu, auditor akan memeriksa semua buku, catatan, laporan, aset maupun personalia untuk memeriksa kinerja auditi pada periode yang diperiksa. Dalam merencanakan pekerjaan audit kinerja, auditor harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (*abuse*).

Auditor harus mengembangkan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan audit kinerja. Temuan dalam sebuah audit kinerja berupa ketidakekonomisan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan pengelolaan organisasi, program, aktivitas atau fungsi yang diaudit. Di samping itu, temuan juga berupa kurang memadainya sistem pengendalian intern, adanya ketidakpatuhan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatutan (*abuse*).

2) Standar Pelaporan Audit Kinerja

Standar pelaporan merupakan acuan bagi penyusunan laporan hasil audit yang merupakan tahap akhir kegiatan audit kinerja, untuk mengkomunikasikan hasil audit kinerja kepada auditi dan pihak lain yang terkait. Standar pelaporan mencakup:

- a) Kewajiban Membuat Laporan
- b) Cara dan Saat Pelaporan

- c) Bentuk dan Isi Laporan
- d) Kualitas Laporan
- e) Tanggapan Auditi
- f) Penerbitan dan Distribusi Laporan

Auditor harus membuat laporan hasil audit kinerja sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai segera setelah selesai melakukan auditnya. Laporan hasil audit kinerja harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas dan ringkas mungkin. Laporan hasil audit kinerja diserahkan kepada pimpinan organisasi, auditi dan pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) Standar Tindak Lanjut Audit Kinerja

Standar tindak lanjut mengatur tentang ketentuan dalam hal kepastian saran dan rekomendasi telah dilakukan oleh auditi.

Standar tindak lanjut mencakup:

- a) Komunikasi Dengan Auditi
- b) Prosedur Pemantauan
- c) Status Temuan
- d) Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kecurangan

Auditor harus mengkomunikasikan kepada auditi bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit kinerja dan rekomendasi berada pada auditi. Auditor harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas temuan beserta rekomendasi. Terhadap temuan yang berindikasi adanya tindakan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kecurangan, auditor harus membantu aparat penegak hukum terkait dalam upaya penindaklanjutan temuan tersebut.



## 2.4. *Good Governance*

### 2.4.1. *Pengertian Good Governance*

*Good governance* tengah menjadi agenda besar dan penting bagi masyarakat internasional pada awal milenium ketiga ini. Sebagai bagian dari masyarakat internasional yang tidak dapat lepas dari pergaulan internasional, Indonesia juga harus menerapkan *good governance*. Seiring dengan perubahan politik, *good governance* menjadi salah satu agenda reformasi yang harus segera diwujudkan.

Dalam era globalisasi terdapat pergeseran paradigma dari “*Government* ke *Governance*”. *Governance* tidak sama dengan *government* (pemerintah) dalam arti sebagai lembaga, tetapi *governance* adalah proses pemerintahan dalam arti yang luas. John Pierre dan Guy Peters, misalnya, memahami *governance* sebagai sebuah konsep yang berada dalam konteks hubungan antara sistem politik dengan lingkungannya, dan mungkin melengkapi sebuah proyek yang membuat ilmu politik mempunyai relevansi dengan kebijakan publik. Berpikir mengenai *governance*, berpikir mengenai bagaimana semua pihak mencapai tujuan-tujuan bersama.

Menurut Adi Suyatno (2004), ada beberapa pengertian *good governance* dalam institusi pemerintahan yang didasari dari *definition terms* kata *governance*, yaitu : (i) *The exercise of Political Power to manage a nation's affairs* atau Pelaksanaan Kekuasaan Politik untuk mengelola masalah-masalah suatu Negara (World Bank, 1997); (ii) *The exercise of economic, political and administrative authority to manage a country's affairs at all levels and means by which state promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population* atau pelaksanaan kewenangan/ kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administrasi dalam mengelola berbagai urusan negara guna mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dan kohesivitas sosial dan kemasyarakatan (UNDP, 1997).

Model *governance* bisa buruk bisa juga baik. Model yang baik kemudian disebut dengan istilah *good governance*. Ada beberapa pengertian *good governance* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menurut Bhenyamin Hoessein (2000), *good governance* menunjuk pada proses pengelolaan yang luas dalam bidang ekonomi, sosial dan politik suatu negara dan pendayagunaan sumber-sumber alam, keuangan, manusia menurut kepentingan semua pihak dan dalam cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
- 2) Pendapat Pinto (1994), istilah *governance* mengandung arti praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh Pemerintah dalam mengelola urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi khususnya.
- 3) OECD dan World Bank mensinonimkan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi, menghindari korupsi/KKN baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan *legal and plotical framework* bagi tumbuhnya wiraswasta.
- 4) Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) tentang definisi *good governance* adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab, serta visi strategik.
- 5) Menurut AKIP (LAN & BPKP, 2000) bahwa proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan *public good and seviles* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *good governance* (pemerintahan yang baik). Dituntut dalam pelaksanaan yaitu

koordinasi (*alignment*) yang baik dan integrasi, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Berdasarkan uraian mengenai *good governance* tersebut, dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa *good governance* adalah tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur utama yaitu negara (*state*), sektor swasta (*private sector*) dan lembaga masyarakat (*civil society organization*). Idealnya, hubungan antar ketiga komponen (negara, sektor swasta dan masyarakat) di atas harus dalam posisi seimbang, sinergis dan saling mengawasi atau *checks and balances*. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya penguasaan atau “eksploitasi” oleh satu komponen tertentu terhadap komponen lainnya.

Negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif; sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan; sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik.

Perhatian yang semakin terpusat kepada penciptaan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bercirikan *good governance* merupakan suatu keharusan. Hal ini pada akhirnya akan menempatkan peranan pemerintah lebih bertindak sebagai katalis yang menjalankan fungsi mengarahkan daripada melaksanakan sendiri berbagai tugas pelayanan umum.

Adapun manfaat *good governance* seperti yang dikemukakan oleh Dadang Solihin (2007) adalah:

- 1) Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.
- 2) Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
- 3) Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat.

- 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
- 5) Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di pusat maupun daerah.

Bappenas mencatat empat belas prinsip *good governance*, dalam membangun Pemerintahan yang Baik (*Good Public Governance*) yaitu:

Gambar 2.2. Prinsip-prinsip *Good Governance*

1) Wawasan ke depan ( <i>visionary</i> )	8) Daya tanggap ( <i>responsiveness</i> )
2) Tanggung gugat ( <i>accountability</i> )	9) Keefisienan dan keefektifan ( <i>efficiency and effectiveness</i> )
3) Partisipasi masyarakat ( <i>community participation</i> )	10) Desentralisasi ( <i>decentralization</i> )
4) Keterbukaan dan transparansi ( <i>openness and transparency</i> )	11) Kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat ( <i>private and civil society partnership</i> )
5) Supremasi hukum ( <i>rule of law</i> )	12) Komitmen pada pengurangan kesenjangan ( <i>commitment to reduce inequality</i> )
6) Demokrasi ( <i>democracy</i> )	13) Komitmen pada lingkungan hidup ( <i>commitment to environmental protection</i> )
7) Profesionalisme dan kompetensi ( <i>professionalism and competency</i> )	14) Komitmen pada pasar yang <i>fair</i> ( <i>commitment to fair market</i> )

Dari keempat belas prinsip di atas, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh audit sektor publik, khususnya audit internal, yaitu penciptaan akuntabilitas publik, transparansi, serta keefisienan dan keefektifan.

### 2.4.2. Prinsip Transparansi

Menurut Bappenas, keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) adalah bersifat terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan di setiap tahap pengambilan keputusan dapat ditengarai dengan derajat aksesibilitas publik terhadap informasi terkait dengan suatu kebijakan publik. Setiap kebijakan publik termasuk kebijakan alokasi anggaran, pelaksanaannya maupun hasil-hasilnya mutlak harus diinformasikan kepada publik atau dapat diakses oleh publik selengkap-lengkapinya melalui berbagai media dan forum untuk mendapat respon.

Menurut Kashi Nisjar (1997) transparansi adalah dapat diketahuinya oleh banyak pihak mengenai perumusan kebijaksanaan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Dengan kata lain, segala tindakan dan kebijaksanaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus selalu dilaksanakan secara terbuka diketahui oleh umum.

UNDP mengidentifikasi transparansi sebagai salah satu dari 9 (sembilan) prinsip *good governance* (Mardiasmo, 2004) yang mengandung pengertian yaitu: "Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor".

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang, dan keputusan pemerintah. Indikatornya adalah:

1. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. Data tersebut harus bebas didapat dan siap tersedia.
2. Aturan dan prosedur yang "*simple, straightforward and easy to apply*" untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi." (Asian Development Bank, 1999).

Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya (IMF, 1998 dalam Schiavo-Campo and Tomasi, 1999).

Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

#### 2.4.3. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas sangat penting bagi organisasi yang dibiayai atau mempunyai ketergantungan dengan publik. Lembaga atau organisasi ini dinamakan lembaga sektor publik. Akuntabilitas publik merupakan suatu proses melaporkan aktivitas usaha organisasi atau lembaga kepada publik, karena publik merupakan *stakeholders* utama. Akuntabilitas ini menjadi syarat utama dalam *good governance*.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003).

Menurut Bappenas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut di semua tahap mulai dari penyusunan program kegiatan dalam rangka pelayanan publik, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasinya, maupun hasil dan dampaknya. Akuntabilitas juga dituntut dalam hubungannya dengan masyarakat/publik, dengan instansi atau aparat di bawahnya maupun dengan instansi atau aparat di atas. Secara substansi, penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada sistem dan prosedur tertentu, memenuhi ketentuan perundangan, dapat diterima secara politis, berdasarkan pada metode dan teknik tertentu maupun

nilai-nilai etika tertentu, serta dapat menerima konsekuensi bila keputusan yang diambil tidak tepat.

Menurut Kashi Nisjar (1997) akuntabilitas adalah tanggung gugat dari pengurusan, penyelenggaraan dari *governance* yang dilakukan. Lebih jauh diartikan sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkan.

Menurut UNDP bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

#### **2.4.4. Prinsip Keefisienan dan Keefektifan**

Upaya untuk menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif merupakan salah satu respon atas tuntutan akuntabilitas. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan perlu secara terus menerus ditingkatkan dan dioptimalkan melalui pemanfaatan sumberdaya dan organisasi yang efektif dan efisien, termasuk upaya-upaya berkoordinasi untuk menciptakan sinergi dengan berbagai pihak dan organisasi lain.

UNDP menjelaskan prinsip efisiensi dan efektivitas (*effectiveness and efficiency*) sebagai proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.

#### **2.4.5. Hubungan Audit Internal dengan *Good Governance***

Peran auditor internal dalam penerapan *good governance* sangatlah penting. Dalam *good governance* dimana transparansi dan akuntabilitas menjadi unsur utama, maka fungsi pengawasan (*control*) menjadi faktor kunci keberhasilan kedua unsur tersebut. Auditor internal sebagai '*man behind the gun*' pengawasan menentukan keberhasilan

penerapan *good governance*. Menurut Adji Suratman (Ketua Divisi Hubungan Luar IAI) belum diterapkannya *good governance* di Indonesia disebabkan oleh lemahnya pengawasan, disamping kurangnya sosialisasi. Pengawasan yang lemah ini disebabkan belum berfungsinya Sistem Pengawasan Intern (SPI) karena terganggunya obyektivitas dan independensi SPI itu sendiri.

Namun demikian, peran penting tersebut di Indonesia sampai saat ini belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh kelemahan auditor internal itu sendiri, baik lemah secara kelembagaan maupun SDM. Dari sisi kelembagaan, independensi auditor internal terganggu karena posisinya. Di sisi lain, masih banyak SDM auditor internal yang belum mengetahui banyak mengenai seluk-beluk *good governance*. Oleh karena itu seiring dengan dimulainya penerapan *good governance*, auditor internal harus menyiapkan diri secara kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

*Good governance* akan tercapai jika lembaga/institusi pemeriksa berfungsi dan tertata dengan baik. Setelah itu, pengembangan pengauditan perlu dilakukan. Salah satunya dengan memperluas cakupan audit, tidak hanya audit keuangan (*financial audit*) tetapi juga *Value For Money audit* atau sering disebut audit kinerja. Tujuan memperkuat pelaksanaan audit kinerja adalah meningkatkan akuntabilitas sektor publik. Dengan demikian, auditing sektor publik khususnya audit internal, sudah sangat mendesak pengembangan dan pengaplikasiannya sebagai alat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam mencapai *good governance*.

## 2.5. Penelitian-penelitian Sebelumnya

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang membahas hal-hal yang relevan dengan penelitian ini.



Hiro Tugiman (2000) meneliti pengaruh peran auditor internal dan faktor-faktor pendukungnya terhadap peningkatan pengendalian intern dan kinerja perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 102 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia. Dengan menggunakan teknik analisis jalur, dihasilkan kesimpulan bahwa:

- 1) Pengaruh manajer puncak dan manajer produksi terhadap kualitas jasa auditor internal cukup signifikan, namun pengaruh manajer keuangan terhadap kualitas jasa auditor internal tidak signifikan.
- 2) Pengaruh manajer puncak, manajer produksi, manajer keuangan dan kualitas jasa auditor internal terhadap pengendalian intern perusahaan sangat kecil dan tidak signifikan.
- 3) Pengaruh manajer puncak, manajer produksi, manajer keuangan, auditor internal dan pengendalian intern yang efektif terhadap kinerja perusahaan cukup signifikan. Pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja perusahaan paling besar bila dibandingkan dengan pengaruh manajer puncak, manajer produksi, manajer keuangan dan auditor internal.
- 4) Hubungan antara manajer puncak, manajer produksi dan manajer keuangan cukup nyata.

Philomena Leung (2003) meneliti peran audit internal dalam *corporate governance* di Australia dengan tujuan memberikan masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas audit internal dalam *corporate governance* dan manajemen. Penelitian dilakukan dengan mengirimkan survey online kepada 397 orang dan dikumpulkan respon sebanyak 85 buah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) Profesi audit internal di Australia sangat meningkat.
- 2) Fungsi audit internal lebih fokus pada pengendalian internal dan risiko.
- 3) Budaya organisasi mempengaruhi sikap dan memungkinkan audit internal dapat berfungsi secara efektif.

- 4) Struktur *governance* yang semakin kompleks, perubahan atas kebutuhan peraturan, dan ekspektasi manajemen yang tinggi terhadap *governance* membuat lingkungan yang kompetitif bagi auditor internal.

The Institute of Internal Auditors (2006) menyajikan pedoman tentang pentingnya aktivitas audit sektor publik terhadap *governance* yang efektif dan mendefinisikan elemen-elemen kunci yang diperlukan untuk memaksimalkan nilai audit sektor publik bagi semua tingkat pemerintahan. Kesimpulan yang diperoleh adalah audit sektor publik menjadi kunci bagi *good public governance*. Meskipun auditor internal dapat memberikan nilai tambah pada setiap segmen dalam organisasi secara independen serta keyakinan yang memadai dan obyektif, setiap pemerintahan memerlukan beberapa bentuk aktivitas audit yang obyektif yang memiliki kewenangan mengevaluasi aktivitas pemerintah dengan cakupan yang cukup luas. Audit sektor publik memperkuat *public governance* dengan memberikan akuntabilitas dan melindungi nilai inti dari pemerintah – memastikan pejabat pemerintahan melakukan kegiatan publik secara transparan, wajar dan jujur, serta dengan keadilan dan ketulusan.

Exitas Salmon (2006) meneliti fungsi audit internal dalam mewujudkan *good corporate governance*, studi kasus pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. Variabel penelitian yang digunakan adalah:

- 1) Fungsi audit internal, dengan indikatornya: independensi, kompetensi, program audit internal, pelaksanaan audit internal, laporan yang dihasilkan, dan tindak lanjut atas laporan yang dihasilkan.
- 2) Pelaksanaan *good corporate governance*, dengan indikatornya: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kemandirian.
- 3) Fungsi audit internal dalam mewujudkan *good corporate governance*, dengan indikatornya: *compliance audit* dan *internal business consulting*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) Unit Audit Internal PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dinilai sangat memadai.
- 2) Perwujudan *good corporate governance* pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sangat terwujud.
- 3) Audit internal pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sangat berfungsi dalam mewujudkan *good corporate governance*.

Zelege Belay (2007) melakukan penelitian tentang implementasi fungsi Satuan Audit Internal yang efektif dalam mempromosikan *good governance* pada sektor publik di Ethiopia. Dengan menggunakan responden 40 auditor internal pada 4 BUMN (ETC, CBE, EIC dan EAL), dikumpulkan respon sejumlah 28, dimana 25 dapat digunakan sedangkan 3 respon dari EAL dikecualikan dari penelitian karena hanya 3 orang auditor internal senior yang melengkapi kuesioner dan dinilai tidak dapat mewakili penilaian auditor lainnya secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) Fungsi audit internal yang ada pada sektor publik sangat lemah dan kurang memuaskan dalam menilai keefektifan struktur *governance* pemerintah.
- 2) Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat bagi fungsi Satuan Audit Internal untuk dapat meningkatkan sistem *good governance* diperlukan sistem pengendali manajemen yang handal yang dapat mencegah dan mendeteksi sebelum timbulnya kejadian inefisiensi dan malpraktek.

Suryo Pratolo (2007) meneliti pengaruh peran audit manajemen, komitmen organisasional manajer dan pengendalian intern terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan kinerja perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 59 perusahaan BUMN berbadan hukum PT atau Persero dan Perum di Indonesia. Dengan menggunakan teknik analisis jalur, dihasilkan kesimpulan bahwa:

- 1) Terdapat hubungan antara audit manajemen, komitmen manajer pada organisasi dan pengendalian intern pada BUMN di Indonesia. Ketiga variabel tersebut saling berhubungan dalam pengaruhnya pada penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan kinerja perusahaan.
- 2) Tidak terdapat pengaruh secara langsung audit manajemen dan komitmen manajer pada organisasi terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Sedangkan pengendalian intern mempunyai pengaruh langsung pada penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*.
- 3) Audit manajemen, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan pengendalian intern memiliki pengaruh langsung pada kinerja perusahaan baik secara parsial maupun secara simultan.

Angga Nugraha Sunjaya (2008) meneliti pengaruh audit internal terhadap peningkatan *good corporate governance*, studi kasus pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Variabel penelitian yang digunakan adalah:

- 1) Audit internal, dengan indikatornya: memastikan, menilai, merekomendasi dan *internal business consultant*.
- 2) *Good corporate governance*, dengan indikatornya: transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) Pelaksanaan audit internal terhadap peningkatan *good corporate governance* yang dilakukan auditor internal cukup memadai.
- 2) Pelaksanaan *good corporate governance* dinilai terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari adanya penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*.
- 3) Audit internal mempunyai pengaruh kuat terhadap peningkatan *good corporate governance*.

## 2.6. Premis

Berdasarkan beberapa pendapat/kajian/penelitian sebelumnya maka beberapa premis dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Penerapan karakteristik fungsi audit internal berfungsi dalam mendukung *good governance* pada sektor publik.

(Philomena Leung, 2003; The Institute of Internal Auditors, 2006; Zeleke Belay, 2007)

2. Peran audit internal, khususnya paradigma peran audit internal yang baru, memberikan nilai tambah bagi organisasi dan sangat berfungsi dalam mewujudkan *good governance*.

(Muh. Arief Effendi, 2006; Exitas Salmon, 2006; Angga Nugraha Sunjaya, 2008)

3. Audit kinerja sebagai bentuk pelayanan yang dilakukan oleh audit internal mendorong organisasi untuk mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas dari manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola organisasi.

(Albrecht, et.al, 1992; Hiro Tugiman, 2000; Sawyer, et.al, 2003; Mardiasmo, 2006; Suryo Pratolo, 2007)

## 2.7. Research Gap

Penelitian sebelumnya yang dominan melandasi penelitian ini adalah penelitian oleh Zeleke Belay (2007) dan Suryo Pratolo (2007).

Penelitian Zeleke Belay (2007) dengan judul *A Study on Effective Implementation of Internal Audit Function to Promote Good Governance in the Public Sector* bertujuan untuk menilai sejauhmana pengaruh karakteristik Fungsi Audit Internal dalam mempromosikan *good governance* pada sektor publik di Ethiopia. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah:

1. Independensi organisasi
2. Manajemen Sumber Daya Manusia Fungsi Audit Internal

3. Lingkup fungsi audit internal
4. Akses terhadap bukti-bukti audit
5. Ketersediaan sumberdaya
6. Kepemimpinan Fungsi Audit Internal
7. Keberadaan Komite Audit
8. Dukungan *stakeholders*
9. Keberadaan Standar Audit profesional
10. Pelaksanaan rekomendasi

Suryo Pratolo (2007) dalam Disertasinya yang berjudul “Pengaruh Audit Manajemen, Komitmen Organisasional Manajer dan Pengendalian Intern terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dan Kinerja Perusahaan” menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu audit manajemen, komitmen organisasional manajer dan pengendalian intern, serta 2 (dua) variabel terikat yaitu penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate* dan kinerja perusahaan BUMN. Berikut variabel-variabel dan dimensi yang digunakan:

1. Variabel : Audit Manajemen  
Dimensi : a) Evaluasi ekonomisasi  
b) Evaluasi efisiensi  
c) Evaluasi efektivitas
2. Variabel : Komitmen Organisasional Manajer  
Dimensi : a) *Affective commitment*  
b) *Continuance commitment*  
c) *Normative commitment*
3. Variabel : Pengendalian Intern  
Dimensi : a) Lingkungan pengendalian  
b) Penilaian risiko  
c) Aktivitas pengendalian  
d) Informasi dan komunikasi  
e) Pemantauan

4. Variabel : Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

- Dimensi :
- a) Pertanggungjawaban
  - b) Akuntabilitas
  - c) Kewajaran
  - d) Transparansi
  - e) Kemandirian

5. Variabel : Kinerja Perusahaan

- Dimensi :
- a) Kinerja keuangan
  - b) Kinerja non keuangan

Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh 2 (dua) variabel bebas yaitu penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal terhadap kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian sebagai variabel terikatnya. Berikut variabel-variabel dan dimensi yang digunakan:

1. Variabel : Penerapan karakteristik fungsi audit internal

- Dimensi :
- a) Independensi
  - b) Kompetensi
  - c) Pelaksanaan audit
  - d) Pelaksanaan rekomendasi

2. Variabel : Peran audit internal

- Dimensi :
- a) Audit kinerja
  - b) Peran konsultan dan katalis

3. Variabel : Kualitas *Good Governance*

- Dimensi :
- a) Transparansi
  - b) Akuntabilitas
  - c) Keefisienan dan keefektifan

## BAB 3

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana permasalahan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka konseptual dan premis yang telah dikemukakan pada BAB 2, hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut.

- 1)  $H_1$  : Terdapat hubungan yang positif antara penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal ( $X_1$  dan  $X_2$ ).

Hipotesis statistik  $H_1$  adalah:

$$H_{01} : R_{X_1 X_2} = 0$$

$$H_{a1} : R_{X_1 X_2} \neq 0$$

- 2)  $H_2$  : Terdapat pengaruh positif penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal terhadap kualitas *good governance* baik secara parsial maupun secara bersama-sama ( $X_1$ ,  $X_2$  dan  $Y$ ).

Hipotesis statistik  $H_2$  adalah:

- a)  $H_{2a}$  : Terdapat pengaruh positif penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal terhadap kualitas *good governance* ( $X_1$ ,  $X_2$  dan  $Y$ ).

$$H_{02a} : b_1, b_2 = 0$$

$$H_{a2a} : b_1, b_2 \neq 0$$



b)  $H_{2b}$  : Terdapat pengaruh positif penerapan karakteristik fungsi audit internal terhadap kualitas *good governance* ( $X_1$  dan  $Y$ ).

$$H_{02b} : b_1 = 0$$

$$H_{a2b} : b_1 \neq 0$$

c)  $H_{2c}$  : Terdapat pengaruh positif peran audit internal terhadap kualitas *good governance* ( $X_2$  dan  $Y$ ).

$$H_{02c} : b_2 = 0$$

$$H_{a2c} : b_2 \neq 0$$

### 3.2. Unit Observasi

Unit observasi dalam karya akhir ini adalah Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian, merupakan unit kerja dengan tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Perindustrian, yang berlokasi di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan.

### 3.3. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis melalui survai. Metode survai dalam pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner terhadap populasi tertentu. Penelitian ini menggunakan telaahan statistika yang tepat untuk tujuan sebab akibat, yaitu dengan menggunakan teknik analisis jalur yang ditujukan untuk memperoleh bukti empiris menguji dan menjelaskan pengaruh penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal oleh Inspektorat Jenderal terhadap kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian. Penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan:

- 1) Studi literatur terkait permasalahan.
- 2) Mengumpulkan data primer dengan menggunakan kuesioner dan wawancara.
- 3) Melakukan pengujian dan analisis terhadap permasalahan berdasarkan teori dan data yang terkumpul.
- 4) Menarik kesimpulan dan memberikan saran untuk pemecahan permasalahan.

#### 3.4. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Operasionalisasi variabel adalah proses mengoperasionalkan konsep suatu variabel sehingga variabel tersebut dapat diukur, yang dirumuskan dengan mendasarkan pada dimensi yang dimiliki konsep tersebut dan kemudian dikategorikan pada elemen-elemen yang dapat diukur (Sekaran, 1992). Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel yaitu 2 (dua) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat.

##### 1) Variabel bebas (*independent variable*)

Suatu variabel digolongkan sebagai variabel bebas apabila dalam hubungannya dengan variabel lain, variabel tersebut berfungsi untuk mempengaruhi keadaan variabel lain, atau menjadi sebab terjadi atau tidaknya sesuatu.

##### 2) Variabel terikat (*dependent variable*)

Suatu variabel digolongkan sebagai variabel terikat apabila keadaan variabel tersebut dipengaruhi oleh variabel yang menjadi akibat terjadinya sesuatu, karena adanya variabel bebas.

Tabel 3.1. Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal (X <sub>1</sub> )	1. Independensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Posisi Itjen dalam memberikan kontribusi pada kinerja Departemen</li> <li>b) Tupoksi didefinisikan tertulis dan dikomunikasikan secara efektif</li> <li>c) Tidak terjadi konflik saat klarifikasi hasil audit</li> <li>d) Kebebasan menentukan ruang lingkup audit</li> <li>e) Akses yang tidak terbatas terhadap semua informasi dalam pelaksanaan audit</li> </ul>	Ordinal
	2. Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kecukupan SDM secara kuantitatif dan kualitatif</li> <li>b) Kesesuaian strategi kepegawaian dengan misi Itjen</li> <li>c) Evaluasi kinerja untuk auditor internal secara berkala</li> <li>d) Program pendidikan keahlian yang berkelanjutan</li> </ul>	Ordinal
	3. Pelaksanaan Audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kesesuaian pelaksanaan audit dengan PKPT</li> <li>b) Penyusunan PKA</li> <li>c) Penetapan audit berdasarkan analisa risiko</li> <li>d) Kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit</li> </ul>	Ordinal

Tabel 3.1. (sambungan)

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
	4. Pelaksanaan Rekomendasi	a) Tindakan perbaikan oleh unit kerja sebagai pelaksanaan rekomendasi hasil audit b) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit	Ordinal
Peran Audit Internal (X <sub>2</sub> )	1. Audit Kinerja	Tingkat pelaksanaan evaluasi ekonomisasi, efisiensi dan efektifitas program/kegiatan	Ordinal
	2. Peran Konsultan dan Katalis	Memberikan nasehat dan saran kepada manajemen.	Ordinal
Kualitas <i>Good Governance</i> (Y)	1. Transparansi	a) Tersedianya informasi publik yang akurat b) Adanya akses pada informasi yang mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu	Ordinal
	2. Akuntabilitas	a) Adanya mekanisme pertanggungjawaban kegiatan b) Adanya indikator program dan kegiatan c) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan	Ordinal
	3. Keefisienan dan Keefektifan	a) Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal b) Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja	Ordinal

### 3.5. Populasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode populasi dalam arti semua anggota populasi ikut dianalisis. Populasi sebagai keseluruhan unit analisis penelitian ini adalah individu yang berkaitan langsung dengan penerapan fungsi dan peran audit internal di lingkungan Departemen Perindustrian, yaitu seluruh auditor Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian yang berjumlah 32 orang. Responden untuk penelitian ini ditetapkan sejumlah populasi yang ada.

### 3.6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menempati kedudukan penting dalam suatu penelitian, hal ini tidak lain karena keberhasilan suatu penelitian dipengaruhi oleh instrumen yang dipergunakan. Dalam suatu penelitian kuantitatif yang bersifat pengujian hipotesis, instrumen penelitian merupakan alat yang dipakai untuk menjembatani antara subyek dan obyek (secara substansial antara hal-hal teoritis dengan empiris, antara konsep dengan data), sejauhmana data mencerminkan konsep yang ingin diukur tergantung pada instrumen yang dipergunakan untuk mengumpulkan data.

Dalam penyusunan instrumen penelitian ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

1. Masalah dan variabel yang diteliti termasuk indikator variabel harus jelas dan spesifik sehingga dapat dengan mudah menetapkan jenis instrumen yang akan digunakan.
2. Sumber data/informasi baik jumlah maupun keragamannya harus diketahui terlebih dahulu, sebagai bahan atau dasar dalam menentukan isi, bahasa dan sistematika item dalam instrumen penelitian.
3. Keterandalan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpulan data baik dari keajegan, kesahihan maupun obyektivitas.

4. Jenis data yang diharapkan dari penggunaan instrumen harus jelas, sehingga peneliti dapat memperkirakan cara analisis data guna pemecahan masalah penelitian.
5. Mudah dan praktis digunakan, akan tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan.

Pada penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner adalah instrumen penelitian dalam bentuk pertanyaan yang biasanya dimaksudkan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan pendapat, aspirasi, persepsi, keinginan, keyakinan dan lain-lain secara tertulis, dan apabila pertanyaan dan jawaban dilakukan secara lisan disebut wawancara. Dalam suatu penelitian kedua instrumen ini sering dikombinasikan dengan maksud untuk lebih meyakinkan.

Untuk menilai variabel dependen dan variabel independen, instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner diberikan indikasi pengukuran skala likert. Skala likert merupakan suatu pengukuran dengan skala ordinal. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2004:86). Dengan skala likert dapat memperlihatkan item yang dinyatakan dalam beberapa responsi alternatif. Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel dependen dan variabel independen adalah sebagai berikut:

- Ya (diberi nilai 3);
- Ragu-ragu (diberi nilai 2); dan
- Tidak (diberi nilai 1).

### **3.7. Jenis dan Prosedur Pengumpulan Data**

Jenis data yang dikumpulkan berupa data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

### 1) Data Primer

Data utama yang khusus dikumpulkan terkait penelitian yang dilakukan. Data ini diperoleh dengan memberikan kuesioner dan melakukan wawancara kepada auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder berupa catatan organisasi atau data jadi yang telah disediakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian dan hasil dari studi literatur.

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1) Pengumpulan data primer

Dilakukan dengan survei secara langsung pada obyek yang diteliti atau penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara:

##### a) Kuesioner

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun sedemikian rupa, sehingga dapat dengan mudah dijawab oleh para responden.

##### b) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, guna mendapatkan data-data yang diperlukan.

#### 2) Pengumpulan data sekunder

Data sekunder didapat dari penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **3.8. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian**

Mengingat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini.

Patut diingat bahwa selalu ada kemungkinan kesalahan (eror) dalam pengukuran. Tetapi dengan menggunakan alat ukur yang lebih baik, maka pengukuran yang lebih akurat (tepat) akan dapat diperoleh, yang pada gilirannya akan meningkatkan kadar atau kualitas suatu penelitian. Dengan demikian, peneliti perlu mengevaluasi kebaikan atau kesesuaian alat ukur untuk menjamin bahwa alat ukur yang digunakan memang mengukur variabel-variabel yang semestinya diukur dengan sebaik mungkin.

Dua kriteria pokok untuk menguji kesesuaian alat ukur yang dikembangkan adalah validitas dan reliabilitas atau keandalan. Agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka informasi mengenai validitas dan reliabilitas alat ukur haruslah disampaikan oleh peneliti. Pentingnya aspek validitas dan reliabilitas tersebut menjadi alasan pentingnya pengujian validitas dan reliabilitas pada data yang diperoleh sebelum dilakukan analisis.

### 3.8.1. Uji Validitas (*Test of Validity*)

Uji validitas digunakan untuk menentukan seberapa bagus alat ukur yang dikembangkan mampu mengukur suatu instrumen tertentu yang akan diukur, atau dengan kata lain apakah instrument yang disiapkan untuk mengumpulkan data penelitian benar-benar mengukur apa yang ingin diukur (Ancok, 1989; Sekaran, 1992). Dalam penelitian survey maka kuesioner yang disusun oleh peneliti harus mengukur apa yang ingin diukurnya (Ancok, 1989), sehingga dapat dikatakan bahwa kuesionernya valid. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai variansi kesalahan yang kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang dapat dipercaya.

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian validitas terhadap item pertanyaan (validitas item). Pengertian dari validitas item adalah bahwa setiap item (pertanyaan) dapat dikatakan valid jika mempunyai dukungan yang kuat terhadap skor total. Dengan kata lain, sebuah item pertanyaan, dikatakan mempunyai



validitas yang tinggi jika terdapat skor kesejajaran (korelasi yang tinggi) terhadap skor total item. Pengujian terhadap validitas item ini menggunakan teknik *Corrected Item-Total Correlation* (Duwi Priyanto, 2008:21), yaitu dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor butir pertanyaan dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi koefisien item total yang overestimasi (estimasi nilai yang lebih tinggi dari yang sebenarnya). Apabila angka korelasi signifikan berarti alat ukur tersebut valid dan layak digunakan dalam pengujian penelitian. Sebaliknya bila tidak signifikan maka tidak akan diikutsertakan dalam pengujian penelitian.

Secara statistik, angka korelasi yang diperoleh ( $r$  hitung) harus dibandingkan dengan angka kritis tabel korelasi pada baris  $N$  (uji 2 sisi dengan signifikansi 5%). Bila  $r$  hitung  $\geq r$  tabel maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total. Pada penelitian ini nilai  $r$  tabel adalah 0,361 (uji 2 sisi pada taraf signifikansi 95% dan  $N = 30$ ).

Setelah dapat ditentukan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid, maka selanjutnya pertanyaan yang dinyatakan valid tersebut diuji reliabilitasnya.

### 3.8.2. Uji Reliabilitas (*Test of Reliability*)

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Jika suatu alat ukur digunakan dua kali untuk mengukur sesuatu yang sama dan hasil kedua pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat ukur tersebut reliabel.

Penerapan uji reliabilitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen berupa kuesioner pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsistensi yang baik dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan dalam waktu yang berbeda. Dapat disimpulkan reliabilitas

instrumen berhubungan dengan ketepatan penelitian. Uji reliabilitas dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama.

Pengujian reliabilitas menggunakan metode Alpha Cronbach. Rumus koefisien reabilitas Alpha Cronbach sebagai berikut (Duwi Priyanto, 2008:25):

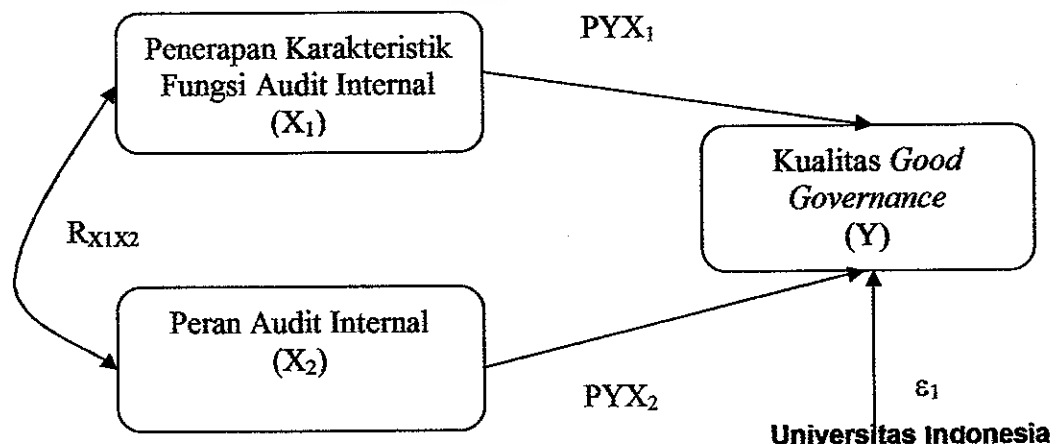
$$r_i = \frac{k}{(k-1)} \left( 1 - \frac{\sum S_i^2}{S_i^2} \right)$$

dimana,  $r_i$  : reliabilitas instrumen  
 $k$  : banyaknya butir pertanyaan  
 $\sum S_i^2$  : mean kuadrat kesalahan  
 $S_i^2$  : varians total

Uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikansi 5%, artinya instrumen dapat dikatakan reliabel bila nilai Alpha Cronbach lebih besar dari  $r$  kritis *product moment*. Pada penelitian ini nilai  $r$  tabel adalah 0,361 (uji 2 sisi pada taraf signifikansi 95% dan  $N = 30$ ).

### 3.9. Model Penelitian

Gambaran hipotesis penelitian dirangkum dalam model penelitian sebagai berikut.



### 3.10. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan telaahan statistika yang tepat untuk tujuan sebab akibat, yaitu menggunakan teknik analisis jalur dengan *software* SPSS 17.0 yang ditujukan untuk memperoleh bukti empiris menguji dan menjelaskan pengaruh penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal oleh Inspektorat Jenderal terhadap kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian.

#### 3.10.1. Transformasi Data Ordinal ke Interval

Hipotesis pada penelitian ini akan diuji menggunakan teknik analisis jalur. Untuk memenuhi persyaratan analisis jalur yang menyatakan bahwa syarat data yang digunakan berskala interval, maka dilakukan transformasi data ordinal ke dalam bentuk data interval dengan menggunakan *method of successive interval* (MSI) terlebih dahulu (Jonathan Sarwono, 2007:2).

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Untuk setiap pertanyaan, hitung frekuensi jawaban setiap kategori (pilihan jawaban).
2. Berdasarkan frekuensi setiap kategori dihitung proporsinya.
3. Dari proporsi yang diperoleh, hitung proporsi kumulatif untuk setiap kategori.
4. Tentukan pula nilai batas Z untuk setiap kategori.
5. Hitung *scale value* (interval rata-rata) untuk setiap kategori melalui persamaan berikut:

$$Scale = \frac{\text{kepadatan batas bawah} - \text{kepadatan batas atas}}{\text{daerah di bawah batas atas} - \text{daerah di bawah batas bawah}}$$

6. Hitung score (nilai hasil transformasi) untuk setiap kategori melalui persamaan:

$$score = scoreValue + \frac{|scaleValue_{min}|}{2} + 1$$

(Hays, 1976).

### 3.10.2. Uji Asumsi Klasik

Pada dasarnya model analisis jalur merupakan model regresi (walaupun lebih khusus karena digunakan untuk menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung). Karena itu sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik regresi berupa uji normalitas dan uji heteroskedastisitas.

#### 3.10.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji distribusi data normal atau tidak, dapat dilakukan dengan melihat *Normal Probability Plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2002).

Dalam penelitian ini akan digunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5%.

#### 3.10.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan adanya hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian tetap maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pemeriksaan terhadap gejala heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya

heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik diagram pencar (*scatterplot*) antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ( $Y_{\text{prediksi}} - Y_{\text{sesungguhnya}}$ ) yang telah di-*studentized*. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola-pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2002).

- Bilamana terjadi titik-titik membentuk suatu pola yang teratur (melebar kemudian menyempit atau bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas.
- Bilamana tidak ada pola yang teratur dengan titik-titik yang menyebar sepanjang sumbu Y positif dan Y negatif, maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Park, yaitu dengan meregresikan nilai residual ( $Lne_i^2$ ) dengan masing-masing variabel dependen ( $LnX_1$  dan  $LnX_2$ ). (Duwi Priyanto, 2008:41). Model regresi tersebut adalah:

$$Lne_i^2 = b_0 + b_1 LnX_i$$

Jika koefisien  $b_1$  bersifat tidak signifikan berarti asumsi homokedastisitas dapat diterima.

### 3.10.3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan terhadap hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis tersebut. Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*).

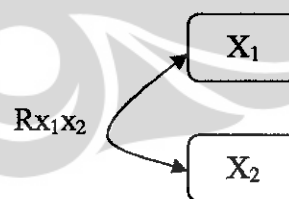
Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung (Robert D. Rutherford, 1993). Sementara itu definisi lain mengatakan bahwa analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan (*magnitude*) dan signifikansi (*significance*) hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel (Paul Webley, 1997).

Prosedur teknik pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis jalur adalah sebagai berikut:

1. Perumusan persamaan struktural dan diagram jalur;
2. Menghitung atau menentukan koefisien jalur;
3. Pengujian koefisien jalur; dan
4. Dekomposisi pengaruh kausal antar variabel.

**1) Pengujian Hipotesis Pertama ( $H_1$ ): hubungan antara variabel penerapan karakteristik fungsi audit internal ( $X_1$ ) dan peran audit internal ( $X_2$ )**

Pengujian hipotesis pertama mengidentifikasi hubungan antara variabel  $X_1$  dan  $X_2$  berikut ini:



Uji hipotesis pertama dilakukan dengan melihat koefisien korelasi ( $R_{x_1x_2}$ ) dengan menguji hipotesis sebagai berikut:

$$H_{01} : R_{x_1x_2} = 0$$

$$H_{a1} : R_{x_1x_2} \neq 0$$

Secara manual, nilai  $R_{x_1x_2}$  dihitung dengan rumus:

$$R_{x_1x_2} = \frac{\sum_{i,j=1}^N (x_i - \bar{x}_i) - (x_j - \bar{x}_j)}{(N - 1)S_{x_1}S_{x_2}}$$

Dimana: X = Nilai variabel yang diamati

$\bar{X}$  = Rata-rata nilai keseluruhan variabel yang diamati

N = Jumlah pengamatan

S = Deviasi standar

Hipotesis diuji dengan pengujian t sebagai berikut:

a) Menentukan nilai t hitung dengan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana: r = Koefisien korelasi yang dihasilkan

n = Jumlah pengamatan

b) Menguji nilai t hitung yang sudah didapatkan pada poin pertama dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel (dengan derajat kebebasan = n-2) atau dengan membandingkan nilai p value (sig t) hasil output regresi menggunakan SPSS 17.0 dengan nilai  $\alpha$  yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila t hitung lebih besar dari t tabel atau p value (sig t) lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  dapat disimpulkan bahwa  $H_{01}$  berhasil ditolak atau dalam hal ini nilai koefisien korelasi yang didapatkan adalah signifikan.

Untuk menentukan besarnya derajat keeratan dari hubungan statistika dua variabel yaitu antara variabel karakteristik fungsi audit internal dengan peran audit internal, digunakan klasifikasi hubungan statistika dua variabel Guilford berikut ini (Jonathan Suwarno, 2007).

**Universitas Indonesia**

Tabel 3.2. Kriteria Klasifikasi Derajat Keeratan Dua Variabel

Nilai hubungan statistika dua variabel	Keterangan
0 – 0,25	Korelasi sangat lemah (dianggap tidak ada)
> 0,25 – 0,5	Korelasi cukup kuat
> 0,5 – 0,75	Korelasi kuat
> 0,75 - 1	Korelasi sangat kuat

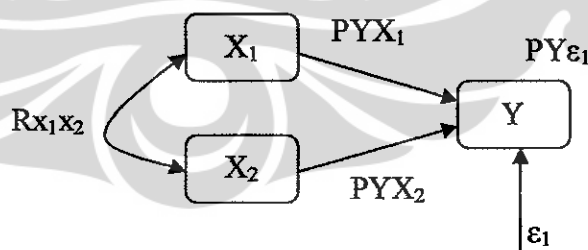
Sumber: Jonathan Suwarno (2007)

**2) Pengujian Hipotesis Kedua (H<sub>2</sub>): pengaruh penerapan karakteristik fungsi audit internal (X<sub>1</sub>) dan peran audit internal (X<sub>2</sub>) terhadap kualitas Good Governance (Y)**

Pengujian hipotesis kedua didasarkan pada struktur yang mengidentifikasi pengaruh dari variabel X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> terhadap Y dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = PYX_1 + PYX_2 + PY\epsilon_1$$

Persamaan struktural di atas dapat digambarkan kedalam bentuk berikut:



Uji hipotesis kedua dilakukan dengan menguji hipotesis sebagai berikut:

$$H_{02} : PYX_i = 0$$

$$H_{a2} : PYX_i \neq 0$$



Nilai  $PYX_i$  adalah nilai koefisien jalur yang ditaksir atau dihitung berdasarkan data hasil pengamatan. Hipotesis di atas diuji dengan menggunakan pengujian t dalam rangka menilai signifikansi dari nilai  $PYX_i$  sebagai berikut:

a) Menentukan nilai t hitung dengan rumus:

$$t_{YX_i} = \frac{\rho_{YX_i}}{se(\rho_{YX_i})}$$

Dimana:  $\rho_{YX_i}$  = Koefisien jalur yang akan diuji

$t_{YX_i}$  = Nilai t hitung dari setiap koefisien jalur variabel eksogen

$se(\rho_{YX_i})$  = Standar error koefisien jalur yang bersesuaian

b) Menguji nilai t hitung yang sudah dihasilkan pada poin pertama dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel (dengan derajat kebebasan =  $n-k-2$ ) dimana n adalah jumlah pengamatan dan k menunjukkan jumlah variabel eksogen yang terdapat dalam struktur yang sedang diuji; atau dengan membandingkan nilai p value (sig t) hasil output regresi menggunakan SPSS 17.0 dengan nilai  $\alpha$  yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila t hitung lebih besar dari t tabel atau p value (sig t) lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  berhasil ditolak atau dalam hal ini nilai koefisien korelasi yang didapatkan adalah signifikan.

## **BAB 4**

### **ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Profil Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian**

Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Perindustrian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Perindustrian. Sebagai unsur pembantu pimpinan di bidang pengawasan, memiliki kewajiban dalam mengamankan pencapaian tujuan dan sasaran Departemen Perindustrian.

Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian sebagai unit pengawas internal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diarahkan untuk mencegah dan sekaligus melakukan deteksi dini penyimpangan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Perindustrian dapat terselenggara dengan baik, efisien, efektif dan ekonomis, serta tepat waktu dan tepat sasaran sesuai peraturan perundang-undangan.

##### **4.1.1.1. Fungsi Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian**

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
2. Pelaksanaan audit kinerja, keuangan dan audit untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri;
3. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal; serta
4. Penyusunan laporan hasil audit.

Pengawasan pada Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian dilakukan pada seluruh unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian baik pusat maupun daerah. Untuk unit pusat pengawasan dilakukan pada seluruh jajaran unit kerja eselon I, sementara untuk pengawasan di daerah adalah pada unit pelaksana teknis yang meliputi unit pendidikan yaitu Sekolah Tinggi/Akademi/Sekolah Menengah Kejuruan, Balai Diklat Industri, Balai Besar, serta Balai Riset dan Standarisasi. Selain itu, dilaksanakan audit terhadap pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi sektor perindustrian dan pengawasan pada Perwakilan/Atase Perindustrian (Atperin) di luar negeri yaitu Atperin Tokyo-Jepang, Brussel-Belgia, dan KDEI Taiwan.

Untuk kegiatan pengawasan atau audit dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional auditor yaitu :

1. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan cakupan tugas lain yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

2. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, serta cakupan tugas lain yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

3. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, serta cakupan tugas lain yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

#### 4. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, serta cakupan tugas lain yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I sampai dengan Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi berikut:

- Pelaksanaan penyiapan rencana pengawasan dan program kerja pemeriksaan;
- Pemeriksaan, penilaian, pengujian dan pengusutan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi;
- Pemeriksaan, penilaian, pengujian dan pengusutan terhadap kebenaran laporan pengaduan tentang penyimpanan atau penyalahgunaan wewenang; serta
- Perumusan laporan hasil pengawasan.

##### 4.1.1.2. Rencana Strategik Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, perencanaan strategik merupakan langkah awal melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan strategik yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Departemen Perindustrian telah menetapkan Visinya: "Terwujudnya pengawasan internal yang efisien dan efektif untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor industri dan terciptanya *good governance* di lingkungan Departemen Perindustrian" dengan Misi:

**Universitas Indonesia**

1. Mewujudkan pengawasan sebagai salah satu pilar dalam rangka meminimalisir penyimpangan, pemborosan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan.
2. Menyempurnakan sistem pengawasan dalam rangka pencapaian ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas aparaturnya Departemen Perindustrian.
3. Meningkatkan upaya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan anggaran pembinaan dan pengembangan industri.

Visi dan Misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan yang hendak dicapai secara bertahap. Pencapaian tersebut dilakukan melalui penetapan kebijakan teknis, program dan kegiatan pengawasan.

Perencanaan strategik Inspektorat Jenderal merupakan suatu komitmen dari serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Inspektorat Jenderal dalam rangka pencapaian tujuan pengawasan, dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut maka strategi pengawasan yang digunakan adalah:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri nasional.
3. Mempercepat tindak lanjut atas hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.
4. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan seluruh unsur pengawasan.
5. Meningkatkan profesionalitas dan kemandirian aparaturnya pengawasan.
6. Meningkatkan budaya pengawasan.

#### **4.1.1.3. Pedoman Pengawasan Berbasis Pembinaan**

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan yang berbasis pembinaan, Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian memiliki pedoman pengawasan dalam bentuk Peraturan Inspektur

Jenderal Nomor 145/IJ-IND/XII/2005 tentang Pedoman Pengawasan Berbasis Pembinaan di Lingkungan Departemen Perindustrian.

Pengawasan berbasis pembinaan dimaksudkan untuk mencegah dan sekaligus memberikan deteksi dini (*early warning*) agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terhindar dari terjadinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, ketidakefisienan dalam melaksanakan kebijakan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pembinaan dan pengembangan industri dilihat dari aspek-aspek program/kegiatan dan anggaran, administratif (keuangan, kepegawaian, Barang Milik Negara, dll) serta pelaksanaan peraturan perundangannya.

Sebagai bagian inheren manajemen Departemen Perindustrian, Inspektorat Jenderal sebagai satuan pengawas intern dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada:

- 1) Tugas pokok dan fungsi
- 2) Kebijakan, program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam :
  - a) RPJM 2004 – 2009
  - b) Renstra Departemen Perindustrian dan Renstra unit eselon I, serta Renja masing-masing unit kerja eselon I
  - c) Kebijakan Pembangunan Industri Nasional (KPIN)
- 3) Peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan APBN
- 4) Peraturan perundangan yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan industri

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan tersebut terdiri dari:

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Program

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Program diarahkan untuk mengendalikan agar prioritas, sasaran dan target pembinaan dan pengembangan industri dapat terlaksana sesuai dengan rencana-rencana yang dirumuskan dalam RPJM, Renstra dan Renja.

## 2) Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi

Kegiatan ini diarahkan agar pengelolaan keuangan, Inventaris Barang Milik Negara, Kearsipan, Kepegawaian dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, transparan dan bertanggung jawab.

## 3) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundangan di Bidang Industri

Kegiatan ini diarahkan untuk memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan berbagai peraturan perundangan di bidang industri yang tujuannya :

- a) Untuk mengetahui apakah peraturan perundangan tersebut dapat berjalan pada tataran implementasi sesuai maksud dan tujuan saat perancangannya;
- b) Memberikan iklim usaha yang kondusif bagi dunia usaha industri; dan
- c) Pelayanan publik dapat diselenggarakan dengan mudah, cepat dan murah.

## 4) Pembinaan dan Pengawasan Lainnya, terdiri dari:

- a) Pengadaan Barang dan Jasa
- b) Pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP)
- c) Pemeriksaan Khusus

### 4.1.1.4. Profil Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh auditor pada Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian yang berjumlah 32 orang. Dari sejumlah 32 kuesioner yang disebar, terkumpul sebanyak 32 buah. Adapun karakteristik responden berdasarkan jabatan, latar belakang pendidikan dan jenis kelamin per masing-masing unit eselon II adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1. Karakteristik Responden

Wilayah	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin		Grand Total
			L	P	
Inspektorat 1	Auditor Ahli Madya	S1	4		4
		S2	1		1
	Auditor Ahli Muda	S1	1	1	2
	Auditor Ahli Utama	S2	1		1
Inspektorat 1 Total			7	1	8
Inspektorat 2	Auditor Ahli Madya	S1	3	1	4
		S1	2		2
	Auditor Ahli Pertama	S2	2		2
	Auditor Pelaksana Lanjutan	SMU		1	1
Inspektorat 2 Total			7	2	9
Inspektorat 3	Auditor Ahli Madya	S1	4	1	5
		S2	1		1
	Auditor Ahli Muda	S1	1		1
Inspektorat 3 Total			6	1	7
Inspektorat 4	Auditor Ahli Madya	S1	3	2	5
		S2	1		1
	Auditor Ahli Muda	S1	2		2
Inspektorat 4 Total			6	2	8
Grand Total			26	6	32

#### 4.1.2. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

##### 4.1.2.1. Hasil Uji Validitas (*Test of Validity*)

Pada tahap pertama pengujian validitas instrumen penelitian diperoleh hasil berikut dan kemudian dibandingkan dengan nilai  $r$  tabel pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data ( $N$ ) = 30 yaitu 0,361.



Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Tahap 1

Variabel	Jumlah item pertanyaan	Range Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Validitas seluruh item pertanyaan
Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal	22	0,263 - 0,706	1 item pertanyaan tidak Valid
Peran Audit Internal	13	0,392 – 0,612	Valid
Kualitas <i>Good Governance</i>	20	0,000 – 0,806	2 item pertanyaan tidak Valid

Sumber: Data Output SPSS 17.0 diolah (Lampiran 2)

Dari hasil output SPSS 17.0 pada nilai *Corrected Item-Total Correlation* terdapat 1 (satu) item pertanyaan pada variabel Penerapan Karakteristik Fungsi Audit yaitu pertanyaan A6 dengan nilai 0,263 dan 2 (dua) item pertanyaan pada variabel Kualitas *Good Governance* yaitu C6 dengan nilai 0,176 dan C9 dengan nilai 0,000 yang nilainya kurang dari 0,361. Karena koefisien korelasi pada item pertanyaan A6, C6 dan C9 nilainya kurang dari 0,361 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid. Sedangkan pada item-item lainnya nilainya lebih dari 0,361 dan dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut valid.

Pada pengujian validitas tahap kedua ketiga butir instrumen penelitian yang tidak valid digugurkan dan diperoleh hasil bahwa seluruh item pertanyaan memiliki korelasi yang signifikan. Hal ini bisa dilihat pada nilai *Corrected Item-Total Correlation* yaitu berkisar antara 0,377 s.d. 0,808 atau lebih besar dari nilai *r* tabel sebesar 0,361.

Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Tahap 2

Variabel	Jumlah item pertanyaan	Range Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Validitas seluruh item pertanyaan
Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal	21	0,406 - 0,705	Valid
Peran Audit Internal	13	0,392 – 0,612	Valid
Kualitas <i>Good Governance</i>	18	0,377 – 0,808	Valid

Sumber: Data Output SPSS 17.0 diolah (Lampiran 2)

#### 4.1.2.2. Hasil Uji Reliabilitas (*Test of Reliability*)

Hasil uji reliabilitas seluruh item pertanyaan kuesioner dalam penelitian ini diperoleh bahwa seluruh item pertanyaan reliabel, karena nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar daripada nilai nilai r tabel sebesar 0,361 sehingga data primer yang diperoleh layak untuk digunakan/dianalisa lebih lanjut.

Tabel 4.4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Jumlah item pertanyaan	Koefisien Alpha Cronbach	Reliabilitas seluruh item pertanyaan
Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal	21	0,892	Reliabel
Peran Audit Internal	13	0,832	Reliabel
Kualitas <i>Good Governance</i>	18	0,902	Reliabel

Sumber: Data Output SPSS 17.0 diolah (Lampiran 2)

Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian berupa kuesioner tentang karakteristik fungsi audit internal, peran audit internal dan *good governance* adalah valid dan reliabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa kuesioner dan data yang diperoleh dapat

dikatakan berkualitas dan mampu menghasilkan kesimpulan penelitian yang berkualitas pula.

#### **4.1.3. Analisis Deskriptif Jawaban Responden**

Berikut ini dipaparkan hasil analisis secara deskriptif atas jawaban responden yang menggambarkan kondisi unit analisis berdasarkan variabel-variabel yang diteliti.

##### **4.1.3.1. Analisis Deskriptif Variabel Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal**

Penilaian variabel penerapan karakteristik fungsi audit internal seluruhnya terdiri dari 21 item pertanyaan, yang terbagi atas 4 (empat) dimensi yaitu:

- Independensi, terdiri dari 7 item pertanyaan.
- Kompetensi, terdiri dari 8 item pertanyaan.
- Pelaksanaan Audit, terdiri dari 4 item pertanyaan.
- Pelaksanaan Rekomendasi, terdiri dari 2 item pertanyaan.

##### **1. Analisis Deskriptif Dimensi Independensi**

Tabel 4.5. menunjukkan berdasarkan karakteristik responden yaitu wilayah, jabatan dan latar belakang pendidikan sebagian besar menunjukkan kategori sangat memadai dengan rata-rata dalam range 2,50 – 3,00; kecuali kelompok jabatan auditor ahli muda yang termasuk kategori cukup memadai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah memiliki posisi yang strategis dalam memberikan kontribusi pada kinerja Departemen Perindustrian secara keseluruhan. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Inspektorat Jenderal telah didefinisikan secara tertulis pada SK Menteri Perindustrian No. 01 tahun 2005 dan dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh pejabat dan staf Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal memiliki kebebasan untuk

menentukan area/bidang tertentu sebagai ruang lingkup audit dan memiliki kebebasan yang sangat memadai atas akses terhadap semua informasi dalam pelaksanaan audit.

Tabel 4.5. Frekuensi Tanggapan Responden tentang Independensi

Karakteristik Responden	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
	Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
	f	%	f	%	f	%			
<b>A. Wilayah</b>									
Inspektorat 1	48	85.71	4	7.14	4	7.14	56	100.00	2.79
Inspektorat 2	52	82.54	3	4.76	8	12.70	63	100.00	2.70
Inspektorat 3	40	81.63	1	2.04	8	16.33	49	100.00	2.65
Inspektorat 4	41	73.21	2	3.57	13	23.21	56	100.00	2.50
<b>B. Jabatan</b>									
Auditor Pelaksana Lanjutan	7	100.00	0	-	0	-	7	100.00	3.00
Auditor Ahli Pertama	13	92.86	0	-	1	7.14	14	100.00	2.86
Auditor Ahli Muda	27	55.10	3	6.12	19	38.78	49	100.00	2.16
Auditor Ahli Madya	128	87.07	8	5.44	11	7.48	147	100.00	2.80
Auditor Ahli Utama	6	85.71	0	-	1	14.29	7	100.00	2.71
<b>C. Pendidikan</b>									
SMU	7	100.00	0	-	0	-	7	100.00	3.00
S1	136	77.71	11	6.29	28	16.00	175	100.00	2.62
S2	38	90.48	0	-	4	9.52	42	100.00	2.81

Sumber: Data Primer diolah (Lampiran 4)

## 2. Analisis Deskriptif Dimensi Kompetensi

Tabulasi frekuensi tanggapan responden tentang kompetensi berdasarkan karakteristik responden yaitu wilayah, jabatan dan latar belakang pendidikan disajikan pada tabel 4.6. Sebagian besar menunjukkan kategori memadai dengan rata-rata dalam range 2,00 – 2,50; kecuali kelompok jabatan auditor pelaksana lanjutan dan berlatar belakang pendidikan SMU yang menilai sangat memadai, serta kelompok wilayah Inspektorat 1, jabatan auditor ahli muda dan berlatar belakang pendidikan S1 yang menilai cukup memadai.

Kondisi tersebut menunjukkan auditor yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal cukup kompeten terkait tupoksinya karena pengalaman auditor yang cukup tinggi, namun mengalami kendala dalam hal

jumlah auditor dan kualifikasi pendidikan auditor. Selain itu, auditor internal juga belum diberikan evaluasi kinerja secara berkala.

Tabel 4.6. Frekuensi Tanggapan Responden tentang Kompetensi

Karakteristik Responden	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
	Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
	f	%	f	%	f	%			
<b>A. Wilayah</b>									
Inspektorat 1	21	32.81	10	15.63	33	51.56	64	100.00	1.81
Inspektorat 2	47	65.28	3	4.17	22	30.56	72	100.00	2.35
Inspektorat 3	31	55.36	4	7.14	21	37.50	56	100.00	2.18
Inspektorat 4	30	46.88	6	9.38	28	43.75	64	100.00	2.03
<b>B. Jabatan</b>									
Auditor Pelaksana Lanjutan	8	100.00	0	-	0	-	8	100.00	3.00
Auditor Ahli Pertama	11	68.75	1	6.25	4	25.00	16	100.00	2.44
Auditor Ahli Muda	16	28.57	5	8.93	35	62.50	56	100.00	1.66
Auditor Ahli Madya	89	52.98	16	9.52	63	37.50	168	100.00	2.15
Auditor Ahli Utama	5	62.50	1	12.50	2	25.00	8	100.00	2.38
<b>C. Pendidikan</b>									
SMU	8	100.00	0	-	0	-	8	100.00	3.00
S1	87	43.50	21	10.50	92	46.00	200	100.00	1.98
S2	34	70.83	2	4.17	12	25.00	48	100.00	2.46

Sumber: Data Primer diolah (Lampiran 4)

### 3. Analisis Deskriptif Dimensi Pelaksanaan Audit

Tabulasi frekuensi tanggapan responden tentang pelaksanaan audit berdasarkan karakteristik responden yaitu wilayah, jabatan dan latar belakang pendidikan disajikan pada tabel 4.7. Sebagian besar menunjukkan kategori memadai hingga sangat memadai dimana audit internal telah dijalankan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT dan standar audit yang ada, kecuali kelompok jabatan auditor ahli utama yang menilai pelaksanaan audit cukup memadai karena pelaksanaan audit belum sepenuhnya mengacu kepada Program Kerja Audit/PKA dan belum berdasarkan analisis resiko.

Tabel 4.7. Frekuensi Tanggapan Responden tentang Pelaksanaan Audit

Karakteristik Responden	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
	Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
	f	%	f	%	f	%			
<b>A. Wilayah</b>									
Inspektorat 1	23	71.88	0	-	9	28.13	32	100.00	2.44
Inspektorat 2	27	75.00	2	5.56	7	19.44	36	100.00	2.56
Inspektorat 3	20	71.43	0	-	8	28.57	28	100.00	2.43
Inspektorat 4	21	65.63	0	-	11	34.38	32	100.00	2.31
<b>B. Jabatan</b>									
Auditor Pelaksana Lanjutan	3	75.00	1	25.00	0	-	4	100.00	2.75
Auditor Ahli Pertama	7	87.50	1	12.50	0	-	8	100.00	2.88
Auditor Ahli Muda	16	57.14	0	-	12	42.86	28	100.00	2.14
Auditor Ahli Madya	64	76.19	0	-	20	23.81	84	100.00	2.52
Auditor Ahli Utama	1	25.00	0	-	3	75.00	4	100.00	1.50
<b>C. Pendidikan</b>									
SMU	3	75.00	1	25.00	0	-	4	100.00	2.75
S1	71	71.00	0	-	29	29.00	100	100.00	2.42
S2	17	70.83	1	4.17	6	25.00	24	100.00	2.46

Sumber: Data Primer diolah (Lampiran 4)

#### 4. Analisis Deskriptif Dimensi Pelaksanaan Rekomendasi

Tabulasi frekuensi tanggapan responden tentang pelaksanaan rekomendasi berdasarkan karakteristik responden yaitu wilayah, jabatan dan latar belakang pendidikan disajikan pada tabel 4.8. Seluruhnya menunjukkan kategori sangat memadai yaitu dengan rata-rata dalam range antara 2,50 – 3,00.

Tindakan perbaikan yang dilaksanakan unit kerja diyakini merupakan perbaikan atas kelemahan yang ditemukan dalam hasil audit internal Inspektorat Jenderal dan telah dimonitor dengan sangat baik oleh Inspektorat Jenderal khususnya Bagian Tindak Lanjut melalui kegiatan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan pemutakhiran data pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dengan Bawasda dan BPK.

Tabel 4.8. Frekuensi Tanggapan Responden tentang Pelaksanaan Rekomendasi

Karakteristik Responden	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
	Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
	f	%	f	%	f	%			
<b>A. Wilayah</b>									
Inspektorat 1	15	93.75	1	6.25	0	-	16	100.00	2.94
Inspektorat 2	16	88.89	0	-	2	11.11	18	100.00	2.78
Inspektorat 3	12	85.71	2	14.29	0	-	14	100.00	2.86
Inspektorat 4	15	93.75	1	6.25	0	-	16	100.00	2.94
<b>B. Jabatan</b>									
Auditor Pelaksana Lanjutan	2	100.00	0	-	0	-	2	100.00	3.00
Auditor Ahli Pertama	4	100.00	0	-	0	-	4	100.00	3.00
Auditor Ahli Muda	10	71.43	2	14.29	2	14.29	14	100.00	2.57
Auditor Ahli Madya	40	95.24	2	4.76	0	-	42	100.00	2.95
Auditor Ahli Utama	2	100.00	0	-	0	-	2	100.00	3.00
<b>C. Pendidikan</b>									
SMU	2	100.00	0	-	0	-	2	100.00	3.00
S1	44	88.00	4	8.00	2	4.00	50	100.00	2.84
S2	12	100.00	0	-	0	-	12	100.00	3.00

Sumber: Data Primer diolah (Lampiran 4)

#### 4.1.3.2. Analisis Deskriptif Variabel Peran Audit Internal

Sesuai dengan perkembangannya, peran Inspektorat Jenderal sesuai dengan misi yang telah ditetapkan yaitu mewujudkan pengawasan sebagai salah satu pilar dalam rangka meminimalisir penyimpangan, pemborosan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan, melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pengendalian berbasis pembinaan melalui advokasi, asistensi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan unit kerja.

Penilaian variabel peran audit internal seluruhnya terdiri dari 13 item pertanyaan, yang terbagi atas 2 (dua) dimensi yaitu:

- Audit Kinerja, terdiri dari 6 item pertanyaan.
- Peran Konsultan dan Katalis, terdiri dari 7 item pertanyaan.

### 1. Analisis Deskriptif Dimensi Audit Kinerja

Tabulasi frekuensi tanggapan responden tentang audit kinerja berdasarkan karakteristik responden yaitu wilayah, jabatan dan latar belakang pendidikan disajikan pada tabel 4.9. Sebagian besar menunjukkan kategori memadai hingga sangat memadai, kecuali kelompok jabatan auditor auditor ahli muda yang menilai penerapan audit kinerja oleh Inspektorat Jenderal cukup memadai.

Tabel 4.9. Frekuensi Tanggapan Responden tentang Audit Kinerja

Jabatan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
	Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
	f	%	f	%	f	%			
<b>A. Wilayah</b>									
Inspektorat 1	44	91.67	0	-	4	8.33	48	100.00	2.83
Inspektorat 2	46	85.19	0	-	8	14.81	54	100.00	2.70
Inspektorat 3	13	61.90	0	-	8	38.10	21	100.00	2.24
Inspektorat 4	14	58.33	0	-	10	41.67	24	100.00	2.17
<b>B. Jabatan</b>									
Auditor Pelaksana Lanjutan	6	100.00	0	-	0	-	6	100.00	3.00
Auditor Ahli Pertama	7	58.33	0	-	5	41.67	12	100.00	2.17
Auditor Ahli Muda	19	45.24	0	-	23	54.76	42	100.00	1.90
Auditor Ahli Madya	88	69.84	0	-	38	30.16	126	100.00	2.40
Auditor Ahli Utama	6	100.00	0	-	0	-	6	100.00	3.00
<b>C. Pendidikan</b>									
SMU	5	83.33	1	16.67	0	-	6	100.00	2.83
S1	95	63.33	0	-	55	36.67	150	100.00	2.27
S2	25	69.44	0	-	11	30.56	36	100.00	2.39

Sumber: Data Primer diolah (Lampiran 4)

### 2. Analisis Deskriptif Dimensi Peran Konsultan dan Katalis

Tabulasi frekuensi tanggapan responden tentang peran konsultan dan katalis berdasarkan karakteristik responden yaitu wilayah, jabatan dan latar belakang pendidikan disajikan pada tabel 4.10. Sebagian besar menunjukkan kategori memadai hingga sangat memadai; kecuali kelompok wilayah Inspektorat 2, jabatan auditor pelaksana lanjutan, auditor ahli muda yang berlatar belakang pendidikan SMU yang menilai peran konsultan dan katalis cukup memadai karena

**Universitas Indonesia**



belum sepenuhnya optimal dilaksanakan khususnya penilaian dan peningkatan manajemen risiko yang efektif, pengembangan dan penerapan sistem pengendalian intern, serta sistem informasi.

Tabel 4.10. Frekuensi Tanggapan Responden tentang Peran Konsultan dan Katalis

Jabatan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
	Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
	f	%	f	%	f	%			
<b>A. Wilayah</b>									
Inspektorat 1	31	55.36	0	-	25	44.64	56	100.00	2.11
Inspektorat 2	29	46.03	0	-	34	53.97	63	100.00	1.92
Inspektorat 3	38	77.55	0	-	11	22.45	49	100.00	2.55
Inspektorat 4	30	53.57	0	-	26	46.43	56	100.00	2.07
<b>B. Jabatan</b>									
Auditor Pelaksana Lanjutan	2	28.57	0	-	5	71.43	7	100.00	1.57
Auditor Ahli Pertama	11	78.57	0	-	3	21.43	14	100.00	2.57
Auditor Ahli Muda	20	40.82	0	-	29	59.18	49	100.00	1.82
Auditor Ahli Madya	90	61.22	0	-	57	38.78	147	100.00	2.22
Auditor Ahli Utama	5	71.43	0	-	2	28.57	7	100.00	2.43
<b>C. Pendidikan</b>									
SMU	2	28.57	0	-	5	71.43	7	100.00	1.57
S1	102	58.29	0	-	73	41.71	175	100.00	2.17
S2	24	57.14	0	-	18	42.86	42	100.00	2.14

Sumber: Data Primer diolah (Lampiran 4)

#### 4.1.3.3. Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Good Governance

Penilaian variabel kualitas *good governance* seluruhnya terdiri dari 18 item pertanyaan, yang terbagi atas 3 (tiga) dimensi yaitu:

- Transparansi, terdiri dari 5 item pertanyaan.
- Akuntabilitas, terdiri dari 8 item pertanyaan.
- Keefisienan dan Keefektifan, terdiri dari 5 item pertanyaan.

##### 1. Analisis Deskriptif Dimensi Transparansi

Tabulasi frekuensi tanggapan responden tentang perwujudan transparansi pada Departemen Perindustrian berdasarkan karakteristik responden yaitu wilayah, jabatan dan latar belakang

pendidikan disajikan pada tabel 4.11. Sebagian besar menunjukkan kategori cukup memadai hingga memadai; kecuali kelompok jabatan auditor pelaksana lanjutan dan yang berlatar belakang pendidikan SMU menilai sangat memadai.

Setiap kebijakan publik termasuk kebijakan alokasi anggaran, pelaksanaannya maupun hasil-hasilnya mutlak harus diinformasikan kepada publik atau dapat diakses oleh publik. Departemen Perindustrian telah memiliki website ([www.depperin.go.id](http://www.depperin.go.id)) yang menampilkan informasi mengenai peraturan, teknologi, data statistik industri, *e-procurement*, berita industri, dan lainnya. Meskipun demikian karena keterbatasan auditor terhadap teknologi, keberadaan informasi tersebut belum diketahui oleh semua auditor.

Tabel 4.11. Frekuensi Tanggapan Responden tentang Transparansi

Jabatan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
	Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
	f	%	f	%	f	%			
<b>A. Wilayah</b>									
Inspektorat 1	12	30.00	10	25.00	18	45.00	40	100.00	1.85
Inspektorat 2	20	44.44	10	22.22	15	33.33	45	100.00	2.11
Inspektorat 3	7	20.00	15	42.86	13	37.14	35	100.00	1.83
Inspektorat 4	14	35.00	12	30.00	14	35.00	40	100.00	2.00
<b>B. Jabatan</b>									
Auditor Pelaksana Lanjutan	4	80.00	0	-	1	20.00	5	100.00	2.60
Auditor Ahli Pertama	5	50.00	3	30.00	2	20.00	10	100.00	2.30
Auditor Ahli Muda	4	11.43	15	42.86	16	45.71	35	100.00	1.66
Auditor Ahli Madya	38	36.19	29	27.62	38	36.19	105	100.00	2.00
Auditor Ahli Utama	2	40.00	3	60.00	0	-	5	100.00	2.40
<b>C. Pendidikan</b>									
SMU	4	80.00	0	-	1	20.00	5	100.00	2.60
S1	37	29.60	43	34.40	45	36.00	125	100.00	1.94
S2	12	40.00	7	23.33	11	36.67	30	100.00	2.03

Sumber: Data Primer diolah (Lampiran 4)

## 2. Analisis Deskriptif Dimensi Akuntabilitas

Tabulasi frekuensi tanggapan responden tentang perwujudan akuntabilitas pada Departemen Perindustrian berdasarkan karakteristik responden yaitu wilayah, jabatan dan latar belakang pendidikan disajikan pada tabel 4.12. Sebagian besar menunjukkan kategori memadai hingga sangat memadai.

Tabel 4.12. Frekuensi Tanggapan Responden tentang Akuntabilitas

Dimensi	Jabatan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
		Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
		f	%	f	%	f	%			
AKUNTABILITAS	<b>A. Wilayah</b>									
	Inspektorat 1	59	92.19	3	4.69	2	3.13	64	100.00	2.89
	Inspektorat 2	64	88.89	4	5.56	4	5.56	72	100.00	2.83
	Inspektorat 3	31	55.36	10	17.86	15	26.79	56	100.00	2.29
	Inspektorat 4	46	71.88	10	15.63	8	12.50	64	100.00	2.59
	<b>B. Jabatan</b>									
	Auditor Pelaksana Lanjutan	8	100.00	0	-	0	-	8	100.00	3.00
	Auditor Ahli Pertama	12	75.00	4	25.00	0	-	16	100.00	2.75
	Auditor Ahli Muda	43	76.79	9	16.07	4	7.14	56	100.00	2.70
	Auditor Ahli Madya	129	76.79	14	8.33	25	14.88	168	100.00	2.62
	Auditor Ahli Utama	8	100.00	0	-	0	-	8	100.00	3.00
	<b>C. Pendidikan</b>									
	SMU	8	100.00	0	-	0	-	8	100.00	3.00
	S1	154	77.00	19	9.50	27	13.50	200	100.00	2.64
	S2	38	79.17	8	16.67	2	4.17	48	100.00	2.75

Sumber: Data Primer diolah (Lampiran 4)

Perwujudan akuntabilitas dinilai sangat memadai karena Departemen Perindustrian dan seluruh unit kerja telah menyusun dan melaporkan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara periodik dan tepat waktu. Pada tahun 2008 Inspektorat Jenderal melakukan fungsinya mengoptimalkan kinerja seluruh unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian, yang terdiri dari 56 unit kerja di pusat dan daerah, dengan melaksanakan Rencana Aksi dalam rangka perbaikan opini Laporan Keuangan Departemen Perindustrian dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini atas Laporan Keuangan Departemen Perindustrian meningkat dari sebelumnya memperoleh opini *Disclaimer* untuk Laporan Keuangan tahun 2006 meningkat menjadi opini Wajar Dengan Pengecualian untuk Laporan Keuangan tahun 2007 dan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan untuk Laporan Keuangan tahun 2008. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan tahun 2008 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP.

Selain itu, Departemen Perindustrian mendapat ranking 11 dari 74 instansi pemerintah yang dinilai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Penilaian kinerja ini berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. (Rakyat Merdeka, 1 September 2009).

### 3. Analisis Deskriptif Dimensi Keefisienan dan Keefektifan

Tabulasi frekuensi tanggapan responden tentang perwujudan prinsip keefisienan dan keefektifan pada Departemen Perindustrian berdasarkan karakteristik responden yaitu wilayah, jabatan dan latar belakang pendidikan disajikan pada tabel 4.13. Sebagian besar menunjukkan kategori memadai hingga sangat memadai.

Kondisi tersebut ditandai dengan terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal, serta berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja. Seluruh unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian telah menyusun rencana kinerja untuk setiap tahun anggaran yang mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta standar, indikator kinerja dan target yang hendak dicapai. Auditor internal

melakukan evaluasi atas efisiensi, efektivitas dan ekonomis pelaksanaan program dan kegiatan tersebut melalui audit kinerja.

Tabel 4.13. Frekuensi Tanggapan Responden tentang Keefisienan dan Keefektifan

Jabatan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
	Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
	f	%	f	%	f	%			
<b>A. Wilayah</b>									
Inspektorat 1	35	87.50	1	2.50	4	10.00	40	100.00	2.78
Inspektorat 2	30	66.67	4	8.89	11	24.44	45	100.00	2.42
Inspektorat 3	23	65.71	1	2.86	11	31.43	35	100.00	2.34
Inspektorat 4	24	60.00	0	-	16	40.00	40	100.00	2.20
<b>B. Jabatan</b>									
Auditor Pelaksana Lanjutan	35	87.50	1	2.50	4	10.00	40	100.00	2.78
Auditor Ahli Pertama	30	66.67	4	8.89	11	24.44	45	100.00	2.42
Auditor Ahli Muda	23	65.71	1	2.86	11	31.43	35	100.00	2.34
Auditor Ahli Madya	24	60.00	0	-	16	40.00	40	100.00	2.20
Auditor Ahli Utama	5	100.00	0	-	0	-	5	100.00	3.00
<b>C. Pendidikan</b>									
SMU	5	100.00	0	-	0	-	5	100.00	3.00
S1	82	65.60	5	4.00	38	30.40	125	100.00	2.35
S2	25	83.33	1	3.33	4	13.33	30	100.00	2.70

Sumber: Data Primer diolah (Lampiran 4)

## 4.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

### 4.2.1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Data seluruhnya berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 5% atau 0,05.

Tabel 4.14. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Nilai Sig
Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal	0,236
Peran Audit Internal	0,713
Kualitas <i>Good Governance</i>	0,862

Sumber: Data Output SPSS 17.0 diolah (Lampiran 5)

Selain itu, pada grafik histogram masing-masing variabel (Lampiran 5) memberikan pola distribusi yang memusat di tengah dan pada *Normal Probability Plot* masing-masing variabel (Lampiran 5) terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

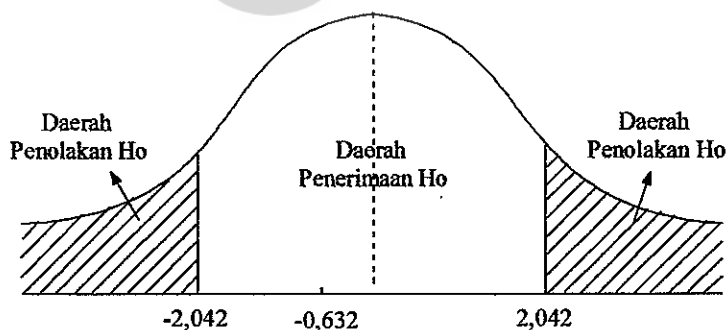
#### 4.2.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Park, dengan kriteria pengujian:

1.  $H_0$ : tidak ada gejala heteroskedastisitas
2.  $H_a$ : ada gejala heteroskedastisitas
3.  $H_0$  diterima bila  $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$  berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Pada hasil output SPSS 17.0 (Lampiran 5) diperoleh nilai  $t$  hitung adalah  $-0,632$  dan  $0,189$ . Sedangkan nilai  $t$  tabel dengan  $df = n-2$  atau  $32-2 = 30$  pada pengujian 2 sisi (taraf signifikansi  $0,05$ ) didapat nilai  $t$  tabel sebesar  $2,042$ . Karena nilai  $t$  hitung berada pada  $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ , maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Daerah penentuan  $H_0$  dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1. Daerah Penentuan  $H_0$  pada Uji Heteroskedastisitas  $Lnei^2$  dengan  $LnX_1$



Gambar 4.2. Daerah Penentuan  $H_0$  pada Uji Heteroskedastisitas  $Lnei^2$  dengan  $LnX_2$

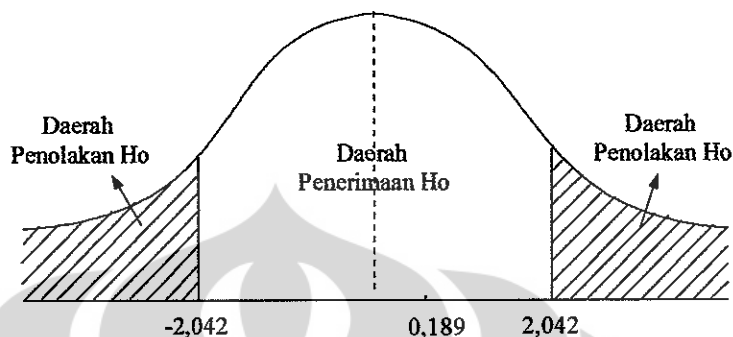


Diagram pencar (*scatterplot*) pada lampiran 5 juga tidak membentuk suatu pola yang teratur, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, dan data layak dipakai untuk penelitian.

#### 4.3. Hasil Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan analisis terhadap instrumen penelitian, analisis deskriptif jawaban responden, transformasi data ordinal ke interval dan pengujian asumsi klasik regresi, data yang didapatkan digunakan untuk menganalisis dan menguji rumusan hipotesis penelitian.

##### 4.3.1. Hubungan antara Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal ( $X_1$ ) dan Peran Audit Internal ( $X_2$ )

Pengujian hipotesis pertama mengidentifikasi hubungan antara variabel  $X_1$  dan  $X_2$  dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_{01} : R_{X_1 X_2} = 0$$

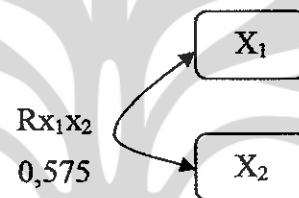
$$H_{a1} : R_{X_1 X_2} \neq 0$$

Berdasarkan perhitungan menggunakan *software* SPSS 17.0 diperoleh nilai *Pearson Correlation* antara penerapan karakteristik fungsi audit internal dengan peran audit internal sebesar 0,575 (Tabel *Correlations*

Universitas Indonesia

pada Lampiran 6). Berdasarkan klasifikasi Derajat Keeratan Dua Variabel yang telah diuraikan pada Bab 3, hubungan antara penerapan karakteristik fungsi audit internal dengan peran audit internal positif dan kuat. Karena hasilnya positif maka hubungan tersebut searah yang artinya jika penerapan karakteristik fungsi audit internal tinggi maka peran audit internal juga tinggi. Korelasi dua variabel bersifat signifikan karena angka signifikan sebesar  $0,00058 < 0,05$ .

Dari nilai koefisien korelasi yang dihasilkan, diagram jalur yang diperoleh adalah sebagai berikut:

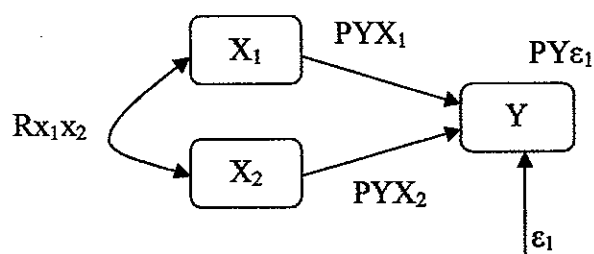


Mendasarkan pada hasil uji hipotesis di atas maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan karakteristik fungsi audit internal dengan peran audit internal dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa peran audit internal akan efektif dan optimal didukung dengan adanya penerapan karakteristik fungsi audit internal yang memadai pada Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian.

#### 4.3.2. Pengaruh Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal ( $X_1$ ) dan Peran Audit Internal ( $X_2$ ) terhadap Kualitas *Good Governance* (Y)

Pengujian hipotesis kedua tentang penerapan karakteristik fungsi audit internal ( $X_1$ ) dan peran audit internal ( $X_2$ ) terhadap kualitas *good governance* (Y) baik secara parsial maupun bersama-sama mendasarkan pada struktur berikut:





Pengujian hipotesis penelitian kedua tersebut menggunakan *software* SPSS 17.0 dengan melakukan uji regresi dengan persamaan berikut ini:

$$Y = PYX_1 + PYX_2 + PY\epsilon_1$$

#### 4.3.2.1. Pengaruh Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal ( $X_1$ ) dan Peran Audit Internal ( $X_2$ ) terhadap Kualitas *Good Governance* ( $Y$ ) Secara Bersama-sama

Untuk melihat pengaruh penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal terhadap kualitas *good governance* secara bersama-sama didasarkan pada output *software* SPSS 17.0: *Model Summary*, khususnya nilai *R square* dibawah ini.

Tabel 4.15. Tabel Output SPSS 17.0: *Model Summary*

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.612 <sup>a</sup>	.374	.331	7.00071593

a. Predictors: (Constant), PeranAI, KarakteristikFAI

Besarnya nilai *R square* ( $r^2$ ) adalah 0,374. Nilai tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal terhadap kualitas *good governance* dengan cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,347 \times 100\%$$

$$KD = 37,4\%$$

Nilai tersebut menandakan bahwa pengaruh penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal terhadap kualitas *Good governance* secara simultan adalah 37,4%. Adapun sisanya sebesar 62,6% ( $100\% - 37,4\%$ ) dipengaruhi oleh faktor lain.

Nilai koefisien korelasi (R) mengukur kekuatan hubungan linier antara variabel bebas ( $X_i$ ) dengan variabel terikat (Y). Nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,612. Berdasarkan klasifikasi Derajat Keeratan Dua Variabel yang telah diuraikan pada Bab 3, hubungan antara variabel penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal dengan kualitas *good governance* positif dan kuat.

Untuk mengetahui apakah model regresi di atas sudah benar atau salah, diperlukan uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan nilai sig F dari tabel Anova (Lampiran 6).

Hipotesisnya sebagai berikut:

$H_{02a}$  : Tidak ada pengaruh positif penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal terhadap kualitas *good governance*

$H_{a2a}$  : Ada pengaruh positif penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal terhadap kualitas *good governance*

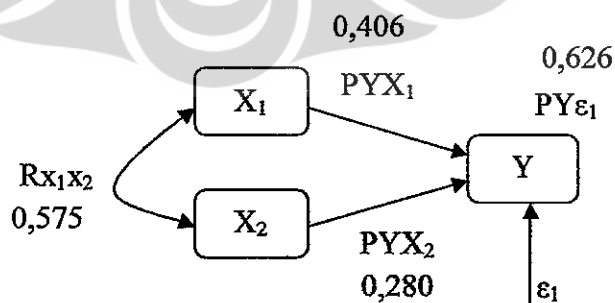
Berdasarkan perhitungan angka signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh positif penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal terhadap kualitas *good governance* secara bersama-sama.

#### 4.3.2.2. Pengaruh Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal ( $X_1$ ) dan Peran Audit Internal ( $X_2$ ) terhadap Kualitas *Good Governance* ( $Y$ ) Secara Parsial

Untuk melihat pengaruh penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal terhadap kualitas *good governance* secara parsial digunakan Uji t dan nilai *standardized coefficients beta* pada output *software* SPSS 17.0: *Coefficients* (Lampiran 6).

Nilai-nilai *standardized coefficients beta* dalam tabel *Coefficients* tersebut merupakan nilai koefisien regresi untuk data yang sudah dibakukan yang tidak lain adalah nilai koefisien jalur. Dari nilai koefisien jalur ini, gambaran hubungan struktural dalam struktur diatas yang menunjukkan pengaruh penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal terhadap kualitas *good governance* sebagai berikut.

Gambar 4.3. Diagram Jalur



Persamaan struktural untuk diagram jalur di atas sebagai berikut:

$$Y = 0,406 X_1 + 0,280 X_2 + 0,626 \varepsilon_1$$

1. Pengaruh penerapan karakteristik fungsi audit internal terhadap kualitas *good governance*

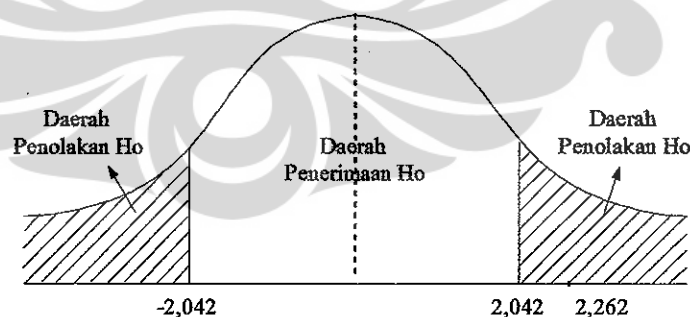
Untuk melihat apakah ada pengaruh positif penerapan karakteristik fungsi audit internal terhadap kualitas *good governance*, hipotesisnya sebagai berikut:

$H_{02b}$  : Tidak ada pengaruh positif penerapan karakteristik fungsi audit internal terhadap kualitas *good governance*

$H_{a2b}$  : Ada pengaruh positif penerapan karakteristik fungsi audit internal terhadap kualitas *good governance*

Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung dalam tabel *Coefficients* (Lampiran 6) sebesar 2,262. Pada taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan  $n-2$  atau  $32-2 = 30$ , diperoleh nilai t tabel sebesar 2,042.

Gambar 4.4. Daerah Penentuan  $H_0$  pada Uji Hubungan antara Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal dan Kualitas *Good Governance*



Didasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung sebesar  $2,262 > t$  tabel sebesar 2,042. Oleh karena itu,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya terdapat pengaruh positif penerapan karakteristik fungsi audit internal terhadap kualitas *good governance*. Koefisien jalur

penerapan karakteristik fungsi audit internal sebesar 0,406 dan besarnya pengaruh karakteristik fungsi audit internal terhadap kualitas *good governance* sebesar  $(0,406 \times 0,406) \times 100\% = 16,4836\%$  dan secara statistik signifikan pada taraf signifikansi 0,05 yang ditunjukkan dengan nilai sig t sebesar 0,031 (lebih kecil dari  $\alpha=0,05$ ).

Dari hasil statistik tersebut dapat dinyatakan bahwa penerapan karakteristik fungsi audit internal berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian. Penerapan karakteristik fungsi audit internal dapat menjelaskan kualitas *good governance* sebesar 16,4836%, sedangkan sisanya yaitu 83,5164% dijelaskan oleh faktor lain, misalnya kecukupan anggaran audit (*sufficient funding*), kepemimpinan yang kompeten (*competent leadership*), pengendalian intern (*internal control*), dan faktor lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Koefisien jalur sebesar 0,406 menunjukkan bahwa jika karakteristik fungsi audit internal meningkat 1% maka perwujudan *good governance* akan meningkat 0,406%.

## 2. Pengaruh peran audit internal terhadap kualitas *good governance*

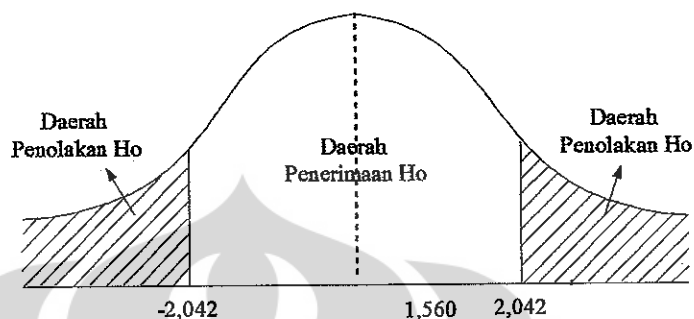
Untuk melihat apakah ada pengaruh positif peran audit internal terhadap kualitas *good governance*, hipotesisnya sebagai berikut:

$H_{02c}$  : Tidak ada pengaruh positif peran audit internal terhadap kualitas *good governance*

$H_{a2c}$  : Ada pengaruh positif peran audit internal terhadap kualitas *good governance*

Hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung dalam tabel *Coefficients* (Lampiran 6) sebesar 1,560. Pada taraf signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan  $n-2$  atau  $32-2 = 30$ , diperoleh nilai t tabel sebesar 2,042.

Gambar 4.5. Daerah Penentuan  $H_0$  pada Uji Hubungan antara Peran Audit Internal dan Kualitas *Good Governance*



Didasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai  $t$  hitung sebesar  $1,560 < t$  tabel sebesar  $2,042$ . Oleh karena itu,  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya tidak ada pengaruh positif antara peran audit internal dan kualitas *good governance*. Koefisien jalur peran audit internal sebesar  $0,280$  dan besarnya pengaruh peran audit internal terhadap kualitas *good governance* sebesar  $(0,280 \times 0,280) \times 100\% = 7,840\%$ ; namun secara statistik tidak signifikan pada taraf signifikansi  $0,05$  yang ditunjukkan dengan nilai  $\text{sig } t$  sebesar  $0,130$  (lebih besar dari  $\alpha=0,05$ ).

Dari hasil statistik tersebut dapat dinyatakan bahwa peran audit internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal tidak berpengaruh secara langsung terhadap kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian.

#### 4.4. Pembahasan Hasil Analisis Penelitian

Hasil penelitian yang sudah diuraikan pada sub bab sebelumnya berupa hasil statistik menunjukkan suatu makna yang menjadi kesimpulan-kesimpulan penelitian yang akan dibahas pada sub bab berikut ini.

#### **4.4.1. Hubungan antara Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal dan Peran Audit Internal**

Hasil analisis penelitian menyatakan bahwa hubungan antara penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal positif. Karena hasilnya positif maka hubungan tersebut searah artinya jika penerapan karakteristik fungsi audit internal tinggi maka peran audit internal juga tinggi. Hal ini berarti kedua variabel tersebut saling mendukung dalam rangka pengaruhnya terhadap variabel perwujudan *good governance*. Penelitian ini menunjukkan bahwa antara penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal dapat disinergikan dalam peningkatan kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian.

Peran audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal dengan didukung oleh penerapan karakteristik fungsi audit internal yang memadai pada Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian. Dengan tingkat independensi dan kompetensi auditor yang memadai akan menunjang auditor internal dalam memberikan penilaian yang sistematis dan obyektif dalam pelaksanaan audit kinerja dan peran konsultatif bagi manajemen dan pihak auditi.

Karena itu diperlukan penambahan jumlah auditor dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dapat mendukung pelaksanaan peran auditor internal yang bersifat konsultatif dan katalis; strategi kepegawaian yang lebih mengakomodir visi, misi dan tupoksi Inspektorat Jenderal saat ini dan peluangnya di masa yang akan datang; evaluasi kinerja bagi auditor internal secara berkala; serta program pendidikan keahlian di bidang audit internal yang berkelanjutan.

#### **4.4.2. Pengaruh Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas *Good Governance***

Penerapan karakteristik fungsi audit internal berpengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian. Hal tersebut diperkuat dengan temuan

deskriptif yang menunjukkan bahwa fungsi audit internal pada Inspektorat Jenderal telah cukup memadai dalam mewujudkan *good governance* pada Departemen Perindustrian, sehingga untuk maksimalisasi kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian, maksimalisasi penerapan karakteristik fungsi audit internal pada Inspektorat Jenderal juga harus dilakukan.

Tidak berpengaruhnya peran audit internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal secara langsung terhadap kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian, dimungkinkan karena penerapan peran audit internal dengan paradigma baru belum sepenuhnya optimal sehingga peran tersebut dinilai belum mampu mendukung perwujudan kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian saat ini.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2008, meliputi:

- 1) Audit Kinerja berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) tahun 2008 sebanyak 110 Obyek Audit dari total 167 Obyek Audit di Departemen Perindustrian
- 2) Audit investigatif dan audit dengan tujuan tertentu berdasarkan aduan masyarakat atau sanggahan yang diterima.
- 3) Reviu Laporan Keuangan pada 56 unit kerja.
- 4) Pemantauan dan Evaluasi terhadap efektivitas Tenaga Penyuluh Lapangan pada 22 daerah, bantuan mesin dan peralatan pada 22 daerah dan pelaksanaan kebijakan pengembangan industri di daerah pasca otonomi pada 66 daerah.
- 5) Asistensi
  - Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian, Inspektorat Jenderal melakukan asistensi dengan membentuk Klinik Layanan Konsultasi dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja.



Lembaga layanan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/4/2008.

- Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Departemen Perindustrian, telah dibentuk Tim Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/12/2006 tanggal 8 Desember 2006.

6) Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan

Pada tahun 2008 Inspektorat Jenderal telah meningkatkan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait, antara lain :

- Melakukan koordinasi dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya KKN di lingkungan Departemen Perindustrian melalui sosialisasi pemberantasan KKN bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPK.
- Melakukan koordinasi dengan BPK dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
- Melakukan kerjasama dengan BPKP untuk menyusun Pedoman Reviu Laporan Keuangan/Barang Milik Negara.
- Koordinasi pengawasan dengan Bawasda/Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan serta pemecahan masalah di bidang pengawasan.
- Koordinasi pengawasan Antar Instansi Pengawas Pemerintah (BPKP dan Inspektorat Jenderal Departemen/Non Departemen) melalui Forum Koordinasi antar Inspektur Jenderal Departemen, Forum Koordinasi antar Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen dan Forum Bersama Aparatur Pengawasan Instansi Pemerintah (Forbes APIP).

Dari temuan statistik berupa kesimpulan statistik berupa besarnya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen yang telah diungkapkan sebelumnya, peneliti melihat walaupun terdapat pengaruh

positif signifikan namun pengaruh variabel penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal lemah terhadap kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian saat ini. Peneliti menduga hal tersebut disebabkan oleh permasalahan jumlah dan kompetensi auditor, serta belum optimalnya pelaksanaan peran advokasi, asistensi dan konsultasi oleh Inspektorat Jenderal dalam rangka mewujudkan *good governance* pada Departemen Perindustrian.

Saat ini telah diambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian. Untuk mempertegas komitmen jajaran Departemen Perindustrian dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan *e-government* melalui penerapan sistem elektronik pada tanggal 2 Mei 2009 lalu Menteri Perindustrian menandatangani Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/5/2009 tentang Pemanfaatan Sistem Elektronik dalam Kerangka *e-Government* di Lingkungan Departemen Perindustrian. Dalam Permenperin tersebut disebutkan bahwa setiap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Departemen Perindustrian dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sistem elektronik dalam kerangka *e-government*, diantaranya meliputi aplikasi yang terdapat di internet, seperti *e-monitoring* (sistem *online* kegiatan realisasi anggaran), *e-disposisi* (sistem *online* kegiatan surat-menyurat), *e-budgeting* (sistem *online* perencanaan keuangan) dan *e-silk* (sistem *online* pelaporan keuangan). Pemanfaatan sistem elektronik lainnya adalah mencakup *e-procurement*, yaitu sistem *online* pengadaan barang dan jasa, serta *e-licensing*, yaitu sistem *online* pengajian rekomendasi/perijinan yang diterbitkan oleh unit kerja di lingkungan Departemen Perindustrian.

Dengan pemanfaatan sistem elektronik secara maksimal dalam kerangka *e-government* di lingkungan Departemen Perindustrian diharapkan tujuan awal untuk meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi dan pelaksanaan *e-government* di lingkungan Departemen Perindustrian dapat segera terwujud.

Tabel 4.16. Implementasi *e-Government* di Departemen Perindustrian

e-Procurement	√	-	-	-	-	-	-
e-Licensing	-	-	-	-	√	-	√
e-Monitoring APBN	√	-	-	√	√	-	√
Publikasi melalui website	√	-	√	√	√	√	√
Absensi sidik jari online	√	√	√	√	√	√	√
Database persuratan	√	-	-	-	-	√	-
Perpustakaan online	√	-	√	√	-	√	√

Sumber: Departemen Perindustrian

Pada gambar diatas tampak bahwa Inspektorat Jenderal masih jauh terbelakang dari unit kerja Eselon 1 lainnya dalam hal penerapan *e-government*, dimana Inspektorat Jenderal baru mengimplementasikan 1 (satu) fungsi dari ketujuh fungsi yang ada yaitu absensi sidik jari online.

Dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi dan *good governance*, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal telah dibuat pedoman Reviu Laporan Keuangan dan persiapan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dengan 24 Standar Operating Procedure (SOP) terdiri dari 5 kegiatan operasional dan 19 kegiatan penunjang serta penataan arsip di lingkungan Inspektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan Arsip Nasional. Per April 2009 Inspektorat Jenderal menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan pada tanggal 16 Oktober 2009 telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dari Lembaga Sertifikasi PT. Tuv Nord Indonesia.

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hipotesis, serta analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### 5.1.1. Hubungan antara Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal dan Peran Audit Internal

1. Penerapan karakteristik fungsi audit internal memiliki hubungan yang kuat dan searah dengan peran audit internal sebesar 0,575.
2. Hubungan antara penerapan karakteristik fungsi audit internal dengan peran audit internal kuat dan searah (karena hasilnya positif). Searah artinya jika penerapan karakteristik fungsi audit internal tinggi maka peran audit internal juga tinggi.
3. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran audit internal akan efektif dan optimal didukung dengan adanya penerapan karakteristik fungsi audit internal yang memadai pada Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian.

##### 5.1.2. Pengaruh Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas *Good Governance*

1. Penerapan karakteristik fungsi audit internal secara langsung berpengaruh positif dan signifikan sebesar 16,4836% terhadap kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian, sedangkan sisanya yaitu 83,5164% dijelaskan oleh faktor lain, misalnya kecukupan anggaran audit (*sufficient funding*), kepemimpinan yang kompeten (*competent leadership*), pengendalian intern (*internal control*), dan faktor lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk maksimalisasi *good governance* pada Departemen Perindustrian, diperlukan maksimalisasi penerapan karakteristik fungsi audit internal pada Inspektorat Jenderal.

2. Peran audit internal berpengaruh positif sebesar 7,840% terhadap perwujudan *good governance* pada Departemen Perindustrian, namun secara statistik pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal ini disebabkan belum optimalnya penerapan paradigma baru peran audit internal oleh Inspektorat Jenderal.
3. Penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal secara bersama-sama berpengaruh positif namun lemah sebesar 37,4% terhadap kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya penerapan karakteristik fungsi audit internal dan peran audit internal yang berbasis pembinaan pada Inspektorat Jenderal.

## 5.2. Saran

1. Kondisi auditor yang ada saat ini sebanyak 32 orang, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang akan memasuki usia pensiun sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian dimasa mendatang. Karena itu program kaderisasi tenaga fungsional auditor harus dilakukan melalui program penerimaan pegawai baru sehingga jumlah auditor dapat sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Untuk mewujudkan auditor yang kompeten perlu upaya untuk terus meningkatkan kompetensi, keterampilan dan keahlian khusus dengan cara memberikan kesempatan kepada para pejabat fungsional auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian untuk lebih sering diikutsertakan dalam kegiatan atau program yang dapat meningkatkan kompetensi auditor, seperti pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, seminar dan workshop, serta diorganisir agar

- pengalokasian waktu pelatihan tidak bersamaan dengan waktu pelaksanaan audit.
3. Selama ini pengawasan yang dilaksanakan adalah bersifat *post-audit*, sehingga upaya untuk menekan seminimal mungkin timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja tidak dapat diwujudkan secara optimal. Untuk kedepannya agar dilakukan langkah-langkah pendampingan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja.
  4. Dalam meningkatkan akuntabilitas Departemen Perindustrian, auditor internal harus tetap aktif dalam mengawasi jalannya proses pelaporan keuangan dan memberikan masukan bagi para pelaksana kegiatan agar tetap dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal.
  5. Inspektorat Jenderal turut menerapkan dan melakukan pengawasan perwujudan reformasi birokrasi dan *good governance* Departemen Perindustrian melalui 3 (tiga) aspek kegiatan yaitu penataan kelembagaan, penyempurnaan ketatakelolaan (*business process*) dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

### **5.3. Keterbatasan Penelitian**

1. Masih perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perwujudan kualitas *good governance* pada Departemen Perindustrian.
2. Responden penelitian hanya auditor internal pada Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian saja karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis. Penelitian dapat dikembangkan dengan mengambil responden dari auditor internal pada Inspektorat Jenderal Departemen/Kementerian/Lembaga lainnya, termasuk unit kerja yang menjadi obyek pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian.

3. Karena keterbatasan kemampuan penulis dalam penyusunan kuesioner penelitian, penulis terbuka untuk menerima masukan perbaikan (*improvement*) dari pihak-pihak yang hendak mengembangkan penelitian ini untuk kepentingan penelitian yang lainnya.



## DAFTAR REFERENSI

- Arens, Alvin A. (2006). *Auditing Assurance Service, An Integrated Approach* (11th ed.). New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Asian Development Bank. (1999). *Governance : Sound Development Management*.
- Badjuri, Achmad dan Elisa Trihapsari. (Agustus, 2004). *Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah*. 4 April 2008. <http://id-jurnal.blogspot.com/2008/04/audit-kinerja-pada-organisasi-sektor.html>
- Belay, Zeleke. (2007). *A Study on Effective Implementation of Internal Audit Function to Promote Good Governance in the Public Sector*. Presented to the "The Achievements, Challenges, and Prospects of the Civil Service Reform Program Implementation in Ethiopia" Conference. April 2007.
- BPKP, Deputi Bidang Akuntan Negara. (2001). *Pedoman Audit Kinerja BUMN/D*. Jakarta: BPKP.
- Depdagri. *Naskah Akademis Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah*. 16 Juni 2009. [http://siwasdanas.itjen.depdagri.go.id/all\\_new\\_siwasdanas/pedoman/index.html](http://siwasdanas.itjen.depdagri.go.id/all_new_siwasdanas/pedoman/index.html).
- Effendi, Muh. Arief. (2006). *Perkembangan Profesi Internal Audit Abad 21*. Disampaikan pada seminar/kuliah umum di Universitas Internasional Batam, 11 Desember 2006.
- Ghozali, I. (2002). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Edisi Kedua). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.



- Hays, W. L. (1976). *Quantification in Psychology*. New Delhi: Prentice Hall.
- Hermanson, Dana R.; dan Larry E. Rittenberg. (2003). *Internal Audit and Organizational Governance*. The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
- Hery. (2004). Menuju Reposisi Peran Internal Audit dalam Era Globalisasi. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* Volume 4, No.3. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi (LPFE) Universitas Trisakti.
- Hoessein, Bhenyamin. (2000). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan sebagai Tanggapan terhadap Aspirasi Kemajemukan Masyarakat dan Tantangan Globalisasi*. Jakarta: Manajemen Usahawan, UI Press.
- Kasminto; Redwan Jaafar; Edi Timbul H.; dan Madijono. (2005). *Auditing* (Edisi ke-4). Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. (2008). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP.
- Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. (2004). *Standar Profesi Audit Internal*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA).
- Leung, Philomena. (2003). *The Role of Internal Audit in Corporate Governance and Management in Australia*. IIA.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

- Malan, R.M.; Fountain Jr, J.I.R.; D.S. Arrowsmith; dan H.R.L. Lockridge. (1984) *Performance Auditing in Local Government*. Chicago, Illinois: Government Finance Officers Association.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2, No. 1. <http://bppk.depkeu.go.id/index.php/2008050577/>
- Nisjar, Kashi. (1997). Beberapa catatan tentang Good Governance. *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*. Jakarta: PP. Persadi.
- Pratolo, Suryo. (2007). Pengaruh Audit Manajemen, Komitmen Organisasional Manajer dan Pengendalian Intern terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan. *Disertasi Doktor pada Universitas Padjajaran*. Bandung.
- Priyanto, Duwi. (2008). *Mandiri Belajar SPSS untuk Analisis Data dan Uji Statistik*. Jakarta: PT. Buku Kita.
- Rai, I Gusti Agung. (2008). *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Reider, Bob. (2002). *Operational Review: Maximum Results of Efficient Costs* (3rd ed.). New York: John Wiley and Sons.
- Salmon, Exitas. (2006). Fungsi Audit Internal dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*, Studi Kasus pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat. *Karya Akhir Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama*. Jakarta.

- Sarwono, Jonathan. (2007). *Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sawyer, Lawrence B.; Dittenhofer; dan Scheiner. (2005). *Sawyer's Internal Auditing* (Desi Adhariani, Penerjemah). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Schiavo-Campo, S., and Tomasi, D. (1999). *Managing Government Expenditure*. Manila: Asia Development Bank.
- Sekaran, Uma. (1992) *Research Methods for Business, A Skill Building Approach* (2nd ed.). New York: John Wiley and Sons.
- Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik. (2007). *Modul Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Bappenas.
- Setyawan, Johny. (1988). *Pemeriksaan Kinerja: Performance Auditing*. Yogyakarta: BPFE.
- Solihin, Dadang. (2007). *Pengukuran Good Governance Index*. Bahan Diskusi Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) – Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Depdagri. Jakarta. 26 September 2007.
- Stanbury, W.T. (2003). *Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality*. Canada: Fraser Institute Digital Publication.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Sunjaya, Angga Nugraha. (2008). Pengaruh Audit Internal terhadap Peningkatan Good Corporate Governance, Studi Kasus pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero). *Karya Akhir Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama*. Jakarta.
- The Institute Internal Auditors. (2004). *Professional Practices Framework: International Standards for The Professional Practice of Internal Audit*.
- The Institute of Internal Auditors. (2006). *The Role of Auditing In Public Sector Governance. Professional Guidance, Setting Standards*.  
<http://stage.theiia.org/research/research-reports/>.
- The Institute of Internal Auditors. (2009). *International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing*.  
<http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/standards/>.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (2000). *Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta.
- Tugiman, Hiro. (2000). *Pandangan Baru Internal Auditing* (Edisi ke-4). Yogyakarta: Kanisius.
- Tugiman, Hiro. (2000). Pengaruh Peran Auditor Internal serta Faktor-Faktor Pendukungnya terhadap Peningkatan Pengendalian Internal dan Kinerja Perusahaan. *Disertasi Doktor pada Universitas Padjajaran*. Bandung.
- Tugiman, Hiro. (2004). *Peran Auditor Internal dalam Menunjang Good Corporate Governance pada BUMN di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA).
- Tugiman, Hiro. (2006). *Standar Profesional Audit Internal* (Edisi ke-9). Yogyakarta: Kanisius.



**Universitas Indonesia**

## Lampiran 1: Kuesioner Tahap 1

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Jakarta, Juli 2009

Kepada.

Yth. Bapak/Ibu

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Tesis Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, saya bermaksud melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal dan Peran Audit Internal oleh Inspektorat Jenderal terhadap kualitas *Good Governance* pada Departemen Perindustrian”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana peran audit internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal berfungsi dengan baik dalam mewujudkan *Good Governance*.

Saya berterima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini. Adappun kuesioner digunakan sebagai alat ukur data dan hasil dari kuesioner ini semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan akademis serta akan dijaga kerahasiaannya.

Akhirnya atas bantuan bapak/ibu mengisi kuesioner ini, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(Eva Laida)

## KUESIONER

### A. Pertanyaan Umum

Isilah pada tempat yang telah disediakan dengan singkat dan jelas. Jika bapak/ibu keberatan untuk mencantumkan nama, pertanyaan nomor 1 boleh dikosongkan. Untuk pertanyaan nomor 2 dan 3 berilah tanda **checklist** (✓) pada kotak yang sesuai.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :  Laki-laki  
 Perempuan
3. Pendidikan :  SMU  
 S1  
 S2
4. Jabatan :

### B. Pertanyaan Khusus

Berikut ini adalah pertanyaan mengenai “Analisis Pengaruh Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal dan Peran Audit Internal oleh Inspektorat Jenderal terhadap kualitas *Good Governance* pada Departemen Perindustrian Peran Inspektorat Jenderal dalam Mewujudkan *Good Governance* pada Departemen Perindustrian”.

Bapak/ibu dimohon untuk memberikan jawaban atas pertanyaan berikut dengan memberikan tanda **checklist** (✓) pada jawaban yang dianggap paling tepat.

## KUESIONER I KARAKTERISTIK FUNGSI AUDIT INTERNAL

### I. Independensi

Pertanyaan		Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Menurut anda apakah Inspektorat Jenderal telah memiliki posisi yang strategis dalam memberikan kontribusi pada kinerja Departemen Perindustrian secara keseluruhan?			
2	Menurut anda apakah tupoksi Inspektorat Jenderal telah didefinisikan secara tertulis?			
3	Menurut anda apakah tupoksi Inspektorat Jenderal telah dikomunikasikan secara efektif?			
4	Menurut anda apakah dalam menjalankan fungsinya sebagai auditor internal, Inspektorat Jenderal bertanggung jawab langsung kepada manajemen (Menteri)?			
5	Menurut anda apakah auditor internal dengan bagian yang diaudit tidak sering terjadi konflik saat klarifikasi hasil audit?			
6	Menurut anda apakah terdapat ketentuan/peraturan yang menjamin/memastikan bahwa auditor tidak dapat mengaudit kembali kegiatan/obrik yang sebelumnya telah ditangani ybs?			
7	Menurut anda apakah Inspektorat Jenderal memiliki kebebasan untuk menentukan area/bidang tertentu sebagai ruang lingkup audit?			
8	Menurut anda apakah auditor internal diijinkan mengakses terhadap semua informasi dalam pelaksanaan pekerjaan audit internal?			

### II. Kompetensi

Pertanyaan		Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Menurut anda apakah Inspektorat Jenderal memiliki jumlah auditor internal yang cukup?			
2	Menurut anda apakah auditor internal memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai?			
3	Menurut anda apakah auditor internal memiliki pengalaman audit yang relevan dalam memberikan jasa audit yang berkualitas tinggi?			
4	Menurut anda apakah kompetensi auditor internal secara langsung telah terkait dengan perannya?			
5	Menurut anda apakah strategi kepegawaian Inspektorat Jenderal telah menggambarkan misi Inspektorat Jenderal yang diperlukan?			
6	Menurut anda apakah strategi kepegawaian Inspektorat Jenderal cukup fleksibel dalam merespon perubahan lingkungan strategis?			



Pertanyaan		Ya	Ragu-ragu	Tidak
7	Menurut anda apakah auditor internal diberikan evaluasi kinerja secara berkala?			
8	Menurut anda apakah program pendidikan keahlian di bidang audit internal yang memadai bagi auditor internal telah diorganisir dengan baik?			

### III. Pelaksanaan Audit

Pertanyaan		Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Menurut anda apakah audit internal telah dilaksanakan berdasarkan rencana tahunan (PKPT)?			
2	Menurut anda apakah auditor internal telah menyusun Program Kerja Audit (PKA) untuk setiap pekerjaannya?			
3	Menurut anda apakah tugas audit internal ditetapkan berdasarkan analisis risiko?			
4	Menurut anda apakah auditor internal telah melaksanakan kegiatan audit internal sesuai dengan standar yang ada?			

### IV. Pelaksanaan Rekomendasi

Pertanyaan		Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Menurut anda apakah tindakan perbaikan yang dilaksanakan unit kerja merupakan perbaikan atas kelemahan yang ditemukan dalam hasil audit internal Inspektorat Jenderal?			
2	Menurut anda apakah pimpinan Inspektorat Jenderal memonitor tindakan perbaikan yang diambil manajemen terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal?			

Ada hal lain yang ingin anda sampaikan berkaitan pertanyaan-pertanyaan di atas:

---



---



---

## KUESIONER II

### PERAN AUDIT INTERNAL

#### I. Audit Kinerja

Audit kinerja menguji apakah sistem dan prosedur yang ditetapkan memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan penggunaan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif.

Pertanyaan		Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Menurut anda apakah auditor internal melaksanakan penilaian terhadap sumberdaya yang digunakan mencukupi untuk melaksanakan suatu program/kegiatan yang sesuai dengan DIPA?			
2	Menurut anda apakah auditor internal melaksanakan penilaian terhadap biaya program/kegiatan sudah wajar (rasional) relatif terhadap hasil yang dicapai?			
3	Menurut anda apakah telah diidentifikasi penyebab timbulnya inefisiensi/pemborosan yang terjadi?			
4	Menurut anda apakah auditor internal telah menentukan kriteria pengukuran yang spesifik terhadap hasil program/kegiatan untuk menilai apakah hasil tersebut telah dicapai?			
5	Menurut anda apakah auditor internal melaksanakan penilaian terhadap penetapan kriteria pengukuran hasil program/kegiatan oleh manajemen?			
6	Menurut anda apakah auditor internal melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian tujuan program/kegiatan?			

#### II. Peran Konsultan dan Katalis

Menurut anda apakah Inspektorat Jenderal telah memberikan masukan bagi manajemen sbb:

Pertanyaan		Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> )			
2	Meningkatkan akuntabilitas			
3	Meningkatkan praktek etis dan program anti korupsi			
4	Penilaian dan peningkatan manajemen risiko yang efektif			
5	Mendesain dan menerapkan sistem pengendalian intern			
6	Pengembangan dan penggunaan sistem informasi (IT)			
7	Evaluasi program dan kegiatan			

### KUESIONER III GOOD GOVERNANCE

#### I. Transparansi

Pertanyaan		Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Menurut anda apakah Renstra Departemen telah dipublikasikan di internet?			
2	Menurut anda apakah Renja Departemen telah dipublikasikan di internet?			
3	Menurut anda apakah dokumen anggaran (RKA-KL) Departemen telah dipublikasikan di internet?			
4	Menurut anda apakah Laporan Keuangan Departemen telah dipublikasikan di internet?			
5	Menurut anda apakah LAKIP Departemen telah dipublikasikan di internet?			

#### II. Akuntabilitas

Pertanyaan		Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Menurut anda apakah sumber-sumber dan penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan dan target yang ditetapkan?			
2	Menurut anda apakah penggunaan anggaran diotorisasi oleh pejabat ybs?			
3	Menurut anda apakah terdapat unit pelaksana Sistem Akuntansi Instansi pada setiap unit kerja di Departemen?			
4	Menurut anda apakah Departemen selalu membuat laporan keuangan secara periodik?			
5	Menurut anda apakah laporan keuangan disusun tepat waktu?			
6	Menurut anda apakah laporan keuangan yang disajikan menyediakan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan?			
7	Menurut anda apakah auditor internal melaksanakan reviu atas laporan keuangan Departemen?			
8	Menurut anda apakah capaian hasil setiap program/kegiatan selalu meningkat setiap tahunnya?			
9	Menurut anda apakah dilaksanakan evaluasi terhadap hasil program/ kegiatan secara periodik?			
10	Menurut anda apakah LAKIP disusun tepat waktu?			

**III. Keefisienan dan Keefektifan**

Pertanyaan		Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Menurut anda apakah auditor internal melaksanakan evaluasi atas program/ kegiatan dengan menilai efisiensi biayanya?			
2	Menurut anda apakah terdapat standar/indikator kinerja untuk semua program/kegiatan Departemen?			
3	Menurut anda apakah auditor internal melaksanakan evaluasi atas tupoksi masing-masing unit kerja?			
4	Menurut anda apakah tidak terdapat tumpang tindih penyelenggaraan fungsi unit kerja?			
5	Menurut anda apakah auditor internal melaksanakan analisis deviasi pencapaian kinerja dari targetnya?			

Ada hal lain yang ingin anda sampaikan berkaitan pertanyaan-pertanyaan di atas:

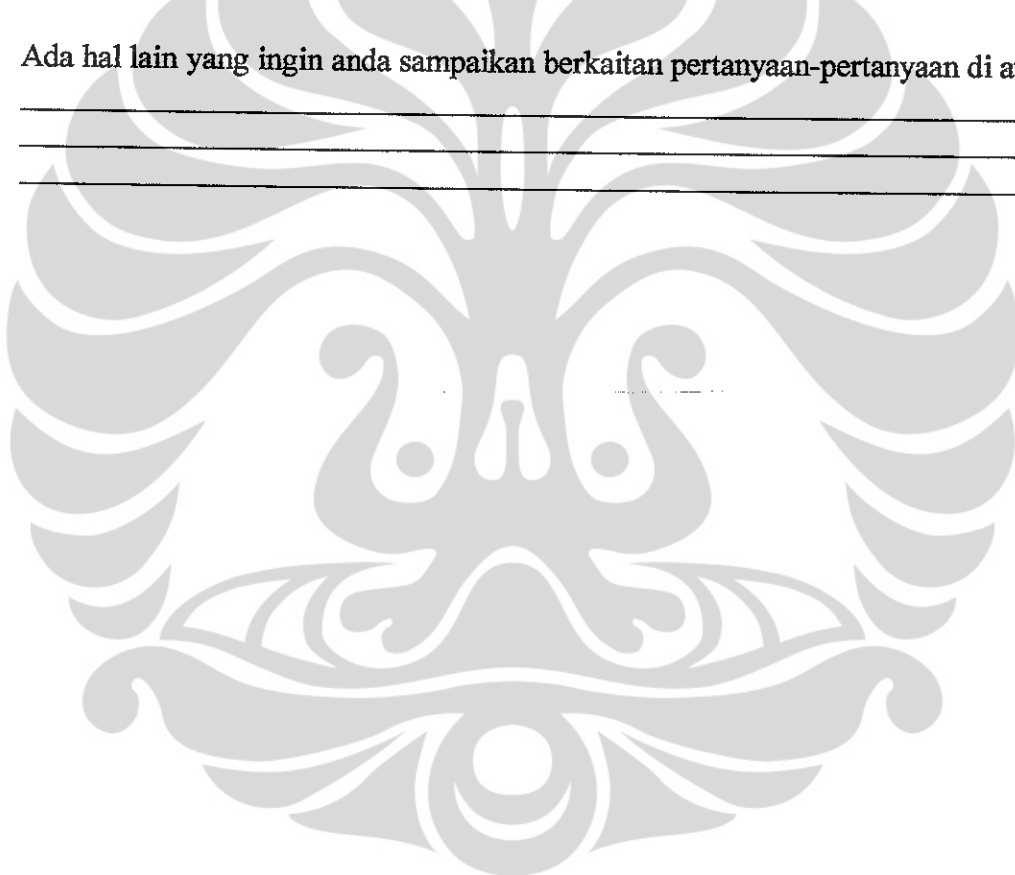
---



---



---



## Lampiran 1: Kuesioner Tahap 2

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Jakarta, Juli 2009

Kepada.

Yth. Bapak/Ibu

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Tesis Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, saya bermaksud melakukan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal dan Peran Audit Internal oleh Inspektorat Jenderal terhadap kualitas *Good Governance* pada Departemen Perindustrian”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana peran audit internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal berfungsi dengan baik dalam mewujudkan *Good Governance*.

Saya berterima kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini. Adappun kuesioner digunakan sebagai alat ukur data dan hasil dari kuesioner ini semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan akademis serta akan dijaga kerahasiaannya.

Akhirnya atas bantuan bapak/ibu mengisi kuesioner ini, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(Eva Laida)

## KUESIONER

### A. Pertanyaan Umum

Isilah pada tempat yang telah disediakan dengan singkat dan jelas. Jika bapak/ibu keberatan untuk mencantumkan nama, pertanyaan nomor 1 boleh dikosongkan. Untuk pertanyaan nomor 2 dan 3 berilah tanda **checklist** (✓) pada kotak yang sesuai.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :  Laki-laki  
 Perempuan
3. Pendidikan :  SMU  
 S1  
 S2
4. Jabatan :

### B. Pertanyaan Khusus

Berikut ini adalah pertanyaan mengenai “Analisis Pengaruh Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal dan Peran Audit Internal oleh Inspektorat Jenderal terhadap kualitas *Good Governance* pada Departemen Perindustrian Peran Inspektorat Jenderal dalam Mewujudkan *Good Governance* pada Departemen Perindustrian”.

Bapak/ibu dimohon untuk memberikan jawaban atas pertanyaan berikut dengan memberikan tanda **checklist** (✓) pada jawaban yang dianggap paling tepat.

## KUESIONER I KARAKTERISTIK FUNGSI AUDIT INTERNAL

### I. Independensi

Pertanyaan		Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Menurut anda apakah Inspektorat Jenderal telah memiliki posisi yang strategis dalam memberikan kontribusi pada kinerja Departemen Perindustrian secara keseluruhan?			
2	Menurut anda apakah tupoksi Inspektorat Jenderal telah didefinisikan secara tertulis?			
3	Menurut anda apakah tupoksi Inspektorat Jenderal telah dikomunikasikan secara efektif?			
4	Menurut anda apakah dalam menjalankan fungsinya sebagai auditor internal, Inspektorat Jenderal bertanggung jawab langsung kepada manajemen (Menteri)?			
5	Menurut anda apakah auditor internal dengan bagian yang diaudit tidak sering terjadi konflik saat klarifikasi hasil audit?			
6	Menurut anda apakah Inspektorat Jenderal memiliki kebebasan untuk menentukan area/bidang tertentu sebagai ruang lingkup audit?			
7	Menurut anda apakah auditor internal diijinkan mengakses terhadap semua informasi dalam pelaksanaan pekerjaan audit internal?			

### II. Kompetensi

Pertanyaan		Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Menurut anda apakah Inspektorat Jenderal memiliki jumlah auditor internal yang cukup?			
2	Menurut anda apakah auditor internal memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai?			
3	Menurut anda apakah auditor internal memiliki pengalaman audit yang relevan dalam memberikan jasa audit yang berkualitas tinggi?			
4	Menurut anda apakah kompetensi auditor internal secara langsung telah terkait dengan perannya?			
5	Menurut anda apakah strategi kepegawaian Inspektorat Jenderal telah menggambarkan misi Inspektorat Jenderal yang diperlukan?			
6	Menurut anda apakah strategi kepegawaian Inspektorat Jenderal cukup fleksibel dalam merespon perubahan lingkungan strategis?			
7	Menurut anda apakah auditor internal diberikan evaluasi kinerja secara berkala?			

**Universitas Indonesia**

Pertanyaan		Ya	Ragu-ragu	Tidak
8	Menurut anda apakah program pendidikan keahlian di bidang audit internal yang memadai bagi auditor internal telah diorganisir dengan baik?			

### III. Pelaksanaan Audit

Pertanyaan		Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Menurut anda apakah audit internal telah dilaksanakan berdasarkan rencana tahunan (PKPT)?			
2	Menurut anda apakah auditor internal telah menyusun Program Kerja Audit (PKA) untuk setiap pekerjaannya?			
3	Menurut anda apakah tugas audit internal ditetapkan berdasarkan analisis risiko?			
4	Menurut anda apakah auditor internal telah melaksanakan kegiatan audit internal sesuai dengan standar yang ada?			

### IV. Pelaksanaan Rekomendasi

Pertanyaan		Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Menurut anda apakah tindakan perbaikan yang dilaksanakan unit kerja merupakan perbaikan atas kelemahan yang ditemukan dalam hasil audit internal Inspektorat Jenderal?			
2	Menurut anda apakah pimpinan Inspektorat Jenderal memonitor tindakan perbaikan yang diambil manajemen terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal?			

Ada hal lain yang ingin anda sampaikan berkaitan pertanyaan-pertanyaan di atas:

---



---



---



## KUESIONER II

### PERAN AUDIT INTERNAL

#### I. Audit Kinerja

Audit kinerja menguji apakah sistem dan prosedur yang ditetapkan memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan penggunaan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif.

Pertanyaan		Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Menurut anda apakah auditor internal melaksanakan penilaian terhadap sumberdaya yang digunakan mencukupi untuk melaksanakan suatu program/kegiatan yang sesuai dengan DIPA?			
2	Menurut anda apakah auditor internal melaksanakan penilaian terhadap biaya program/kegiatan sudah wajar (rasional) relatif terhadap hasil yang dicapai?			
3	Menurut anda apakah telah diidentifikasi penyebab timbulnya inefisiensi/pemborosan yang terjadi?			
4	Menurut anda apakah auditor internal telah menentukan kriteria pengukuran yang spesifik terhadap hasil program/kegiatan untuk menilai apakah hasil tersebut telah dicapai?			
5	Menurut anda apakah auditor internal melaksanakan penilaian terhadap penetapan kriteria pengukuran hasil program/kegiatan oleh manajemen?			
6	Menurut anda apakah auditor internal melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian tujuan program/kegiatan?			

#### II. Peran Konsultan dan Katalis

Menurut anda apakah Inspektorat Jenderal telah memberikan masukan bagi manajemen sbb:

Pertanyaan		Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> )			
2	Meningkatkan akuntabilitas			
3	Meningkatkan praktek etis dan program anti korupsi			
4	Penilaian dan peningkatan manajemen risiko yang efektif			
5	Mendesain dan menerapkan sistem pengendalian intern			
6	Pengembangan dan penggunaan sistem informasi (IT)			
7	Evaluasi program dan kegiatan			

### KUESIONER III GOOD GOVERNANCE

#### I. Transparansi

	Pertanyaan	Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Menurut anda apakah Renstra Departemen telah dipublikasikan di internet?			
2	Menurut anda apakah Renja Departemen telah dipublikasikan di internet?			
3	Menurut anda apakah dokumen anggaran (RKA-KL) Departemen telah dipublikasikan di internet?			
4	Menurut anda apakah Laporan Keuangan Departemen telah dipublikasikan di internet?			
5	Menurut anda apakah LAKIP Departemen telah dipublikasikan di internet?			

#### II. Akuntabilitas

	Pertanyaan	Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Menurut anda apakah penggunaan anggaran diotorisasi oleh pejabat ybs?			
2	Menurut anda apakah terdapat unit pelaksana Sistem Akuntansi Instansi pada setiap unit kerja di Departemen?			
3	Menurut anda apakah laporan keuangan disusun tepat waktu?			
4	Menurut anda apakah laporan keuangan yang disajikan menyediakan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan?			
5	Menurut anda apakah auditor internal melaksanakan reviu atas laporan keuangan Departemen?			
6	Menurut anda apakah capaian hasil setiap program/kegiatan selalu meningkat setiap tahunnya?			
7	Menurut anda apakah dilaksanakan evaluasi terhadap hasil program/ kegiatan secara periodik?			
8	Menurut anda apakah LAKIP disusun tepat waktu?			

**III. Keefisienan dan Keefektifan**

Pertanyaan		Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Menurut anda apakah auditor internal melaksanakan evaluasi atas program/ kegiatan dengan menilai efisiensi biayanya?			
2	Menurut anda apakah terdapat standar/indikator kinerja untuk semua program/kegiatan Departemen?			
3	Menurut anda apakah auditor internal melaksanakan evaluasi atas tupoksi masing-masing unit kerja?			
4	Menurut anda apakah tidak terdapat tumpang tindih penyelenggaraan fungsi unit kerja?			
5	Menurut anda apakah auditor internal melaksanakan analisis deviasi pencapaian kinerja dari targetnya?			

Ada hal lain yang ingin anda sampaikan berkaitan pertanyaan-pertanyaan di atas:

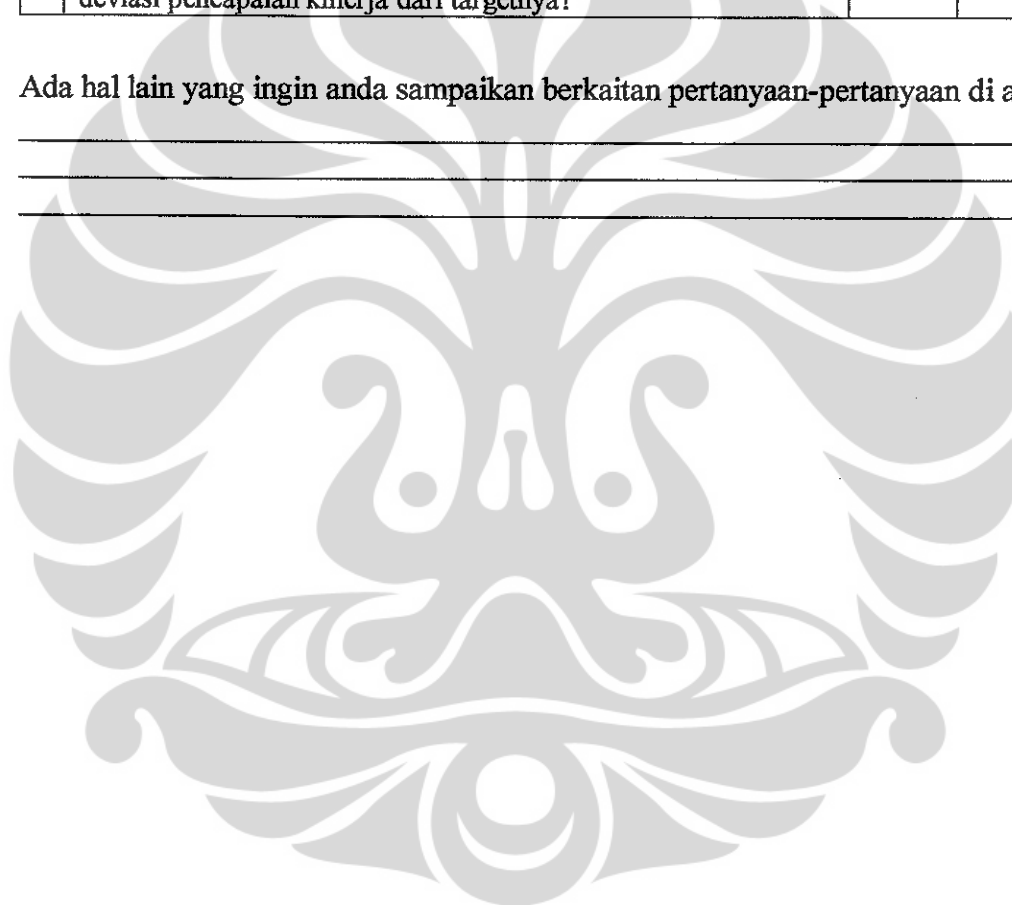
---



---



---



**Lampiran 2: Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian  
(Output SPSS 17.0)**

**A. Pengujian Tahap 1**

**1. Variabel : Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal**

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	50.60	77.007	.706	.881
A2	50.47	82.120	.406	.888
A3	50.73	77.857	.524	.884
A4	50.70	77.872	.578	.883
A5	50.63	77.689	.621	.883
A6	51.87	80.395	.263	.892
A7	51.13	75.706	.507	.885
A8	50.63	77.689	.621	.883
A9	51.40	75.972	.489	.886
A10	51.07	77.857	.427	.887
A11	51.07	78.133	.408	.888
A12	51.07	73.857	.616	.881
A13	51.33	76.575	.475	.886
A14	51.43	73.840	.588	.882
A15	51.33	73.747	.583	.883
A16	51.13	73.844	.601	.882
A17	50.67	79.126	.434	.887
A18	50.60	79.628	.453	.886
A19	52.00	78.207	.451	.886
A20	50.47	82.120	.406	.888
A21	50.60	80.869	.440	.887
A22	50.47	81.430	.512	.887

## 2. Variabel : Peran Audit Internal

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
C1	46.77	61.633	.590	.889
C2	47.63	63.275	.454	.893
C3	47.53	61.361	.639	.887
C4	47.23	61.909	.556	.890
C5	47.20	59.821	.675	.886
C6	46.47	67.223	.176	.899
C7	46.53	61.568	.727	.885
C8	46.33	66.023	.668	.892
C9	46.23	69.426	.000	.898
C10	46.60	63.145	.505	.891
C11	46.43	63.702	.616	.889
C12	46.37	64.792	.536	.891
C13	46.77	61.289	.665	.886
C14	46.77	58.116	.806	.881
C15	46.63	62.999	.477	.892
C16	46.90	59.472	.640	.887
C17	46.63	63.689	.419	.894
C18	46.63	64.447	.361	.896
C19	46.43	65.151	.396	.894
C20	47.33	60.989	.479	.894

### 3. Variabel : Kualitas *Good Governance*

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
C1	46.77	61.633	.590	.889
C2	47.63	63.275	.454	.893
C3	47.53	61.361	.639	.887
C4	47.23	61.909	.556	.890
C5	47.20	59.821	.675	.886
C6	46.47	67.223	.176	.899
C7	46.53	61.568	.727	.885
C8	46.33	66.023	.668	.892
C9	46.23	69.426	.000	.898
C10	46.60	63.145	.505	.891
C11	46.43	63.702	.616	.889
C12	46.37	64.792	.536	.891
C13	46.77	61.289	.665	.886
C14	46.77	58.116	.806	.881
C15	46.63	62.999	.477	.892
C16	46.90	59.472	.640	.887
C17	46.63	63.689	.419	.894
C18	46.63	64.447	.361	.896
C19	46.43	65.151	.396	.894
C20	47.33	60.989	.479	.894

## B. Pengujian Tahap 2

### 1. Variabel : Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	49.07	72.685	.705	.883
A2	48.93	77.651	.406	.890
A3	49.20	73.476	.526	.886
A4	49.17	73.454	.584	.885
A5	49.10	73.403	.615	.885
A6	49.60	71.972	.470	.889
A7	49.10	73.403	.615	.885
A8	49.87	71.775	.481	.888
A9	49.53	73.292	.442	.889
A10	49.53	73.568	.422	.890
A11	49.53	69.361	.633	.883
A12	49.80	71.959	.495	.888
A13	49.90	69.610	.587	.885
A14	49.80	69.683	.571	.885
A15	49.60	69.697	.595	.884
A16	49.13	74.740	.433	.889
A17	49.07	75.306	.445	.889
A18	50.47	73.637	.466	.888
A19	48.93	77.651	.406	.890
A20	49.07	76.340	.452	.889
A21	48.93	76.961	.515	.889

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.892	21

## 2. Variabel : Peran Audit Internal

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
B1	26.37	42.654	.574	.814
B2	26.57	43.702	.428	.824
B3	26.70	43.252	.448	.823
B4	26.67	41.471	.612	.810
B5	26.63	44.033	.392	.827
B6	26.43	44.116	.422	.824
B7	26.37	43.757	.474	.821
B8	26.30	43.528	.524	.818
B9	26.57	42.737	.508	.818
B10	27.30	44.217	.434	.824
B11	26.90	43.748	.405	.826
B12	26.97	42.930	.474	.821
B13	26.23	43.840	.530	.818

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.832	13



### 3. Variabel : Kualitas *Good Governance*

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
C1	41.00	59.517	.593	.895
C2	41.87	61.361	.437	.900
C3	41.77	59.495	.620	.895
C4	41.47	59.913	.549	.897
C5	41.43	57.978	.658	.893
C6	40.77	59.495	.727	.892
C7	40.57	63.840	.675	.898
C8	40.83	61.178	.492	.898
C9	40.67	61.540	.622	.896
C10	40.60	62.662	.536	.898
C11	41.00	59.103	.676	.893
C12	41.00	56.069	.808	.888
C13	40.87	60.947	.473	.899
C14	41.13	57.223	.656	.893
C15	40.87	61.361	.437	.900
C16	40.87	62.051	.377	.902
C17	40.67	62.851	.413	.900
C18	41.57	58.944	.477	.901

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.902	18

### Lampiran 3: Jawaban Responden

#### 1. Hasil Kuesioner (Data Ordinal)

##### A. Variabel : Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal

Responden	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11
1	3	3	3	3	3	1	3	1	1	2	1
2	1	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1
3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1
4	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3
5	3	3	1	2	1	1	1	3	3	3	3
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3
7	3	3	3	3	3	1	3	1	1	1	1
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3
11	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3
12	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	1
13	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3
14	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3
15	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	3	3	2	2	3	3	3	1	1	1	3
18	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	1
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1
20	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	3
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1
24	3	3	3	3	3	3	3	1	3	2	3
25	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
27	3	3	3	3	3	1	3	1	2	1	1
28	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3
29	3	3	3	3	3	1	3	1	2	1	3
30	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1
31	3	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3
32	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1

Responden	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	TOTALA
1	3	1	3	3	3	3	2	3	3	3	51
2	2	1	1	1	3	3	1	3	3	3	39
3	1	1	1	1	3	3	1	3	3	3	48
4	1	1	1	3	3	3	1	3	3	3	51
5	2	3	1	3	3	3	1	3	3	3	49
6	3	3	1	3	3	3	3	3	2	3	59
7	1	1	1	1	3	3	1	3	3	3	43
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
9	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	62
10	1	1	1	3	3	3	1	3	3	3	53
11	2	1	1	1	3	3	1	3	2	3	51
12	1	1	1	1	1	3	1	3	3	3	47
13	1	1	1	3	3	3	1	3	3	3	52
14	2	2	1	1	3	3	1	3	3	3	53
15	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	59
16	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	61
17	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	53
18	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	27
19	1	3	3	1	3	3	1	3	3	3	55
20	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	53
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63
22	3	3	1	3	3	3	1	3	3	3	59
23	2	1	1	1	3	3	1	1	3	3	32
24	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	58
25	2	1	1	1	3	3	1	3	3	3	52
26	1	1	1	3	3	3	1	3	2	3	54
27	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	40
28	3	3	1	3	3	3	1	3	3	3	57
29	3	3	3	3	1	1	1	3	3	3	50
30	1	3	1	3	3	3	1	3	3	3	49
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
32	2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	27

## B. Variabel : Peran Audit Internal

1	3	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1	3	23
2	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	25
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1	3	35
4	3	1	3	1	1	3	3	3	3	1	1	1	3	27
5	3	3	1	1	3	3	3	3	1	1	3	3	3	31
6	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3	35
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	37
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
9	3	3	3	2	3	3	3	3	1	1	1	1	3	28
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
11	1	3	1	1	1	3	3	3	3	1	1	3	3	27
12	3	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	29
13	3	3	3	3	3	3	1	3	3	1	3	1	3	33
14	3	1	1	3	3	3	3	1	1	1	1	1	3	25
15	3	1	1	3	3	3	1	3	3	1	3	1	3	29
16	3	1	1	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	27
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	3	33
18	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
19	1	1	1	1	1	3	3	1	3	1	1	3	1	21
20	3	1	3	1	3	3	3	3	1	1	1	1	1	23
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	35
22	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
24	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3	35
25	1	3	1	1	1	3	3	3	3	1	3	3	3	29
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
27	3	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	29
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	33
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	35
30	3	1	1	3	3	3	1	3	1	1	1	1	3	25
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	35
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13

C. Variabel : Kualitas *Good Governance*

1	2	1	1	2	2	2	3	2	3	3
2	3	1	1	1	1	3	3	1	2	3
3	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3
4	3	1	1	1	2	2	3	2	3	3
5	2	2	2	2	1	1	2	1	2	3
6	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3
7	1	1	1	1	1	3	3	2	3	3
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3
10	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3
11	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3
12	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1
13	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3
14	3	1	2	2	2	3	3	3	3	3
15	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3
16	3	1	1	3	1	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3
19	2	1	1	2	2	3	3	3	3	3
20	2	1	1	1	1	3	3	1	3	3
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
22	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3
23	2	1	2	2	2	2	3	3	3	3
24	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3
25	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3
26	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3
27	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1
28	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3
29	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3
30	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3
31	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3
32	2	1	2	2	2	2	3	3	3	3

1	2	2	3	1	2	3	3	3	40
2	2	3	3	3	3	3	3	3	42
3	3	3	3	3	3	3	3	3	44
4	2	1	1	3	3	1	3	1	36
5	2	1	1	1	1	3	1	1	29
6	3	3	1	2	1	3	3	1	43
7	3	3	3	3	3	3	3	3	43
8	3	3	3	3	3	3	3	3	54
9	3	3	3	3	3	3	3	3	52
10	3	3	3	3	3	3	3	3	51
11	2	3	1	3	3	3	3	1	46
12	1	1	2	1	2	3	3	1	26
13	3	3	3	3	2	3	3	3	49
14	3	3	3	3	3	3	3	1	47
15	3	3	3	1	1	3	3	1	46
16	3	3	3	2	3	3	3	1	45
17	3	3	3	3	3	3	3	3	54
18	3	1	3	1	1	1	1	1	32
19	1	1	2	1	3	3	3	1	38
20	1	1	3	3	3	3	1	2	36
21	3	3	3	3	3	3	3	3	54
22	2	3	3	3	3	3	3	1	41
23	2	2	3	1	1	1	3	1	37
24	3	3	1	1	1	1	3	1	41
25	2	3	1	3	3	3	3	1	46
26	3	3	3	3	3	3	3	3	51
27	1	1	1	1	3	3	3	1	27
28	3	3	3	3	3	3	3	3	52
29	3	3	3	3	3	3	3	3	51
30	3	3	3	3	3	3	3	1	48
31	3	3	3	3	3	3	3	3	52
32	2	2	2	1	1	1	3	1	36

## 2. Hasil Transformasi Data Ordinal ke Interval

### A. Variabel : Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal

Responden	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11
1	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	1.00	2.93	1.00	1.00	1.80	1.00
2	1.00	3.10	1.69	1.76	1.57	1.75	1.57	1.00	1.00	1.00	1.00
3	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	2.72	2.93	1.93	1.91	1.80	1.00
4	2.88	3.10	1.00	1.00	2.93	2.72	2.93	2.80	3.02	2.85	2.63
5	2.88	3.10	1.00	1.76	1.00	1.00	1.00	2.80	3.02	2.85	2.63
6	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	2.72	2.93	2.80	3.02	1.80	2.63
7	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	1.00	2.93	1.00	1.00	1.00	1.00
8	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	2.72	2.93	2.80	3.02	2.85	2.63
9	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	2.72	2.93	2.80	3.02	2.85	2.63
10	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	1.00	2.93	2.80	3.02	2.85	2.63
11	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	1.00	2.93	2.80	3.02	2.85	2.63
12	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	2.72	2.93	1.93	1.91	2.85	1.00
13	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	1.75	2.93	1.93	1.91	2.85	2.63
14	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	2.72	2.93	1.93	1.91	2.85	2.63
15	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	1.00	2.93	2.80	3.02	2.85	2.63
16	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	2.72	2.93	2.80	3.02	2.85	2.63
17	2.88	3.10	1.69	1.76	2.93	2.72	2.93	1.00	1.00	1.00	2.63
18	1.00	3.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.85	1.00
19	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	2.72	2.93	2.80	3.02	2.85	1.00
20	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	2.72	2.93	1.00	1.00	1.00	2.63
21	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	2.72	2.93	2.80	3.02	2.85	2.63
22	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	2.72	2.93	2.80	3.02	2.85	2.63
23	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.02	1.00	1.00
24	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	2.72	2.93	1.00	3.02	1.80	2.63
25	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	2.72	2.93	1.00	3.02	2.85	2.63
26	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	2.72	2.93	2.80	3.02	2.85	2.63
27	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	1.00	2.93	1.00	1.91	1.00	1.00
28	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	2.72	2.93	1.00	3.02	2.85	2.63
29	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	1.00	2.93	1.00	1.91	1.00	2.63
30	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	2.72	2.93	1.00	1.00	1.00	1.00
31	2.88	3.10	3.02	3.16	2.93	2.72	2.93	1.00	1.91	2.85	2.63
32	1.00	1.00	1.69	1.76	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Responden	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	TOTALA
1	2.97	1.00	2.65	2.62	2.82	2.88	2.20	3.10	3.54	3.32	50.92
2	1.95	1.00	1.00	1.00	2.82	2.88	1.00	3.10	3.54	3.32	38.06
3	1.00	1.00	1.00	1.00	2.82	2.88	1.00	3.10	3.54	3.32	48.04
4	1.00	1.00	1.00	2.62	2.82	2.88	1.00	3.10	3.54	3.32	50.15
5	1.95	2.65	1.00	2.62	2.82	2.88	1.00	3.10	3.54	3.32	47.93
6	2.97	2.65	1.00	2.62	2.82	2.88	2.86	3.10	1.90	3.32	57.12
7	1.00	1.00	1.00	1.00	2.82	2.88	1.00	3.10	3.54	3.32	43.69
8	2.97	2.65	2.65	2.62	2.82	2.88	2.86	3.10	3.54	3.32	61.46
9	2.97	2.65	2.65	2.62	2.82	2.88	2.20	3.10	3.54	3.32	60.80
10	1.00	1.00	1.00	2.62	2.82	2.88	1.00	3.10	3.54	3.32	52.61
11	1.95	1.00	1.00	1.00	2.82	2.88	1.00	3.10	1.90	3.32	50.31
12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.88	1.00	3.10	3.54	3.32	47.28
13	1.00	1.00	1.00	2.62	2.82	2.88	1.00	3.10	3.54	3.32	51.38
14	1.95	1.84	1.00	1.00	2.82	2.88	1.00	3.10	3.54	3.32	52.52
15	2.97	2.65	1.00	2.62	2.82	2.88	2.86	3.10	3.54	3.32	58.09
16	2.97	2.65	2.65	2.62	2.82	2.88	1.00	3.10	3.54	3.32	59.60
17	2.97	2.65	2.65	2.62	2.82	2.88	1.00	3.10	3.54	3.32	51.20
18	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.10	1.00	1.00	27.05
19	1.00	2.65	2.65	1.00	2.82	2.88	1.00	3.10	3.54	3.32	54.38
20	2.97	1.00	2.65	2.62	2.82	2.88	1.00	3.10	3.54	3.32	52.28
21	2.97	2.65	2.65	2.62	2.82	2.88	2.86	3.10	3.54	3.32	61.46
22	2.97	2.65	1.00	2.62	2.82	2.88	1.00	3.10	3.54	3.32	57.95
23	1.95	1.00	1.00	1.00	2.82	2.88	1.00	1.00	3.54	3.32	32.53
24	2.97	2.65	1.00	2.62	2.82	2.88	2.86	3.10	3.54	3.32	56.95
25	1.95	1.00	1.00	1.00	2.82	2.88	1.00	3.10	3.54	3.32	51.87
26	1.00	1.00	1.00	2.62	2.82	2.88	1.00	3.10	1.90	3.32	52.70
27	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.10	3.54	3.32	40.90
28	2.97	2.65	1.00	2.62	2.82	2.88	1.00	3.10	3.54	3.32	56.15
29	2.97	2.65	2.65	2.62	1.00	1.00	1.00	3.10	3.54	3.32	49.41
30	1.00	2.65	1.00	2.62	2.82	2.88	1.00	3.10	3.54	3.32	48.68
31	2.97	2.65	2.65	2.62	2.82	2.88	2.86	3.10	3.54	3.32	58.54
32	1.95	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.90	3.32	26.63



**B. Variabel : Peran Audit Internal**

1	2.82	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.67	2.69	2.62	1.00	1.00	1.00	2.73	21.53
2	2.82	2.62	2.60	2.66	2.61	2.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	22.97
3	2.82	2.62	2.60	2.66	2.61	2.67	2.67	2.69	2.62	1.00	2.60	1.00	2.73	31.28
4	2.82	1.00	2.60	1.00	1.00	2.67	2.67	2.69	2.62	1.00	1.00	1.00	2.73	24.80
5	2.82	2.62	1.00	1.00	2.61	2.67	2.67	2.69	1.00	1.00	2.60	2.60	2.73	28.00
6	2.82	2.62	2.60	2.66	1.00	1.00	2.67	2.69	2.62	2.69	2.60	2.60	2.73	31.30
7	2.82	2.62	2.60	2.66	2.61	2.67	2.67	2.69	2.62	1.00	2.60	2.60	2.73	32.88
8	2.82	2.62	2.60	2.66	2.61	2.67	2.67	2.69	2.62	2.69	2.60	2.60	2.73	34.57
9	2.82	2.62	2.60	1.76	2.61	2.67	2.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.73	25.47
10	2.82	2.62	2.60	2.66	2.61	2.67	2.67	2.69	2.62	2.69	2.60	2.60	2.73	34.57
11	1.00	2.62	1.00	1.00	1.00	2.67	2.67	2.69	2.62	1.00	1.00	2.60	2.73	24.60
12	2.82	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.67	2.69	2.62	2.69	2.60	2.60	2.73	26.42
13	2.82	2.62	2.60	2.66	2.61	2.67	1.00	2.69	2.62	1.00	2.60	1.00	2.73	29.61
14	2.82	1.00	1.00	2.66	2.61	2.67	2.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.73	23.14
15	2.82	1.00	1.00	2.66	2.61	2.67	1.00	2.69	2.62	1.00	2.60	1.00	2.73	26.39
16	2.82	1.00	1.00	2.66	2.61	2.67	2.67	2.69	2.62	1.00	1.00	1.00	1.00	24.73
17	2.82	2.62	2.60	2.66	2.61	2.67	2.67	2.69	2.62	1.00	1.00	1.00	2.73	29.68
18	2.82	2.62	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.43
19	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.67	1.00	2.69	1.00	1.00	2.60	1.00	2.73	19.69
20	2.82	1.00	2.60	1.00	2.61	2.67	2.67	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	21.36
21	2.82	2.62	2.60	2.66	2.61	2.67	2.67	2.69	2.62	1.00	1.00	2.60	2.73	31.28
22	2.82	2.62	2.60	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.04
23	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
24	2.82	2.62	2.60	2.66	1.00	1.00	2.67	2.69	2.62	2.69	2.60	2.60	2.73	31.30
25	1.00	2.62	1.00	1.00	1.00	2.67	2.67	2.69	2.62	1.00	2.60	2.60	2.73	26.20
26	2.82	2.62	2.60	2.66	2.61	2.67	2.67	2.69	2.62	2.69	2.60	2.60	2.73	34.57
27	2.82	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.67	2.69	2.62	2.69	2.60	2.60	2.73	26.42
28	2.82	2.62	2.60	2.66	2.61	2.67	2.67	2.69	1.00	1.00	1.00	2.60	2.73	29.66
29	2.82	2.62	2.60	2.66	2.61	2.67	2.67	2.69	2.62	2.69	1.00	1.00	2.73	31.37
30	2.82	1.00	1.00	2.66	2.61	2.67	1.00	2.69	1.00	1.00	1.00	1.00	2.73	23.17
31	2.82	2.62	2.60	2.66	2.61	2.67	2.67	2.69	2.62	1.00	1.00	2.60	2.73	31.28
32	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00

C. Variabel : Kualitas *Good Governance*

1	1.89	1.00	1.00	2.16	2.05	1.76	2.97	1.69	3.20	3.10
2	3.14	1.00	1.00	1.00	1.00	3.16	2.97	1.00	1.64	3.10
3	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
4	3.14	1.00	1.00	1.00	2.05	1.76	2.97	1.69	3.20	3.10
5	1.89	2.25	2.23	2.16	1.00	1.00	1.00	1.00	1.64	3.10
6	3.14	1.00	1.00	3.33	3.14	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
7	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.16	2.97	1.69	3.20	3.10
8	3.14	3.19	3.34	3.33	3.14	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
9	3.14	1.00	3.34	3.33	3.14	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
10	3.14	2.25	2.23	2.16	3.14	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
11	3.14	3.19	2.23	2.16	2.05	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
12	1.89	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
13	3.14	2.25	2.23	2.16	2.05	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
14	3.14	1.00	2.23	2.16	2.05	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
15	3.14	2.25	2.23	3.33	3.14	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
16	3.14	1.00	1.00	3.33	1.00	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
17	3.14	3.19	3.34	3.33	3.14	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
18	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
19	1.89	1.00	1.00	2.16	2.05	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
20	1.89	1.00	1.00	1.00	1.00	3.16	2.97	1.00	3.20	3.10
21	3.14	3.19	3.34	3.33	3.14	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
22	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
23	1.89	1.00	2.23	2.16	2.05	1.76	2.97	3.02	3.20	3.10
24	3.14	2.25	1.00	3.33	3.14	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
25	3.14	3.19	2.23	2.16	2.05	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
26	3.14	2.25	2.23	2.16	3.14	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
27	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.02	1.00	1.00
28	3.14	1.00	3.34	3.33	3.14	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
29	3.14	2.25	2.23	2.16	3.14	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
30	3.14	2.25	2.23	2.16	2.05	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
31	3.14	1.00	3.34	3.33	3.14	3.16	2.97	3.02	3.20	3.10
32	1.89	1.00	2.23	2.16	2.05	1.76	2.97	3.02	3.20	3.10

1	2.00	1.72	2.86	1.00	1.72	2.82	2.97	2.65	38.58
2	2.00	2.86	2.86	2.74	2.86	2.82	2.97	2.65	40.78
3	3.30	2.86	2.86	2.74	2.86	2.82	2.97	2.65	43.53
4	2.00	1.00	1.00	2.74	2.86	1.00	2.97	1.00	35.50
5	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.82	1.00	1.00	28.09
6	3.30	2.86	1.00	1.73	1.00	2.82	2.97	1.00	43.76
7	3.30	2.86	2.86	2.74	2.86	2.82	2.97	2.65	42.20
8	3.30	2.86	2.86	2.74	2.86	2.82	2.97	2.65	54.67
9	3.30	2.86	2.86	2.74	2.86	2.82	2.97	2.65	52.48
10	3.30	2.86	2.86	2.74	2.86	2.82	2.97	2.65	51.45
11	2.00	2.86	1.00	2.74	2.86	2.82	2.97	1.00	46.48
12	1.00	1.00	1.72	1.00	1.72	2.82	2.97	1.00	24.12
13	3.30	2.86	2.86	2.74	1.72	2.82	2.97	2.65	49.22
14	3.30	2.86	2.86	2.74	2.86	2.82	2.97	1.00	47.46
15	3.30	2.86	2.86	1.00	1.00	2.82	2.97	1.00	47.37
16	3.30	2.86	2.86	1.73	2.86	2.82	2.97	1.00	45.34
17	3.30	2.86	2.86	2.74	2.86	2.82	2.97	2.65	54.67
18	3.30	1.00	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	32.62
19	1.00	1.00	1.72	1.00	2.86	2.82	2.97	1.00	37.94
20	1.00	1.00	2.86	2.74	2.86	2.82	1.00	1.87	35.48
21	3.30	2.86	2.86	2.74	2.86	2.82	2.97	2.65	54.67
22	2.00	2.86	2.86	2.74	2.86	2.82	2.97	1.00	40.58
23	2.00	1.72	2.86	1.00	1.00	1.00	2.97	1.00	36.95
24	3.30	2.86	1.00	1.00	1.00	1.00	2.97	1.00	42.46
25	2.00	2.86	1.00	2.74	2.86	2.82	2.97	1.00	46.48
26	3.30	2.86	2.86	2.74	2.86	2.82	2.97	2.65	51.45
27	1.00	1.00	1.00	1.00	2.86	2.82	2.97	1.00	25.68
28	3.30	2.86	2.86	2.74	2.86	2.82	2.97	2.65	52.48
29	3.30	2.86	2.86	2.74	2.86	2.82	2.97	2.65	51.45
30	3.30	2.86	2.86	2.74	2.86	2.82	2.97	1.00	48.71
31	3.30	2.86	2.86	2.74	2.86	2.82	2.97	2.65	52.48
32	2.00	1.72	1.72	1.00	1.00	1.00	2.97	1.00	35.81

## Lampiran 4: Deskriptif Jawaban Responden

### 1. Variabel : Penerapan Karakteristik Fungsi Audit Internal

#### A. Berdasarkan Wilayah

Dimensi	Jabatan	Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
			Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
			f	%	f	%	f	%	f	%	
INDEPENDENSI	Inspektorat 1	A1	7	87.50		-	1	12.50	8	100.00	
		A2	8	100.00		-		-	8	100.00	
		A3	7	87.50		-	1	12.50	8	100.00	
		A4	7	87.50	1	12.50		-	8	100.00	
		A5	7	87.50	1	12.50		-	8	100.00	
		A6	5	62.50	1	12.50	2	25.00	8	100.00	
		A7	7	87.50	1	12.50		-	8	100.00	
		SubTotal	48	85.71	4	7.14	4	7.14	56	100.00	2.79
	Inspektorat 2	A1	8	88.89		-	1	11.11	9	100.00	
		A2	9	100.00		-		-	9	100.00	
		A3	7	77.78	1	11.11	1	11.11	9	100.00	
		A4	7	77.78	1	11.11	1	11.11	9	100.00	
		A5	8	88.89		-	1	11.11	9	100.00	
		A6	5	55.56	1	11.11	3	33.33	9	100.00	
		A7	8	88.89		-	1	11.11	9	100.00	
		SubTotal	52	82.54	3	4.76	8	12.70	63	100.00	2.70
	Inspektorat 3	A1	7	100.00		-		-	7	100.00	
		A2	7	100.00		-		-	7	100.00	
		A3	5	71.43		-	2	28.57	7	100.00	
		A4	5	71.43	1	14.29	1	14.29	7	100.00	
		A5	6	85.71		-	1	14.29	7	100.00	
		A6	4	57.14		-	3	42.86	7	100.00	
		A7	6	85.71		-	1	14.29	7	100.00	
		SubTotal	40	81.63	1	2.04	8	16.33	49	100.00	2.65
	Inspektorat 4	A1	6	75.00		-	2	25.00	8	100.00	
		A2	6	75.00		-	2	25.00	8	100.00	
		A3	6	75.00	1	12.50	1	12.50	8	100.00	
		A4	6	75.00	1	12.50	1	12.50	8	100.00	
A5		6	75.00		-	2	25.00	8	100.00		
A6		5	62.50		-	3	37.50	8	100.00		
A7		6	75.00		-	2	25.00	8	100.00		
SubTotal		41	73.21	2	3.57	13	23.21	56	100.00	2.50	
Total		181	80.80	10	4.46	33	14.73	224	100.00	2.66	
KOMPETENSI	Inspektorat 1	A8	1	12.50	2	25.00	5	62.50	8	100.00	
		A9	2	25.00	3	37.50	3	37.50	8	100.00	
		A10	2	25.00	2	25.00	4	50.00	8	100.00	
		A11	4	50.00		-	4	50.00	8	100.00	
		A12	3	37.50	2	25.00	3	37.50	8	100.00	
		A13	4	50.00	1	12.50	3	37.50	8	100.00	
		A14	1	12.50		-	7	87.50	8	100.00	
		A15	4	50.00		-	4	50.00	8	100.00	
	SubTotal	21	32.81	10	15.63	33	51.56	64	100.00	1.81	
	Inspektorat 2	A8	4	44.44	1	11.11	4	44.44	9	100.00	
		A9	4	44.44	1	11.11	4	44.44	9	100.00	
		A10	6	66.67	1	11.11	2	22.22	9	100.00	
		A11	7	77.78		-	2	22.22	9	100.00	
		A12	7	77.78		-	2	22.22	9	100.00	
		A13	5	55.56		-	4	44.44	9	100.00	
		A14	6	66.67		-	3	33.33	9	100.00	
		A15	8	88.89		-	1	11.11	9	100.00	
	SubTotal	47	65.28	3	4.17	22	30.56	72	100.00	2.35	
	Inspektorat 3	A8	6	85.71	1	14.29		-	7	100.00	
		A9	6	85.71	1	14.29		-	7	100.00	
		A10	7	100.00		-		-	7	100.00	
		A11	5	71.43		-	2	28.57	7	100.00	
		A12		-	2	28.57	5	71.43	7	100.00	
		A13	2	28.57		-	5	71.43	7	100.00	
		A14	1	14.29		-	6	85.71	7	100.00	
		A15	4	57.14		-	3	42.86	7	100.00	
	SubTotal	31	58.36	4	7.14	21	37.50	56	100.00	2.18	
	Inspektorat 4	A8	2	25.00		-	6	75.00	8	100.00	
A9		5	62.50	2	25.00	1	12.50	8	100.00		
A10		4	50.00	1	12.50	3	37.50	8	100.00		
A11		5	62.50		-	3	37.50	8	100.00		
A12		4	50.00	3	37.50	1	12.50	8	100.00		
A13		4	50.00		-	4	50.00	8	100.00		
A14		2	25.00		-	6	75.00	8	100.00		
A15		4	50.00		-	4	50.00	8	100.00		
SubTotal	30	46.88	6	9.38	28	43.75	64	100.00	2.03		
Total		129	50.39	23	8.98	104	40.63	256	100.00	2.10	

Dimensi	Jabatan	Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata		
			Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%			
			f	%	f	%	f	%	f	%			
PELAKSANAAN AUDIT	Inspektorat 1	A16	7	87.50			1		12.50	8	100.00		
		A17	7	87.50			1		12.50	8	100.00		
		A18	1	12.50			7		87.50	8	100.00		
		A19	8	100.00						8	100.00		
		SubTotal	23	71.88	0		9		28.13	32	100.00	2.44	
	Inspektorat 2	A16	8	88.89			1		11.11	9	100.00		
		A17	8	88.89			1		11.11	9	100.00		
		A18	2	22.22	2	22.22	5		55.56	9	100.00		
		A19	9	100.00						9	100.00		
		SubTotal	27	75.00	2	5.56	7		19.44	36	100.00	2.56	
	Inspektorat 3	A16	6	85.71			1		14.29	7	100.00		
		A17	7	100.00						7	100.00		
		A18					7	100.00		7	100.00		
		A19	7	100.00						7	100.00		
		SubTotal	20	71.43	0		8		28.57	28	100.00	2.43	
	Inspektorat 4	A16	6	75.00			2		25.00	8	100.00		
		A17	6	75.00			2		25.00	8	100.00		
		A18	3	37.50			5		62.50	8	100.00		
		A19	6	75.00			2		25.00	8	100.00		
		SubTotal	21	65.63	0		11		34.38	32	100.00	2.31	
Total	91	71.09	2	1.56	35		27.34	128	100.00	2.44			
PELAKSANAAN REKOMENDASI	Inspektorat 1	A20	8	100.00						8	100.00		
		A21	7	87.50	1	12.50				8	100.00		
		SubTotal	15	93.75	1	6.25	0			16	100.00	2.94	
		A20	8	88.89			1		11.11	9	100.00		
		A21	8	88.89			1		11.11	9	100.00		
	Inspektorat 2	SubTotal	16	88.89	0		2		11.11	18	100.00	2.78	
		A20	7	100.00						7	100.00		
		A21	5	71.43	2	28.57				7	100.00		
		SubTotal	12	85.71	2	14.29	0			14	100.00	2.86	
		Inspektorat 3	A20	8	100.00						8	100.00	
	A21		7	87.50	1	12.50				8	100.00		
	SubTotal		15	93.75	1	6.25	0			16	100.00	2.94	
	Inspektorat 4		A20	8	100.00						8	100.00	
			A21	7	87.50	1	12.50				8	100.00	
		SubTotal	15	93.75	1	6.25	0			16	100.00	2.94	
		Total	58	90.63	4	6.25	2		3.13	64	100.00	2.88	

B. Berdasarkan Jabatan

Dimensi	Jabatan	Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata	
			Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%		
			f	%	f	%	f	%	f	%		
INDEPENDENSI	Auditor Pelaksana Lanjutan	A1	1	100.00						1	100.00	
		A2	1	100.00						1	100.00	
		A3	1	100.00						1	100.00	
		A4	1	100.00						1	100.00	
		A5	1	100.00						1	100.00	
		A6	1	100.00						1	100.00	
		A7	1	100.00						1	100.00	
		SubTotal	7	100.00	0		0			7	100.00	3.00
	Auditor Ahli Pertama	A1	2	100.00						2	100.00	
		A2	2	100.00						2	100.00	
		A3	2	100.00						2	100.00	
		A4	2	100.00						2	100.00	
		A5	2	100.00						2	100.00	
		A6	1	50.00			1	50.00		2	100.00	
		A7	2	100.00						2	100.00	
		SubTotal	13	92.86	0		1	7.14		14	100.00	2.86
	Auditor Ahli Muda	A1	4	57.14			3	42.86		7	100.00	
		A2	5	71.43			2	28.57		7	100.00	
		A3	4	57.14	1	14.29	2	28.57		7	100.00	
		A4	4	57.14	1	14.29	2	28.57		7	100.00	
		A5	4	57.14			3	42.86		7	100.00	
		A6	2	28.57	1	14.29	4	57.14		7	100.00	
		A7	4	57.14			3	42.86		7	100.00	
		SubTotal	27	55.10	3	6.12	19	38.78		49	100.00	2.16
	Auditor Ahli Madya	A1	20	95.24			1	4.76		21	100.00	
		A2	21	100.00						21	100.00	
		A3	17	80.95	2	9.52	2	9.52		21	100.00	
		A4	17	80.95	3	14.29	1	4.76		21	100.00	
		A5	19	90.48	1	4.76	1	4.76		21	100.00	
		A6	15	71.43	1	4.76	5	23.81		21	100.00	
		A7	19	90.48	1	4.76	1	4.76		21	100.00	
		SubTotal	128	87.07	8	5.44	11	7.48		147	100.00	2.80
	Auditor Ahli Utama	A1	1	100.00						1	100.00	
		A2	1	100.00						1	100.00	
		A3	1	100.00						1	100.00	
		A4	1	100.00						1	100.00	
		A5	1	100.00						1	100.00	
		A6					1	100.00		1	100.00	
		A7	1	100.00						1	100.00	
		SubTotal	6	85.71	0		1	14.29		7	100.00	2.71
Total	181	80.80	11	4.91	32	14.29		224	100.00	2.67		

Dimensi	Jabatan	Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata	
			Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%		
			f	%	f	%	f	%	f	%		
KOMPETENSI	Auditor Pelaksana Lanjutan	A8	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
		A9	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
		A10	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
		A11	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
		A12	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
		A13	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
		A14	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
		A15	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
	SubTotal	8	100.00	0	-	0	-	8	100.00	3.00		
	Auditor Ahli Pertama	A8	1	50.00	-	-	1	50.00	2	100.00		
		A9	1	50.00	-	-	1	50.00	2	100.00		
		A10	1	50.00	1	50.00	-	-	2	100.00		
		A11	1	50.00	-	-	1	50.00	2	100.00		
		A12	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00		
		A13	1	50.00	-	-	1	50.00	2	100.00		
		A14	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00		
		A15	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00		
	SubTotal	11	68.75	1	6.25	4	25.00	16	100.00	2.44		
	Auditor Ahli Muda	A8	2	28.57	1	14.29	4	57.14	7	100.00		
		A9	3	42.86	1	14.29	3	42.86	7	100.00		
		A10	3	42.86	1	14.29	3	42.86	7	100.00		
		A11	2	28.57	-	-	5	71.43	7	100.00		
		A12	1	14.29	2	28.57	4	57.14	7	100.00		
		A13	2	28.57	-	-	5	71.43	7	100.00		
		A14	1	14.29	-	-	6	85.71	7	100.00		
		A15	2	28.57	-	-	5	71.43	7	100.00		
	SubTotal	16	28.57	5	8.93	35	62.50	56	100.00	1.66		
	Auditor Ahli Madya	A8	9	42.86	3	14.29	9	42.86	21	100.00		
		A9	12	57.14	5	23.81	4	19.05	21	100.00		
		A10	14	66.67	2	9.52	5	23.81	21	100.00		
		A11	16	76.19	-	-	5	23.81	21	100.00		
		A12	9	42.86	5	23.81	7	33.33	21	100.00		
		A13	10	47.62	1	4.76	10	47.62	21	100.00		
		A14	5	23.81	-	-	16	76.19	21	100.00		
		A15	14	66.67	-	-	7	33.33	21	100.00		
	SubTotal	89	52.98	16	9.52	63	37.50	168	100.00	2.15		
	Auditor Ahli Utama	A8	-	-	-	-	1	100.00	1	100.00		
		A9	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00		
		A10	-	-	-	-	1	100.00	1	100.00		
		A11	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
		A12	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
		A13	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
		A14	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
		A15	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
	SubTotal	5	62.50	1	12.50	2	25.00	8	100.00	2.38		
Total		129	50.39	23	8.98	104	40.63	256	100.00	2.10		
PELAKSANAAN AUDIT	Auditor Pelaksana Lanjutan	A16	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
		A17	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
		A18	-	-	1	100.00	-	-	-	1	100.00	
		A19	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
	SubTotal	3	75.00	1	25.00	0	-	4	100.00	2.75		
	Auditor Ahli Pertama	A16	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00		
		A17	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00		
		A18	1	50.00	1	50.00	-	-	2	100.00		
		A19	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00		
	SubTotal	7	87.50	1	12.50	0	-	8	100.00	2.88		
	Auditor Ahli Muda	A16	5	71.43	-	-	2	28.57	7	100.00		
		A17	5	71.43	-	-	2	28.57	7	100.00		
		A18	1	14.29	-	-	6	85.71	7	100.00		
		A19	5	71.43	-	-	2	28.57	7	100.00		
	SubTotal	16	57.14	0	-	12	42.86	28	100.00	2.14		
	Auditor Ahli Madya	A16	19	90.48	-	-	2	9.52	21	100.00		
		A17	20	95.24	-	-	1	4.76	21	100.00		
		A18	4	19.05	-	-	17	80.95	21	100.00		
		A19	21	100.00	-	-	-	-	21	100.00		
	SubTotal	64	76.19	0	-	20	23.81	84	100.00	2.52		
	Auditor Ahli Utama	A16	-	-	-	-	1	100.00	1	100.00		
		A17	-	-	-	-	1	100.00	1	100.00		
		A18	-	-	-	-	1	100.00	1	100.00		
		A19	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
SubTotal	1	25.00	0	-	3	75.00	4	100.00	1.50			
Total		91	71.09	2	1.56	35	27.34	128	100.00	2.44		

Dimensi	Jabatan	Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
			Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
			f	%	f	%	f	%	f	%	
PELAKSANAAN REKOMENDASI	Auditor Pelaksana Lanjutan	A20	1	100.00		-		-	1	100.00	
		A21	1	100.00		-		-	1	100.00	
		SubTotal	2	100.00	0	-	0	-	2	100.00	3.00
	Auditor Ahli Pertama	A20	2	100.00		-		-	2	100.00	
		A21	2	100.00		-		-	2	100.00	
		SubTotal	4	100.00	0	-	0	-	4	100.00	3.00
	Auditor Ahli Muda	A20	4	57.14	2	28.57	1	14.29	7	100.00	
		A21	6	85.71		-	1	14.29	7	100.00	
		SubTotal	10	71.43	2	14.29	2	14.29	14	100.00	2.57
	Auditor Ahli Madya	A20	19	90.48	2	9.52		-	21	100.00	
		A21	21	100.00		-		-	21	100.00	
		SubTotal	40	95.24	2	4.76	0	-	42	100.00	2.95
	Auditor Ahli Utama	A20	1	100.00		-		-	1	100.00	
		A21	1	100.00		-		-	1	100.00	
		SubTotal	2	100.00	0	-	0	-	2	100.00	3.00
Total			23	88.46	2	7.69	1	3.85	26	100.00	2.85

C. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Dimensi	Jabatan	Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
			Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
			f	%	f	%	f	%	f	%	
INDEPENDENSI	SMU	A1	1	100.00		-		-	1	100.00	
		A2	1	100.00		-		-	1	100.00	
		A3	1	100.00		-		-	1	100.00	
		A4	1	100.00		-		-	1	100.00	
		A5	1	100.00		-		-	1	100.00	
		A6	1	100.00		-		-	1	100.00	
		A7	1	100.00		-		-	1	100.00	
		SubTotal	7	100.00	0	-	0	-	7	100.00	3.00
	S1	A1	21	84.00		-	4	16.00	25	100.00	
		A2	23	92.00		-	2	8.00	25	100.00	
		A3	19	76.00	3	12.00	3	12.00	25	100.00	
		A4	19	76.00	4	16.00	2	8.00	25	100.00	
		A5	20	80.00	1	4.00	4	16.00	25	100.00	
		A6	14	56.00	2	8.00	9	36.00	25	100.00	
		A7	20	80.00	1	4.00	4	16.00	25	100.00	
		SubTotal	136	77.71	11	6.29	28	16.00	175	100.00	2.62
	S2	A1	6	100.00		-		-	6	100.00	
		A2	6	100.00		-		-	6	100.00	
		A3	5	83.33		-	1	16.67	6	100.00	
		A4	5	83.33		-	1	16.67	6	100.00	
		A5	4	66.67		-	2	33.33	6	100.00	
A6		6	100.00		-		-	6	100.00		
A7		6	100.00		-		-	6	100.00		
SubTotal		38	90.48	0	-	4	9.52	42	100.00	2.91	
Total			161	80.80	11	4.91	32	14.29	224	100.00	2.67
KOMPETENSI	SMU	A8	1	100.00		-		-	1	100.00	
		A9	1	100.00		-		-	1	100.00	
		A10	1	100.00		-		-	1	100.00	
		A11	1	100.00		-		-	1	100.00	
		A12	1	100.00		-		-	1	100.00	
		A13	1	100.00		-		-	1	100.00	
		A14	1	100.00		-		-	1	100.00	
		A15	1	100.00		-		-	1	100.00	
	SubTotal	8	100.00	0	-	0	-	8	100.00	3.00	
	S1	A8	9	36.00	4	16.00	12	48.00	25	100.00	
		A9	12	48.00	6	24.00	7	28.00	25	100.00	
		A10	14	56.00	3	12.00	8	32.00	25	100.00	
		A11	15	60.00		-	10	40.00	25	100.00	
		A12	8	32.00	7	28.00	10	40.00	25	100.00	
		A13	10	40.00	1	4.00	14	56.00	25	100.00	
		A14	6	24.00		-	19	76.00	25	100.00	
		A15	13	52.00		-	12	48.00	25	100.00	
	SubTotal	87	43.50	21	10.50	92	46.00	200	100.00	1.98	
	S2	A8	3	50.00		-	3	50.00	6	100.00	
		A9	4	66.67	1	16.67	1	16.67	6	100.00	
		A10	4	66.67	1	16.67	1	16.67	6	100.00	
A11		5	83.33		-	1	16.67	6	100.00		
A12		5	83.33		-	1	16.67	6	100.00		
A13		4	66.67		-	2	33.33	6	100.00		
A14		3	50.00		-	3	50.00	6	100.00		
A15		6	100.00		-		-	6	100.00		
SubTotal	34	70.83	2	4.17	12	25.00	48	100.00	2.46		
Total			129	50.39	23	8.98	104	40.63	256	100.00	2.10

Dimensi	Jabatan	Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
			Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
			f	%	f	%	f	%			
PELAKSANAAN AUDIT	SMU	A16	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		A17	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		A18	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	
		A19	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		SubTotal	3	75.00	1	25.00	0	-	4	100.00	2.75
	S1	A16	21	84.00	-	-	4	16.00	25	100.00	
		A17	22	88.00	-	-	3	12.00	25	100.00	
		A18	5	20.00	-	-	20	80.00	25	100.00	
		A19	23	92.00	-	-	2	8.00	25	100.00	
		SubTotal	71	71.00	0	-	29	29.00	100	100.00	2.42
	S2	A16	5	83.33	-	-	1	16.67	6	100.00	
		A17	5	83.33	-	-	1	16.67	6	100.00	
		A18	1	16.67	1	16.67	4	66.67	6	100.00	
		A19	6	100.00	-	-	-	-	6	100.00	
		SubTotal	17	70.83	1	4.17	6	25.00	24	100.00	2.46
Total		91	71.09	2	1.56	35	27.34	128	100.00	2.44	
PELAKSANAAN REKOMENDASI	SMU	A20	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		A21	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		SubTotal	2	100.00	0	-	0	-	2	100.00	3.00
	S1	A20	20	80.00	4	16.00	1	4.00	25	100.00	
		A21	24	96.00	-	-	1	4.00	25	100.00	
		SubTotal	44	88.00	4	8.00	2	4.00	50	100.00	2.84
	S2	A20	6	100.00	-	-	-	-	6	100.00	
		A21	6	100.00	-	-	-	-	6	100.00	
		SubTotal	12	100.00	0	-	0	-	12	100.00	3.00
	Total		58	90.63	4	6.25	2	3.13	64	100.00	2.88

## 2. Variabel : Peran Audit Internal

### A. Berdasarkan Wilayah

Dimensi	Jabatan	Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
			Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
			f	%	f	%	f	%			
Audit Kinerja	Inspektorat 1	B1	8	100.00	-	-	-	-	8	100.00	
		B2	6	75.00	-	-	2	25.00	8	100.00	
		B3	6	75.00	-	-	2	25.00	8	100.00	
		B4	8	100.00	-	-	-	-	8	100.00	
		B5	8	100.00	-	-	-	-	8	100.00	
		B6	8	100.00	-	-	-	-	8	100.00	
		SubTotal	44	91.67	0	-	4	8.33	48	100.00	2.83
	Inspektorat 2	B1	9	100.00	-	-	-	-	9	100.00	
		B2	5	55.56	-	-	4	44.44	9	100.00	
		B3	5	55.56	-	-	4	44.44	9	100.00	
		B4	9	100.00	-	-	-	-	9	100.00	
		B5	9	100.00	-	-	-	-	9	100.00	
		B6	9	100.00	-	-	-	-	9	100.00	
	SubTotal	46	85.19	0	-	8	14.81	54	100.00	2.70	
	Inspektorat 3	B1	5	71.43	-	-	2	28.57	7	100.00	
		B2	4	57.14	-	-	3	42.86	7	100.00	
		B3	4	57.14	-	-	3	42.86	7	100.00	
		B4		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		B5		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		B6		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		SubTotal	13	61.90	0	-	8	38.10	21	100.00	2.24
	Inspektorat 4	B1	5	62.50	-	-	3	37.50	8	100.00	
		B2	5	62.50	-	-	3	37.50	8	100.00	
		B3	4	50.00	-	-	4	50.00	8	100.00	
B4			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	#DIV/0!		
B5			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	#DIV/0!		
B6			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0	#DIV/0!		
SubTotal	14	58.33	0	-	10	41.67	24	100.00	2.17		
Total		117	79.59	0	-	30	20.41	147	100.00	2.59	



Dimensi	Jabatan	Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
			Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
			f	%	f	%	f	%			
Peran Konsultan dan Katalis	Inspektorat 1	B7	6	75.00	-	-	2	25.00	8	100.00	
		B8	6	75.00	-	-	2	25.00	8	100.00	
		B9	4	50.00	-	-	4	50.00	8	100.00	
		B10	2	25.00	-	-	6	75.00	8	100.00	
		B11	3	37.50	-	-	5	62.50	8	100.00	
		B12	3	37.50	-	-	5	62.50	8	100.00	
		B13	7	87.50	-	-	1	12.50	8	100.00	
	SubTotal	31	55.36	0	-	25	44.64	56	100.00	2.11	
	Inspektorat 2	B7	6	66.67	-	-	3	33.33	9	100.00	
		B8	6	66.67	-	-	3	33.33	9	100.00	
		B9	6	66.67	-	-	3	33.33	9	100.00	
		B10	1	11.11	-	-	8	88.89	9	100.00	
		B11	3	33.33	-	-	6	66.67	9	100.00	
		B12	1	11.11	-	-	8	88.89	9	100.00	
		B13	6	66.67	-	-	3	33.33	9	100.00	
	SubTotal	29	46.03	0	-	34	53.97	63	100.00	1.92	
	Inspektorat 3	B7	6	85.71	-	-	1	14.29	7	100.00	
		B8	7	100.00	-	-	-	-	7	100.00	
		B9	5	71.43	-	-	2	28.57	7	100.00	
		B10	3	42.86	-	-	4	57.14	7	100.00	
		B11	5	71.43	-	-	2	28.57	7	100.00	
		B12	5	71.43	-	-	2	28.57	7	100.00	
		B13	7	100.00	-	-	-	-	7	100.00	
	SubTotal	38	77.55	0	-	11	22.45	49	100.00	2.55	
	Inspektorat 4	B7	5	62.50	-	-	3	37.50	8	100.00	
		B8	5	62.50	-	-	3	37.50	8	100.00	
		B9	5	62.50	-	-	3	37.50	8	100.00	
		B10	2	25.00	-	-	6	75.00	8	100.00	
		B11	3	37.50	-	-	5	62.50	8	100.00	
		B12	5	62.50	-	-	3	37.50	8	100.00	
		B13	5	62.50	-	-	3	37.50	8	100.00	
	SubTotal	30	53.57	0	-	26	46.43	56	100.00	2.07	
	Total	128	57.14	0	-	96	42.86	224	100.00	2.14	

## B. Berdasarkan Jabatan

Dimensi	Jabatan	Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
			Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
			f	%	f	%	f	%			
Audit Kinerja	Auditor Pelaksana Lanjutan	B1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		B2	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		B3	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		B4	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		B5	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		B6	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
	SubTotal	6	100.00	0	-	0	-	6	100.00	3.00	
	Auditor Ahli Pertama	B1	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00	
		B2	1	50.00	-	-	1	50.00	2	100.00	
		B3	1	50.00	-	-	1	50.00	2	100.00	
		B4	1	50.00	-	-	1	50.00	2	100.00	
		B5	1	50.00	-	-	1	50.00	2	100.00	
		B6	1	50.00	-	-	1	50.00	2	100.00	
	SubTotal	7	58.33	0	-	5	41.67	12	100.00	2.17	
	Auditor Ahli Muda	B1	4	57.14	-	-	3	42.86	7	100.00	
		B2	4	57.14	-	-	3	42.86	7	100.00	
		B3	3	42.86	-	-	4	57.14	7	100.00	
		B4	3	42.86	-	-	4	57.14	7	100.00	
		B5	2	28.57	-	-	5	71.43	7	100.00	
		B6	3	42.86	-	-	4	57.14	7	100.00	
	SubTotal	19	45.24	0	-	23	54.76	42	100.00	1.90	
	Auditor Ahli Madya	B1	19	90.48	-	-	2	9.52	21	100.00	
		B2	13	61.90	-	-	8	38.10	21	100.00	
		B3	12	57.14	-	-	9	42.86	21	100.00	
B4		13	61.90	-	-	8	38.10	21	100.00		
B5		14	66.67	-	-	7	33.33	21	100.00		
B6		17	80.95	-	-	4	19.05	21	100.00		
SubTotal	88	69.84	0	-	38	30.16	126	100.00	2.40		
Auditor Ahli Utama	B1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
	B2	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
	B3	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
	B4	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
	B5	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
	B6	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
SubTotal	6	100.00	0	-	0	-	6	100.00	3.00		
Total	126	65.63	0	-	66	34.38	192	100.00	2.31		

Dimensi	Jabatan	Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
			Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
			f	%	f	%	f	%			
Peran Konsultan dan Katalis	Auditor Pelaksana Lanjutan	B7	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		B8	-	-	-	-	1	100.00	1	100.00	
		B9	-	-	-	-	1	100.00	1	100.00	
		B10	-	-	-	-	1	100.00	1	100.00	
		B11	-	-	-	-	1	100.00	1	100.00	
		B12	-	-	-	-	1	100.00	1	100.00	
		B13	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
	SubTotal	2	28.57	0	-	5	71.43	7	100.00	1.57	
	Auditor Ahli Pertama	B7	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00	
		B8	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00	
		B9	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00	
		B10	1	50.00	-	-	1	50.00	2	100.00	
		B11	1	50.00	-	-	1	50.00	2	100.00	
		B12	1	50.00	-	-	1	50.00	2	100.00	
		B13	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00	
	SubTotal	11	78.57	0	-	3	21.43	14	100.00	2.57	
	Auditor Ahli Muda	B7	2	28.57	-	-	5	71.43	7	100.00	
		B8	4	57.14	-	-	3	42.86	7	100.00	
		B9	3	42.86	-	-	4	57.14	7	100.00	
		B10	1	14.29	-	-	6	85.71	7	100.00	
		B11	4	57.14	-	-	3	42.86	7	100.00	
		B12	2	28.57	-	-	5	71.43	7	100.00	
		B13	4	57.14	-	-	3	42.86	7	100.00	
	SubTotal	20	40.82	0	-	29	59.18	49	100.00	1.82	
	Auditor Ahli Madya	B7	17	80.95	-	-	4	19.05	21	100.00	
		B8	17	80.95	-	-	4	19.05	21	100.00	
		B9	14	66.67	-	-	7	33.33	21	100.00	
		B10	5	23.81	-	-	16	76.19	21	100.00	
		B11	9	42.86	-	-	12	57.14	21	100.00	
		B12	11	52.38	-	-	10	47.62	21	100.00	
		B13	17	80.95	-	-	4	19.05	21	100.00	
	SubTotal	90	61.22	0	-	57	38.78	147	100.00	2.22	
	Auditor Ahli Utama	B7	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		B8	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		B9	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		B10	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		B11	-	-	-	-	1	100.00	1	100.00	
		B12	-	-	-	-	1	100.00	1	100.00	
		B13	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
	SubTotal	5	71.43	0	-	2	28.57	7	100.00	2.43	
	<b>Total</b>		<b>128</b>	<b>57.14</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>96</b>	<b>42.86</b>	<b>224</b>	<b>100.00</b>	<b>2.14</b>

### C. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Dimensi	Jabatan	Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
			Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
			f	%	f	%	f	%			
Audit Kinerja	SMU	B1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		B2	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		B3	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		B4	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00	
		B5	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		B6	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		SubTotal	5	83.33	1	16.67	0	-	6	100.00	2.83
	S1	B1	20	80.00	-	-	5	20.00	25	100.00	
		B2	15	60.00	-	-	10	40.00	25	100.00	
		B3	12	48.00	-	-	13	52.00	25	100.00	
		B4	15	60.00	-	-	10	40.00	25	100.00	
		B5	15	60.00	-	-	10	40.00	25	100.00	
		B6	18	72.00	-	-	7	28.00	25	100.00	
		SubTotal	95	63.33	0	-	55	36.67	150	100.00	2.27
	S2	B1	6	100.00	-	-	-	-	6	100.00	
		B2	4	66.67	-	-	2	33.33	6	100.00	
		B3	5	83.33	-	-	1	16.67	6	100.00	
		B4	3	50.00	-	-	3	50.00	6	100.00	
		B5	3	50.00	-	-	3	50.00	6	100.00	
		B6	4	66.67	-	-	2	33.33	6	100.00	
		SubTotal	25	69.44	0	-	11	30.56	36	100.00	2.39
<b>Total</b>		<b>125</b>	<b>65.10</b>	<b>1</b>	<b>0.52</b>	<b>66</b>	<b>34.38</b>	<b>192</b>	<b>100.00</b>	<b>2.31</b>	

Dimensi	Jabatan	Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata	
			Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%		
			f	%	f	%	f	%	f	%		
Peran Konsultan dan Katalis	SMU	B7	1	100.00		-		-		1	100.00	
		B8		-		-	1	100.00	1	100.00		
		B9		-		-	1	100.00	1	100.00		
		B10		-		-	1	100.00	1	100.00		
		B11		-		-	1	100.00	1	100.00		
		B12		-		-	1	100.00	1	100.00		
		B13	1	100.00		-		-	1	100.00		
	SubTotal	2	28.57	0	-	5	71.43	7	100.00	1.57		
	S1	B7	17	68.00		-	8	32.00	25	100.00		
		B8	19	76.00		-	6	24.00	25	100.00		
		B9	16	64.00		-	9	36.00	25	100.00		
		B10	6	24.00		-	19	76.00	25	100.00		
		B11	13	52.00		-	12	48.00	25	100.00		
		B12	12	48.00		-	13	52.00	25	100.00		
		B13	19	76.00		-	6	24.00	25	100.00		
	SubTotal	102	58.29	0	-	73	41.71	175	100.00	2.17		
	S2	B7	5	83.33		-	1	16.67	6	100.00		
		B8	5	83.33		-	1	16.67	6	100.00		
		B9	4	66.67		-	2	33.33	6	100.00		
		B10	2	33.33		-	4	66.67	6	100.00		
		B11	1	16.67		-	5	83.33	6	100.00		
		B12	2	33.33		-	4	66.67	6	100.00		
		B13	5	83.33		-	1	16.67	6	100.00		
	SubTotal	24	57.14	0	-	18	42.86	42	100.00	2.14		
Total		128	57.14	0	-	96	42.86	224	100.00	2.14		

### 3. Variabel : Kualitas *Good Governance*

#### A. Berdasarkan Wilayah

Dimensi	Jabatan	Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
			Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
			f	%	f	%	f	%	f	%	
TRANSPARANSI	Inspektorat 1	C1	6	75.00		-	2	25.00	8	100.00	
		C2		-	2	25.00	6	75.00	8	100.00	
		C3	1	12.50	3	37.50	4	50.00	8	100.00	
		C4	2	25.00	3	37.50	3	37.50	8	100.00	
		C5	3	37.50	2	25.00	3	37.50	8	100.00	
		SubTotal	12	30.00	10	25.00	18	45.00	40	100.00	1.85
	Inspektorat 2	C1	6	66.67	2	22.22	1	11.11	9	100.00	
		C2	2	22.22	2	22.22	5	55.56	9	100.00	
		C3	3	33.33	2	22.22	4	44.44	9	100.00	
		C4	5	55.56	2	22.22	2	22.22	9	100.00	
		C5	4	44.44	2	22.22	3	33.33	9	100.00	
	SubTotal	20	44.44	10	22.22	15	33.33	45	100.00	2.11	
	Inspektorat 3	C1	4	57.14		-	3	42.86	7	100.00	
		C2	1	14.29	3	42.86	3	42.86	7	100.00	
		C3		-	4	57.14	3	42.86	7	100.00	
		C4		-	5	71.43	2	28.57	7	100.00	
		C5	2	28.57	3	42.86	2	28.57	7	100.00	
	SubTotal	7	20.00	15	42.86	13	37.14	35	100.00	1.83	
	Inspektorat 4	C1	4	50.00	2	25.00	2	25.00	8	100.00	
		C2	2	25.00	1	12.50	5	62.50	8	100.00	
C3		2	25.00	3	37.50	3	37.50	8	100.00		
C4		3	37.50	3	37.50	2	25.00	8	100.00		
C5		3	37.50	3	37.50	2	25.00	8	100.00		
SubTotal	14	35.00	12	30.00	14	35.00	40	100.00	2.00		
Total		53	33.13	47	29.38	60	37.50	160	100.00	1.96	

Dimensi	Jabatan	Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata	
			Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%		
			f	%	f	%	f	%	f	%		
AKUNTABILITAS	Inspektorat 1	C6	8	100.00	-	-	-	-	8	100.00		
		C7	8	100.00	-	-	-	-	8	100.00		
		C8	6	75.00	1	12.50	1	12.50	8	100.00		
		C9	7	87.50	1	12.50	-	-	8	100.00		
		C10	8	100.00	-	-	-	-	8	100.00		
		C11	7	87.50	1	12.50	-	-	8	100.00		
		C12	8	100.00	-	-	-	-	8	100.00		
		C13	7	87.50	-	-	1	12.50	8	100.00		
		SubTotal	59	92.19	3	4.69	2	3.13	64	100.00	2.89	
	Inspektorat 2	C6	8	88.89	1	11.11	-	-	9	100.00		
		C7	9	100.00	-	-	-	-	9	100.00		
		C8	7	77.78	1	11.11	1	11.11	9	100.00		
		C9	9	100.00	-	-	-	-	9	100.00		
		C10	9	100.00	-	-	-	-	9	100.00		
		C11	7	77.78	1	11.11	1	11.11	9	100.00		
		C12	6	66.67	1	11.11	2	22.22	9	100.00		
		C13	9	100.00	-	-	-	-	9	100.00		
		SubTotal	64	88.89	4	5.56	4	5.56	72	100.00	2.83	
	Inspektorat 3	C6	4	57.14	1	14.29	2	28.57	7	100.00		
		C7	5	71.43	2	28.57	-	-	7	100.00		
		C8	4	57.14	1	14.29	2	28.57	7	100.00		
		C9	5	71.43	1	14.29	1	14.29	7	100.00		
		C10	6	85.71	-	-	1	14.29	7	100.00		
		C11	2	28.57	3	42.86	2	28.57	7	100.00		
		C12	3	42.86	-	-	4	57.14	7	100.00		
		C13	2	28.57	2	28.57	3	42.86	7	100.00		
		SubTotal	31	55.36	10	17.86	15	26.79	56	100.00	2.79	
	Inspektorat 4	C6	5	62.50	2	25.00	1	12.50	8	100.00		
		C7	7	87.50	1	12.50	-	-	8	100.00		
		C8	8	100.00	-	-	-	-	8	100.00		
		C9	7	87.50	-	-	1	12.50	8	100.00		
		C10	7	87.50	-	-	1	12.50	8	100.00		
		C11	3	37.50	4	50.00	1	12.50	8	100.00		
		C12	5	62.50	2	25.00	1	12.50	8	100.00		
		C13	4	50.00	1	12.50	3	37.50	8	100.00		
		SubTotal	46	71.88	10	15.63	8	12.50	64	100.00	2.59	
	Total	200	78.13	27	10.55	29	11.33	256	100.00	2.67		
	KEEFISIENAN & KEEFEKTIFAN	Inspektorat 1	C14	7	87.50	1	12.50	-	-	8	100.00	
			C15	7	87.50	-	-	1	12.50	8	100.00	
			C16	8	100.00	-	-	-	-	8	100.00	
			C17	8	100.00	-	-	-	-	8	100.00	
			C18	5	62.50	-	-	3	37.50	8	100.00	
		SubTotal	35	87.50	1	2.50	4	10.00	40	100.00	2.78	
		Inspektorat 2	C14	5	55.56	1	11.11	3	33.33	9	100.00	
			C15	5	55.56	2	22.22	2	22.22	9	100.00	
			C16	8	88.89	-	-	1	11.11	9	100.00	
C17			7	77.78	-	-	2	22.22	9	100.00		
C18			5	55.56	1	11.11	3	33.33	9	100.00		
SubTotal		30	66.67	4	8.89	11	24.44	45	100.00	2.42		
Inspektorat 3		C14	4	57.14	-	-	3	42.86	7	100.00		
		C15	5	71.43	1	14.29	1	14.29	7	100.00		
		C16	6	85.71	-	-	1	14.29	7	100.00		
		C17	6	85.71	-	-	1	14.29	7	100.00		
		C18	2	28.57	-	-	5	71.43	7	100.00		
SubTotal		23	65.71	1	2.86	11	31.43	35	100.00	2.34		
Inspektorat 4		C14	4	50.00	-	-	4	50.00	8	100.00		
		C15	5	62.50	-	-	3	37.50	8	100.00		
		C16	5	62.50	-	-	3	37.50	8	100.00		
		C17	8	100.00	-	-	-	-	8	100.00		
		C18	2	25.00	-	-	6	75.00	8	100.00		
SubTotal		24	60.00	0	-	16	40.00	40	100.00	2.20		
Total	112	70.00	6	3.75	42	26.25	160	100.00	2.44			

**B. Berdasarkan Jabatan**

Dimensi	Jabatan	Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
			Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
			f	%	f	%	f	%	f	%	
TRANSPARANSI	Auditor Pelaksana Lanjutan	C1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C2	-	-	-	-	1	100.00	1	100.00	
		C3	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C4	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C5	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		SubTotal	4	80.00	0	-	1	20.00	5	100.00	2.60
	Auditor Ahli Pertama	C1	1	50.00	1	50.00	-	-	2	100.00	
		C2	1	50.00	-	-	1	50.00	2	100.00	
		C3	1	50.00	-	-	1	50.00	2	100.00	
		C4	1	50.00	1	50.00	-	-	2	100.00	
		C5	1	50.00	1	50.00	-	-	2	100.00	
		SubTotal	5	50.00	3	30.00	2	20.00	10	100.00	2.30
	Auditor Ahli Muda	C1	2	28.57	3	42.86	2	28.57	7	100.00	
		C2	-	-	1	14.29	6	85.71	7	100.00	
		C3	-	-	3	42.86	4	57.14	7	100.00	
		C4	1	14.29	4	57.14	2	28.57	7	100.00	
		C5	1	14.29	4	57.14	2	28.57	7	100.00	
		SubTotal	4	11.43	15	42.86	16	45.71	35	100.00	1.66
	Auditor Ahli Madya	C1	15	71.43	3	14.29	3	14.29	21	100.00	
		C2	4	19.05	6	28.57	11	52.38	21	100.00	
C3		4	19.05	8	38.10	9	42.86	21	100.00		
C4		7	33.33	7	33.33	7	33.33	21	100.00		
C5		8	38.10	5	23.81	8	38.10	21	100.00		
SubTotal		38	36.19	29	27.62	38	36.19	105	100.00	2.00	
Auditor Ahli Utama	C1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
	C2	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00		
	C3	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00		
	C4	-	-	1	100.00	-	-	1	100.00		
	C5	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
	SubTotal	2	40.00	3	60.00	0	-	5	100.00	2.40	
Total		53	33.13	50	31.25	57	35.63	160	100.00	1.98	
AKUNTABILITAS	Auditor Pelaksana Lanjutan	C6	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C7	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C8	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C9	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C10	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C11	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C12	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
	Auditor Ahli Pertama	C6	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C7	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00	
		C8	1	50.00	1	50.00	-	-	2	100.00	
		C9	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00	
		C10	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00	
		C11	1	50.00	1	50.00	-	-	2	100.00	
		C12	1	50.00	1	50.00	-	-	2	100.00	
	Auditor Ahli Muda	C6	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C7	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00	
		C8	6	85.71	1	14.29	-	-	7	100.00	
		C9	7	100.00	-	-	-	-	7	100.00	
		C10	7	100.00	-	-	-	-	7	100.00	
		C11	4	57.14	2	28.57	1	14.29	7	100.00	
C12		3	42.86	2	28.57	2	28.57	7	100.00		
Auditor Ahli Madya	C6	4	57.14	2	28.57	1	14.29	7	100.00		
	C7	4	57.14	2	28.57	1	14.29	7	100.00		
	C8	17	80.95	1	4.76	3	14.29	21	100.00		
	C9	17	80.95	2	9.52	2	9.52	21	100.00		
	C10	19	90.48	-	-	2	9.52	21	100.00		
	C11	12	57.14	6	28.57	3	14.29	21	100.00		
	C12	16	76.19	-	-	5	23.81	21	100.00		
Auditor Ahli Utama	C6	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
	C7	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
	C8	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
	C9	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
	C10	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
	C11	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
	C12	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00		
Total		8	100.00	0	-	0	-	8	100.00	3.00	
Total		200	78.13	27	10.55	29	11.33	256	100.00	2.67	

Dimensi	Jabatan	Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
			Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
			f	%	f	%	f	%	f	%	
KEEFISIENAN & KEEFEKTIFAN	Auditor Pelaksana Lanjutan	C14	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C15	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C16	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C17	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C18	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		SubTotal	5	100.00	0	-	0	-	5	100.00	3.00
	Auditor Ahli Pertama	C14	1	50.00	-	-	-	-	1	50.00	
		C15	1	50.00	1	50.00	-	-	2	100.00	
		C16	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00	
		C17	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00	
		C18	2	100.00	-	-	-	-	2	100.00	
		SubTotal	8	80.00	1	10.00	1	10.00	10	100.00	2.70
	Auditor Ahli Muda	C14	2	28.57	1	14.29	4	57.14	7	100.00	
		C15	2	28.57	1	14.29	4	57.14	7	100.00	
		C16	4	57.14	-	-	3	42.86	7	100.00	
		C17	6	85.71	-	-	1	14.29	7	100.00	
		C18	2	28.57	-	-	5	71.43	7	100.00	
		SubTotal	16	45.71	2	5.71	17	48.57	35	100.00	1.97
	Auditor Ahli Madya	C14	15	71.43	1	4.76	5	23.81	21	100.00	
		C15	17	80.95	1	4.76	3	14.29	21	100.00	
		C16	19	90.48	-	-	2	9.52	21	100.00	
		C17	19	90.48	-	-	2	9.52	21	100.00	
		C18	8	38.10	1	4.76	12	57.14	21	100.00	
		SubTotal	78	74.29	3	2.86	24	22.86	105	100.00	2.51
	Auditor Ahli Utama	C14	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C15	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C16	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C17	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C18	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		SubTotal	5	100.00	0	-	0	-	5	100.00	3.00
Total			112	70.00	6	3.75	42	26.25	160	100.00	2.44

C. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Dimensi	Jabatan	Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
			Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
			f	%	f	%	f	%	f	%	
TRANSPARANSI	SMU	C1	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C2	-	-	-	-	1	100.00	1	100.00	
		C3	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C4	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C5	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		SubTotal	4	80.00	0	-	1	20.00	5	100.00	2.60
	S1	C1	15	60.00	6	24.00	4	16.00	25	100.00	
		C2	4	16.00	7	28.00	14	56.00	25	100.00	
		C3	3	12.00	11	44.00	11	44.00	25	100.00	
		C4	7	28.00	11	44.00	7	28.00	25	100.00	
		C5	8	32.00	8	32.00	9	36.00	25	100.00	
		SubTotal	37	29.60	43	34.40	45	36.00	125	100.00	1.94
	S2	C1	4	66.67	1	16.67	1	16.67	6	100.00	
		C2	1	16.67	1	16.67	4	66.67	6	100.00	
		C3	2	33.33	1	16.67	3	50.00	6	100.00	
		C4	2	33.33	2	33.33	2	33.33	6	100.00	
		C5	3	50.00	2	33.33	1	16.67	6	100.00	
		SubTotal	12	40.00	7	23.33	11	36.67	30	100.00	2.03
Total			53	33.13	50	31.25	57	35.63	160	100.00	1.98
AKUNTABILITAS	SMU	C6	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C7	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C8	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C9	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C10	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C11	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C12	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C13	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
	SubTotal	8	100.00	0	-	0	-	8	100.00	3.00	
	S1	C6	20	80.00	2	8.00	3	12.00	25	100.00	
		C7	22	88.00	3	12.00	-	-	25	100.00	
		C8	20	80.00	1	4.00	4	16.00	25	100.00	
		C9	21	84.00	2	8.00	2	8.00	25	100.00	
		C10	23	92.00	-	-	2	8.00	25	100.00	
		C11	15	60.00	6	24.00	4	16.00	25	100.00	
		C12	17	68.00	2	8.00	6	24.00	25	100.00	
		C13	16	64.00	3	12.00	6	24.00	25	100.00	
	SubTotal	154	77.00	19	9.50	27	13.50	200	100.00	2.64	
	S2	C6	4	66.67	2	33.33	-	-	6	100.00	
		C7	6	100.00	-	-	-	-	6	100.00	
		C8	4	66.67	2	33.33	-	-	6	100.00	
		C9	6	100.00	-	-	-	-	6	100.00	
		C10	6	100.00	-	-	-	-	6	100.00	
		C11	3	50.00	3	50.00	-	-	6	100.00	
C12		4	66.67	1	16.67	1	16.67	6	100.00		
C13		5	83.33	-	-	1	16.67	6	100.00		
SubTotal	38	79.17	8	16.67	2	4.17	48	100.00	2.75		
Total			200	78.13	27	10.55	29	11.33	256	100.00	2.67

Dimensi	Jabatan	Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total		Rata-rata
			Ya		Ragu-ragu		Tidak		f	%	
			f	%	f	%	f	%	f	%	
KEEFISIENAN & KEEFKTIFAN	SMU	C14	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C15	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C16	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C17	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		C18	1	100.00	-	-	-	-	1	100.00	
		SubTotal	5	100.00	0	-	0	-	5	100.00	3.00
	S1	C14	14	56.00	2	8.00	9	36.00	25	100.00	
		C15	16	64.00	2	8.00	7	28.00	25	100.00	
		C16	21	84.00	-	-	4	16.00	25	100.00	
		C17	22	88.00	-	-	3	12.00	25	100.00	
		C18	9	36.00	1	4.00	15	60.00	25	100.00	
		SubTotal	82	65.60	5	4.00	38	30.40	125	100.00	2.35
	S2	C14	5	83.33	-	-	1	16.67	6	100.00	
		C15	5	83.33	1	16.67	-	-	6	100.00	
		C16	5	83.33	-	-	1	16.67	6	100.00	
		C17	6	100.00	-	-	-	-	6	100.00	
		C18	4	66.67	-	-	2	33.33	6	100.00	
		SubTotal	25	83.33	1	3.33	4	13.33	30	100.00	2.70
	<b>Total</b>		<b>112</b>	<b>70.00</b>	<b>6</b>	<b>3.75</b>	<b>42</b>	<b>26.25</b>	<b>160</b>	<b>100.00</b>	<b>2.44</b>



**Lampiran 5: Hasil Pengujian Asumsi Klasik  
(Output SPSS 17.0)**

**1. Hasil Uji Normalitas**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KarakteristikFAI	32	26.63	61.46	50.2704	9.01886
PeranAI	32	13.00	34.57	26.2096	5.91438
GG	32	24.12	54.67	43.4669	8.55851
Valid N (listwise)	32				

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		KarakteristikFAI	PeranAI	GG
N		32	32	32
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	50.2704	26.2096	43.4669
	Std. Deviation	9.01886	5.91438	8.55851
Most Extreme Differences	Absolute	.183	.124	.106
	Positive	.107	.079	.095
	Negative	-.183	-.124	-.106
Kolmogorov-Smirnov Z		1.033	.699	.602
Asymp. Sig. (2-tailed)		.236	.713	.862

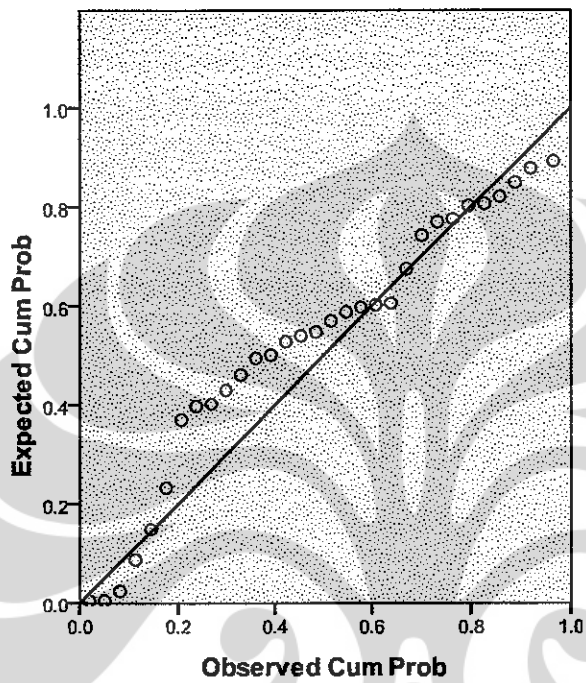
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

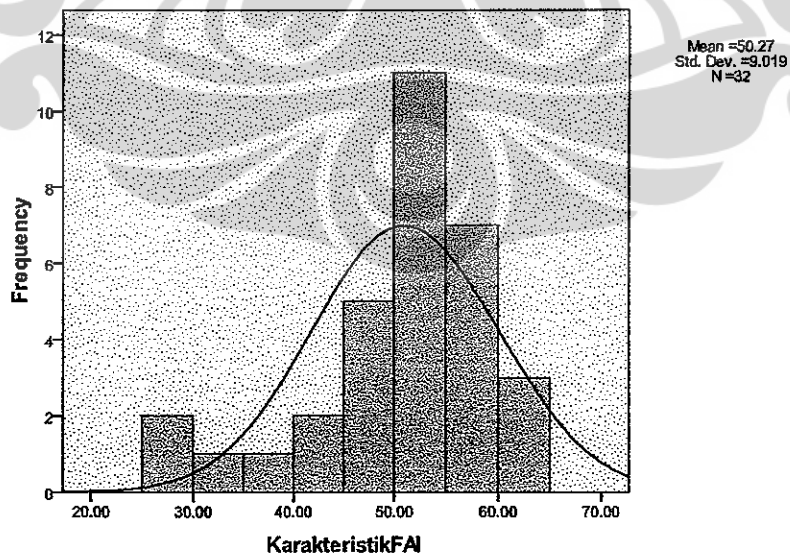


## 2. Normal P-P Plot dan Grafik Histogram

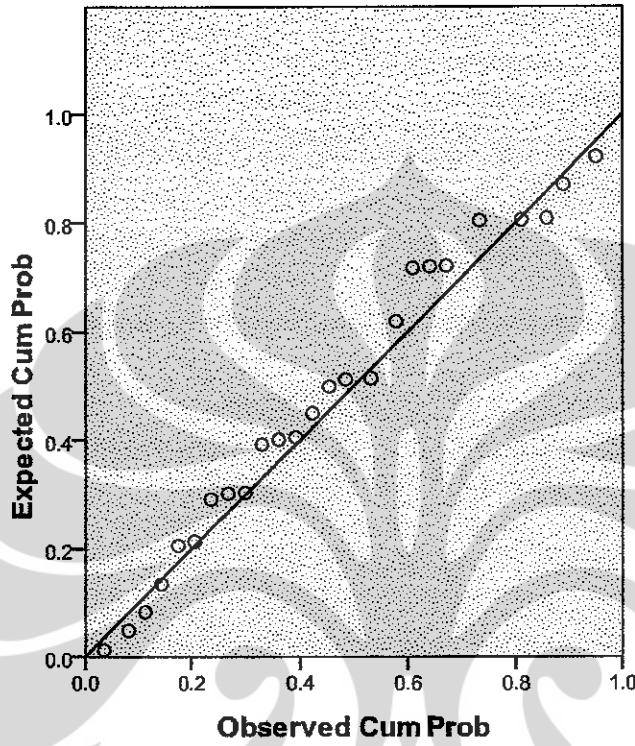
Normal P-P Plot of KarakteristikFAI



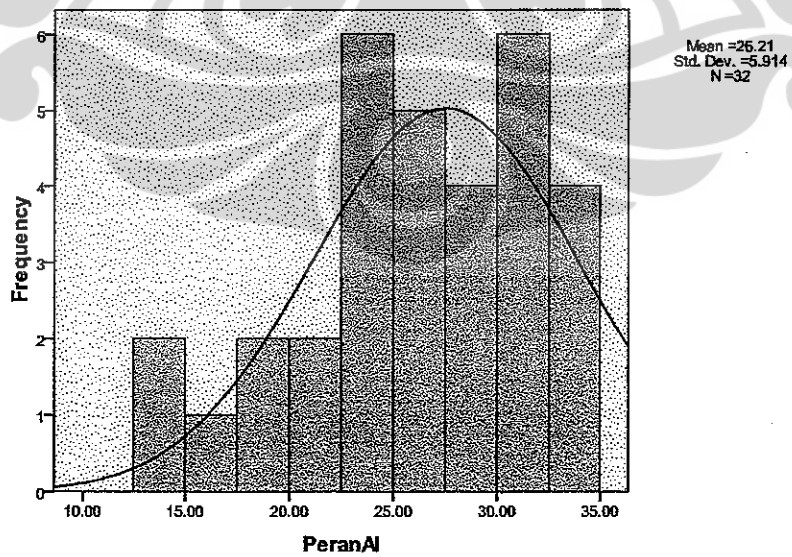
KarakteristikFAI



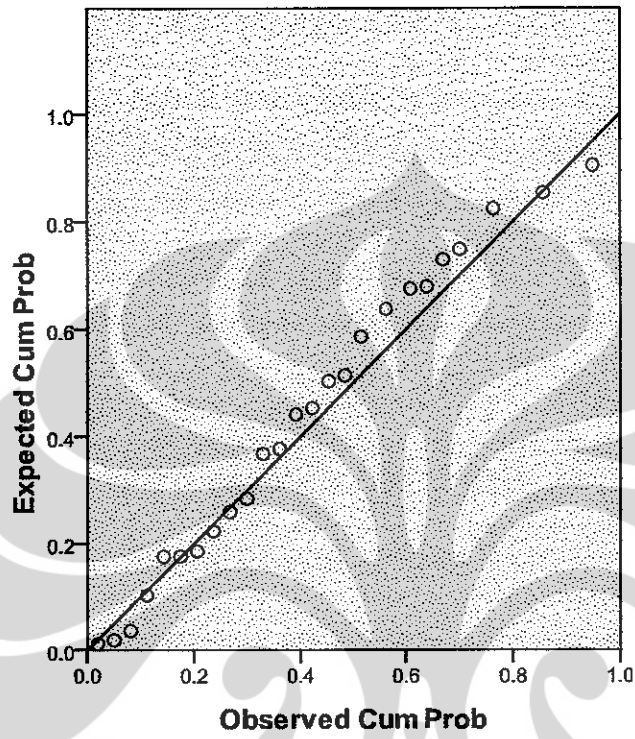
Normal P-P Plot of PeranAI



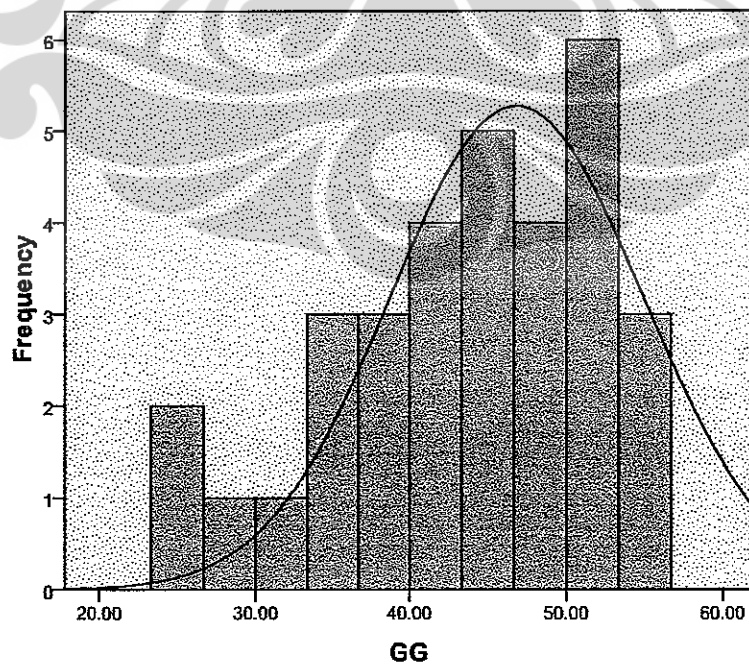
PeranAI



Normal P-P Plot of GG



GG



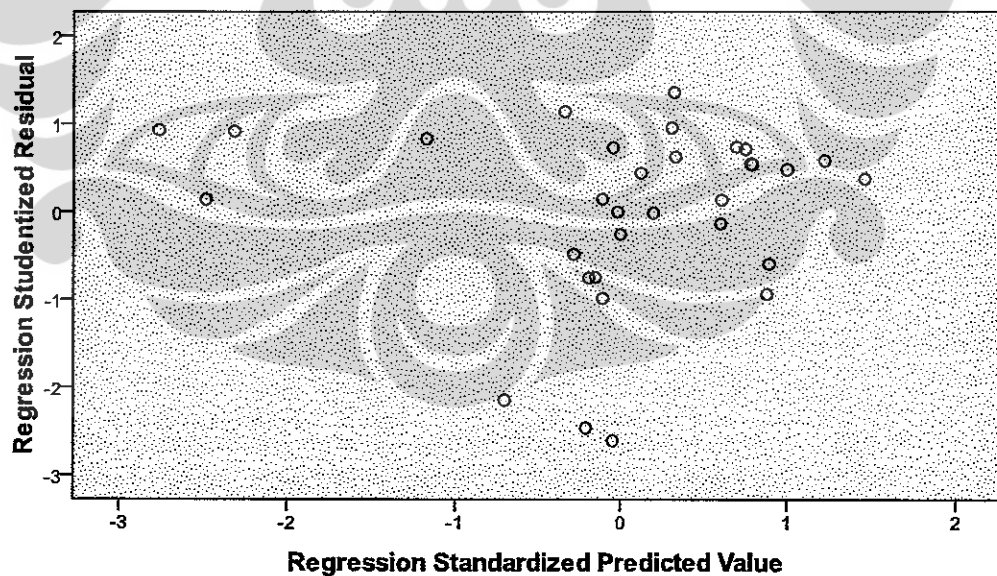
### 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.165	4.901		1.258	.218
	lnx2	.259	1.373	.046	.189	.852
	lnx1	-1.057	1.673	-.155	-.632	.532

a. Dependent Variable: lnei2

#### Scatterplot

Dependent Variable: GG



**Lampiran 6: Hasil Pengujian Hipotesis**  
**(Output SPSS 17.0)**

**1. Hubungan antara penerapan karakteristik fungsi audit internal (X<sub>1</sub>) dan peran audit internal (X<sub>2</sub>)**

**Correlations**

		KarakteristikFAI	PeranAI
KarakteristikFAI	Pearson Correlation	1	.575**
	Sig. (2-tailed)		.00058
	N	32	32
PeranAI	Pearson Correlation	.575**	1
	Sig. (2-tailed)	.00058	
	N	32	32

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**2. Pengaruh penerapan karakteristik fungsi audit internal (X<sub>1</sub>) dan peran audit internal (X<sub>2</sub>) terhadap kualitas *Good Governance* (Y)**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.612 <sup>a</sup>	.374	.331	7.00071593

a. Predictors: (Constant), PeranAI, KarakteristikFAI

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	849.244	2	424.622	8.664	.001 <sup>a</sup>
	Residual	1421.291	29	49.010		
	Total	2270.535	31			

a. Predictors: (Constant), PeranAI, KarakteristikFAI

b. Dependent Variable: GG

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.475	7.363		1.830	.078
	KarakteristikFAI	.385	.170	.406	2.262	.031
	PeranAI	.405	.260	.280	1.560	.130

a. Dependent Variable: GG